

PROFESI KEGURUAN

Perspektif Sains dan Islam

Menurut Ar Rasyidin dan Nizar, pendidik adalah orang yang tugasnya mendidik. Sedangkan dalam pengertian khusus – perspektif falsafah pendidikan islami – pendidik adalah orang yang bertugas untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali perjanjian suci (*syahadâh*) yang pernah diikrarkan manusia di hadapan Tuhannya. Untuk melakukan tugas itu, maka pendidik haruslah seorang yang memiliki *al-'ilm wa al-adâb*, yang dengan *al-'ilm* dan adab tersebut ia mampu mengantarkan dirinya pada *syahadâh* terhadap Tuhan, sehingga ia layak menempati posisi sebagai pemelihara dan pembimbing manusia untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali perjanjian atau *syahadâh* primordialnya terhadap Allah Swt.

Dari pendapat di atas, maka dapat kita pelajari kembali bahwa saat ini terkadang generasi muda bahkan para guru itu sendiri kehilangan tokoh yang dapat “digugu” dan “ditiru”. Bila dilihat dalam historis bangsa Indonesia khususnya dalam penelitian begitu banyak figur guru bangsa yang dapat dijadikan teladan, sumber inspirasi dalam menggeluti profesi keguruan ini. Jika menyebutkan guru bangsa, maka ingatan kita tidak terlepas dari sederetan nama yang mengukir pendidikan Indonesia. Dengan tidak bermaksud untuk “mengerdilkan” eksistensi figur-figur lainnya, dalam hal ini yang dipaparkan 3 (tiga) figur guru bangsa yaitu Ki Hajar Dewantara, Mohammad Syafei, dan KH. Ahmad Dahlan.

Butir-butir pemikiran-pemikiran guru bangsa tersebut sampai saat ini masih relevan dengan masalah pendidikan dan pembelajaran kekinian. Seolah-olah butir-butir pemikiran tersebut tidak hilang dan tergerus zaman. Ketika membahas tentang biografi dan butir-butir pemikiran “guru bangsa” tersebut memang tidak pernah ada habisnya. Ada banyak sekali hal yang harus kita pelajari dan kita ambil hikmahnya.

Buku ini terdiri dari 10 bab pembahasan yang dapat memberikan khazanah keilmuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan para pendidik.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwirangung No. 112
Kel. Leuwirangung, Ket. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



PROFESI KEGURUAN

Perspektif Sains dan Islam

Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.



PROFESI KEGURUAN

Perspektif Sains dan Islam



Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.

PROFESI KEGURUAN

Perspektif Sains dan Islam

PROFESI KEGURUAN

Perspektif Sains dan Islam

Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Rusydi Ananda

Profesi Keguruan (Perspektif Sains dan Islam)/Rusydi Ananda
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.
xii, 298 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 291
ISBN 978-623-231-292-0

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.2516 RAJ

Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.

PROFESI KEGURUAN (PERSPEKTIF SAINS DAN ISLAM)

Cetakan ke-1, Desember 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Avida Avia
Setter : Jaenudin
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

BUKU INI DEDEDIKASIKAN KEPADA
(Alm) Ayahanda H. Thaharuddin, AG

Mereka mungkin bisa lupa
Apa yang Anda katakan
Tapi mereka takkan pernah melupakan
Perasaan yang Anda timbulkan
Dalam hati mereka



PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt., dengan rahmat dan izin-Nya, buku Profesi Keguruan dapat diterbitkan. Selawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pengetahuan terkait dengan kajian profesi keguruan yang telah hadir sebelumnya. Di samping itu secara khusus penulisan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan mahasiswa S1 dan S2 di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyempurnaannya akan dilakukan seiring dengan perkembangan dan respons dari para pembaca.

Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya ini sebagai kontribusi penulis terhadap kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Selamat Membaca!

Penulis

Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.



DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Guru	1
B. Peran dan Fungsi Guru	3
C. Guru Efektif	20
BAB 2 PROFESI DAN PROFESIONALISME GURU	33
A. Pengertian	33
B. Ciri-Ciri Profesi Keguruan	37
C. Peningkatan Profesi Keguruan	53
BAB 3 KODE ETIK GURU	71
A. Pengertian	71
B. Urgensi Kode Etik	73
C. Kode Etik Guru Indonesia	80
D. Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik Guru	93

BAB 4	KOMPETENSI GURU	97
	A. Pengertian	97
	B. Standar Kompetensi Guru	99
	C. Kompetensi Guru Indonesia	110
BAB 5	KINERJA GURU	155
	A. Pengertian	155
	B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja	158
	C. Indikator Kinerja Guru	164
	D. Instrumen Pengukuran Kinerja Guru	172
BAB 6	SERTIFIKASI GURU	187
	A. Pengertian	187
	B. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi	188
	C. Proses Sertifikasi	189
	D. Urgensi Uji Kompetensi dalam Sertifikasi Guru	199
	E. Efek Rantai Sertifikasi	201
BAB 7	ORGANISASI PROFESI GURU	207
	A. Pengertian	207
	B. Peran dan Fungsi Organisasi Profesi	208
	C. Bentuk Organisasi Profesi Guru	211
	D. Organisasi Profesi Guru Indonesia	215
BAB 8	KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN DAN PERLIINDUNGAN GURU	221
	A. Kesejahteraan Guru	221
	B. Penghargaan Terhadap Guru	228
	C. Perlindungan Guru	229
BAB 9	PROFESI KEGURUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM	235
	A. Pengertian	235
	B. Peran, Fungsi dan Tugas Guru	238

C. Karakteristik Guru	241
D. Kode Etik Guru	248
BAB 10 EPILOG: GURU BANGSA	255
A. Ki Hajar Dewantara	256
B. Muhammad Syafei	273
C. KH. Ahmad Dahlan	280
DAFTAR PUSTAKA	291
BIODATA PENULIS	297



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Guru

Kata “Guru” terkadang ditengah-tengah masyarakat merupakan akronim dari orang yang di “gugu” dan di “tiru” yaitu orang yang selalu dapat ditaati dan diikuti (Yamin dan Maisah, 2010: 88). Dalam hal ini guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain yang melaksanakan pendidikan dan pembelajaran ditempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di rumah dan sebagainya (Djamarah, 2005: 31).

Purwanto (1995: 138) menegaskan bahwa semua orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dapat disebut “guru”, misalnya guru silat, guru mengaji, guru menjahit dan sebagainya. Hal ini senada dijelaskan Pidarta (1997: 264) bahwa guru adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak.

Dalam perspektif tradisional pengertian guru dijelaskan Roestiyah yaitu guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan (Nurdin dan Usman, 2002: 7). Namun saat ini terjadi perluasan makna guru dari hanya sekadar penyampai ilmu pengetahuan kepada hal-hal yang lebih manusiawi sebagaimana

dijelaskan Uno yang dikutip Aditya dan Wulandari (2011: 28) bahwa guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, guru memiliki peran kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pidarta (1997: 265) bahwa guru dan dosen adalah pejabat profesional sebab mereka diberi tunjangan profesional.

Usman (2002: 5) menegaskan bahwa guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru profesional yang harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya.

Wiyani (2015:27-28) mengumpulkan pendapat para ahli terkait dengan pengertian guru sebagai berikut.

1. Ahmad Tafsir: guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik, baik potensi kognitif maupun potensi psikomotorik.
2. Imam Barnadib: guru adalah setiap orang yang dengan sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan.
3. Ahmad D. Marimba: guru adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap pendidikan si terdidik.
4. Hadari Nawawi: guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di kelas atau di sekolah.
5. Ahmad Janan Asifuddin: guru adalah orang yang mengajar dan mentransformasikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai terhadap peserta didik.

6. Sutari Imam Barnadib: guru adalah setiap orang yang sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaannya.
7. Zakiah Daradjat: guru secara implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul tanggung jawab pendidikan yang dipikulkan di pundak para orang tua.

Sebutan guru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mencakup: (1) guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karir, (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan (3) guru dalam jabatan pengawas.

Dari pemaparan di atas maka dapatlah dimaknai bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun secara klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam penjelasan tersebut terkandung makna bahwa guru merupakan tenaga professional yang memiliki tugas-tugas professional dalam pendidikan dan pembelajaran.

B. Peran dan Fungsi Guru

Peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Secara khusus dalam pembelajaran guru mempunyai peran dan fungsi untuk mendorong, membimbing dan memfasilitas siswa untuk belajar. Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya peran dan fungsi dalam pendidikan dengan ungkapan: *Ing ngarsa sung tulada* berarti guru berada di depan memberi teladan, *ing madya mangun karsa*, berarti guru berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan *tut wuri handayani* berarti guru dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Konsep yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di Indonesia.

Merujuk kepada konsep yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, maka guru merupakan faktor yang dominan dan penting dalam pendidikan, karena bagi siswa, guru dipersonifikasikan sebagai sosok teladan, sosok panutan dan sosok idola. Oleh karena itu, seyogyanya guru harus menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana konsep yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara tersebut.

Mencermati peran dan fungsi guru yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut maka sesungguhnya peran guru itu sungguhlah luas. Keluasan peran guru tersebut dipaparkan Adams dan Dickey sebagaimana dikutip Hamalik (2004: 123) yaitu peran guru sesungguhnya sangat luas yang meliputi empat hal besar yaitu:

1. Guru sebagai pengajar (*teacher as instructor*)

Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah (kelas) yaitu menyampaikan pelajaran agar peserta didik memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan itu.

Selain dari itu, guru juga berusaha agar terjadi perubahan pada diri peserta didik pada aspek sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial, apresiasi dan sebagainya melalui pengajaran yang diberikannya secara sistematis dan terencana.

2. Guru sebagai pembimbing (*teacher as counsellor*)

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada peserta didik agar mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal dirinya sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Peserta didik membutuhkan guru dalam hal mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, kesulitan pendidikan, kesulitan memilih pekerjaan, kesulitan dalam hubungan sosial, dan interpersonal. Karena itu setiap guru perlu memahami dengan baik tentang teknik bimbingan kelompok, penyuluhan individual, teknik mengumpulkan keterangan, teknik evaluasi dan psikologi belajar.

3. Guru sebagai ilmuwan (*teacher as scientist*)

Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Guru bukan saja berkewajiban untuk menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik, tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan dan terus-menerus memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya. Pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang dengan pesat, guru harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya belajar sendiri, mengadakan penelitian, mengikuti pelatihan, menulis buku, menulis karya ilmiah sehingga perannya sebagai ilmuwan terlaksana dengan baik.

4. Guru sebagai pribadi (*teacher as person*)

Sebagai pribadi setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh peserta didiknya, oleh orang tua dan masyarakat. Sifat-sifat itu sangat diperlukan agar dapat melaksanakan pengajaran secara efektif. Karena itu wajib bagi guru berusaha untuk memupuk sifat-sifat pribadinya sendiri dan mengembangkan sifat-sifat pribadi yang disenangi oleh orang lain.

Katz sebagaimana dikutip Sardiman (2003) memaparkan peran dan fungsi guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai dan orang yang menguasai bahan yang diajarkan.

Selanjutnya menurut Slameto (1995: 97) peran dan fungsi guru sebagai berikut.

1. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai.
3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri siswa.

Pidarta (1997: 278) mengutip pendapat beberapa ahli terkait dengan peran guru diantaranya Weil (1978), Connell (1978) dan Surya (1996). Menurut Weil peran guru adalah: (1) sebagai konselor, (2) bertindak sebagai fasilitator, (3) sebagai manajer pengajaran, (4) penyusun kurikulum, (5) pengajar, (6) sebagai penilai, dan (7) menjadi pendisiplin.

Menurut Connel peran guru adalah: (1) sebagai pendidik yang memberi dorongan, supervisi, pendisiplin peserta didik, (2) sebagai model perilaku yang akan ditiru, (3) sebagai pengajar dan pembimbing dalam proses pembelajaran, (4) sebagai pengajar yang selalu meningkatkan profesinya khususnya untuk memperbarui materi yang akan diajarkan, (5) sebagai komunikator terhadap orang tua siswa dan masyarakat, (6) sebagai tata usaha terhadap administrasi kelas yang diajarnya, dan (7) sebagai anggota organisasi profesi pendidikan.

Sedangkan menurut Surya peran guru di masa depan adalah: (1) menyusun sumber-sumber pendidikan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan, (2) sebagai spesialis sumber-sumber pendidikan yang ada di masyarakat, (3) lebih banyak memberikan layanan pendidikan di masyarakat dan dalam keluarga, (4) bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mendidik anak dan memandang dirinya sebagai orang tua di sekolah, (5) sebagai konselor dan administrator terhadap mitra kerja di masyarakat dan personalia lembaga pendidikan, (6) sebagai salah satu unsur sistem pendidikan, bukan di bawah komando pemimpin lembaga, (7) mempergunakan wewenangnya sebagai alat pendidikan, dan (8) pengembangan profesi direncanakan bersama antara pendidik bersangkutan dan lembaga pendidikan tempat bekerja.

Mulyasa (2007: 19) memaparkan terdapat lima peran fungsi guru yang strategi dalam pembelajaran. Kelima peran dan fungsi guru tersebut sebagai berikut.

1. Sebagai pendidik dan pengajar

Setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktik pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran.

2. Sebagai anggota masyarakat

Setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat, untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antarmanusia, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok.

3. Sebagai pemimpin

Setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antarmanusia, teknik berkomunikasi serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah.

4. Sebagai administrator

Setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan di sekolah, sehingga harus guru memiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin serta memahami strategi dan manajemen pendidikan dan pembelajaran.

5. Sebagai pengelola pembelajaran

Setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi pembelajaran di dalam maupun di luar kelas dan tentunya dapat menerapkannya.

Hal senada dengan penjelasan Mulyasa di atas, menurut Usman (2002: 9-13) peran dan fungsi guru khususnya dalam pembelajaran sebagai berikut.

1. Guru sebagai demonstrator

Melalui peranannya sebagai demonstrator, *lecturer* atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.

2. Guru sebagai pengelola kelas

Guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan pembelajaran terarah kepada tujuan pendidikan.

3. Guru sebagai mediator dan fasilitator

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran karena media pembelajaran merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses pembelajaran. Media pembelajaran diperlukan untuk melengkapi dalam pembelajaran dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

4. Guru sebagai evaluator

Sebagai evaluator mampu melakukan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai. Penilaian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan

pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, setiap ketepatan atau keefektifan metode pembelajaran. Tujuan lainnya untuk mengetahui kedudukan siswa di dalam kelas atau dikelompoknya.

5. Guru sebagai administrator

Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, guru berperan sebagai berikut.

- a. Pengambilan inisiatif, pengarah dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya.
- b. Wakil masyarakat yang berarti dalam lingkungan sekolah, guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik dan diterima keberadaannya.
- c. Orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Tanggung jawab ini merupakan amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan keikhlasan.
- d. Penegak disiplin, guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin di lingkungan sekolah.
- e. Pelaksana administrasi pendidikan, di samping menjadi pengajar, guru bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pembelajaran dan harus mampu melaksanakan kegiatan administrasi khususnya terkait dengan administrasi pembelajaran dan administrasi penilaian hasil belajar siswa.
- f. Pemimpin generasi muda, masa depan generasi mudah terletak di tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa.
- g. Penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan.

6. Guru secara pribadi

Dari perspektif *self oriented*, guru harus berperan sebagai:

- a. Petugas sosial yaitu individu yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat.

- b. Pelajar dan ilmuwan yaitu senantiasa terus-menerus menuntut ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran.
 - c. Orang tua, yaitu mewakili orang tua murid di sekolah dalam pendidikan anak didiknya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan sesudah keluarga, sehingga dalam arti luas sekolah merupakan keluarga, guru berperan sebagai orang tua bagi anak didiknya.
 - d. Pencari teladan yaitu yang senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk siswa bukan untuk seluruh masyarakat. Guru menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku bagi peserta didik maupun masyarakat umum lainnya.
 - e. Pencari keamanan yaitu senantiasa mencarikan rasa aman bagi siswa. Guru menjadi tempat berlindung bagi siswa untuk memperoleh rasa aman dan puas di dalamnya.
7. Guru secara psikologis
- Peran guru secara psikologis dipandang sebagai berikut.
- a. Ahli psikologi, yaitu petugas psikologi dalam pendidikan yang melaksanakan tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologi khususnya psikologi perkembangan peserta didik.
 - b. Seniman dalam hubungan antarmanusia yaitu individu yang mampu membuat hubungan antarmanusia untuk tujuan tertentu dengan menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
 - c. Pembentuk kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan dan pembelajaran.
 - d. *Catalyc agent* yaitu individu yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan.
 - e. *Mental hygiene worker* yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental khususnya kesehatan mental siswa.

Terkait dengan peran dan fungsi guru, Djamarah (2005: 43-48) menyebutkan 13 (tiga belas) peran dan fungsi guru sebagai pendidik atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru yaitu:

1. Sebagai korektor

Guru dapat membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda tersebut harus benar-benar dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai tersebut mungkin telah anak didik miliki dan mungkin pula telah memengaruhi sebelum anak didik masuk sekolah.

2. Sebagai inspirator

Guru dapat memberikan inspirasi yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik berdasarkan teori-teori yang dipelajari maupun dari pengalaman pribadi guru.

3. Sebagai informator

Guru dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru, kesalahan informasi adalah racun bagi anak didik untuk dapat menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasa sebagai kuncinya, di samping penguasaan bahan yang akan diajarkan.

4. Sebagai organisator

Guru sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri anak didik.

5. Sebagai motivator

Guru hendaknya mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya.

6. Sebagai inisiator

Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pembelajaran. Proses interaksi edukatif yang ada

harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Sebagai fasilitator

Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang tidak kondusif merupakan salah satu faktor anak didik malas belajar. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengkondisikan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan diperlukan pada diri guru.

8. Sebagai pembimbing

Peranan guru yang tidak kalah pentingnya dari semua perannya adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di kelas adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa.

9. Sebagai demonstrator

Dalam proses pembelajaran, tidak semua materi pembelajaran dapat dipahami anak didik, apalagi bagi anak didik yang memiliki kemampuan inteligensi yang rendah. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik guru harus berusaha dengan membantunya dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik, tidak terjadi kesalahan pengertian antara guru dan anak didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

10. Sebagai pengelola kelas

Guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima materi pembelajaran. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pembelajaran, maka tidak mustahil akan berakibat mengganggu jalannya proses interaksi edukatif.

11. Sebagai mediator

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran dalam berbagai bentuk dan jenisnya.

Media berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaksi edukatif. Penggunaan media pembelajaran tentunya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

12. Sebagai supervisor

Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran. Untuk itu maka guru harus menguasai teknik-teknik supervisi dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi pembelajaran.

13. Sebagai evaluator

Guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil belajar) saja tetapi juga menilai proses pembelajaran. Dari aktivitas tersebut akan mendapatkan *feedback* tentang pelaksanaan interaksi pembelajaran yang telah dilakukan.

Peran guru dalam pembelajaran menurut Mulyasa (2007: 37-64) sebagai berikut.

1. Guru sebagai pendidik

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.

2. Guru sebagai pengajar

Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar.

Untuk itu, beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran sebagai berikut.

- a. Membuat ilustrasi, pada dasarnya ilustrasi menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka.
- b. Mendefinisikan, meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki peserta didik.

- c. Menganalisis, membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian.
 - d. Mensintesis, mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti, hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain nampak jelas, dan setiap masalah itu tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar.
 - e. Bertanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang dipelajari menjadi lebih jelas.
 - f. Mendengarkan, memahami peserta didik dan berusaha menyederhanakan setiap masalah serta membuat kesulitan nampak jelas baik bagi guru maupun peserta didik.
 - g. Menciptakan kepercayaan, peserta didik akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar.
 - h. Memberikan pandangan yang bervariasi, melihat bahan yang dipelajari dari berbagai sudut pandang dan melihat masalah dalam kombinasi yang bervariasi.
 - i. Menyediakan media untuk mengkaji materi standar, memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran dan sumber belajar yang berhubungan dengan materi standar.
 - j. Menyesuaikan metode pembelajaran, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik serta menghubungkan materi baru dengan sesuatu yang telah dipelajari.
 - k. Memberikan nada perasaan, membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan melalui antusias dan semangat.
3. Guru sebagai pembimbing

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (*journey*), yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks.

Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Sebagai pembimbing perjalanan guru memerlukan kompetensi untuk melaksanakan hal-hal berikut ini.

- a. Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Tugas guru adalah menetapkan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan latar belakang dan kemampuannya, serta kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam mencapai tujuan. Untuk merumuskan tujuan, guru perlu melihat dan memahami seluruh aspek pembelajaran.
 - b. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Dengan kata lain peserta didik harus dibimbing untuk mendapatkan pengalaman, dan membentuk kompetensi yang akan mengantarkan mereka mencapai tujuan. Dalam setiap hal peserta didik harus belajar, untuk itu mereka harus memiliki pengalaman dan kompetensi yang dapat menimbulkan kegiatan belajar.
 - c. Guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini mungkin merupakan tugas yang sulit tetapi penting, karena guru harus memberikan kehidupan dan arti terhadap kegiatan belajar. Bisa jadi pembelajaran direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara tuntas dan rinci, tetapi kurang relevan, kurang hidup, kurang bermakna, kurang menantang rasa ingin tahu dan kurang imajinatif.
 - d. Guru harus melaksanakan penilaian. Dalam hal ini diharapkan guru dapat melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dan memanfaatkan hasil penilaian tersebut untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.
4. Guru sebagai pelatih
- Proses pendidikan dan pelatihan memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk

bertindak sebagai pelatih. Tanpa pelatihan peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing.

5. Guru sebagai penasihat

Guru adalah seorang penasihat terbaik bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasihat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasihati orang.

6. Guru sebagai pembaharu (inovator)

Guru menerjemahkan pengalaman yang lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik yang belajar sekarang secara psikologis berada jauh dari pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna dan diwujudkan dalam pendidikan. Tugas guru adalah memahami bagaimana kenyataan tersebut dan bagaimana menjembatani secara efektif, maka untuk itu inovasi diperlukan.

7. Guru sebagai model dan teladan

Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran itu tidak mudah untuk ditentang apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat perhatian peserta didik serta orang sekelilingnya. Sehubungan dengan itu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan peran ini adalah:

- a. Sikap dasar, postur psikologis yang akan nampak dalam masalah-masalah penting seperti keberhasilan, kegagalan, pembelajaran, kebenaran, hubungan antarmanusia, agama, pekerjaan.
- b. Bicara dan gaya bicara, penggunaan bahasa sebagai alat berpikir dan bertindak.
- c. Kebiasaan bekerja, gaya yang dipakai oleh seseorang dalam bekerja yang ikut mewarnai kehidupannya.

- d. Sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pengertian hubungan antara luasnya pengalaman dan nilai serta tidak mungkinya mengelak dari kesalahan.
 - e. Pakaian, merupakan perlengkapan pribadi yang penting dan menampakkan eksistensi seluruh kepribadian.
 - f. Hubungan kemanusiaan, diwujudkan dalam semua pergaulan manusia, intelektual, moral, keindahan, terutama bagaimana berperilaku.
 - g. Proses berpikir, cara yang digunakan oleh pikiran dalam menghadapi dan memecahkan masalah.
 - h. Perilaku neurotis, suatu pertahanan yang dipergunakan untuk melindungi diri dan bisa juga untuk menyakiti orang lain.
 - i. Selera, pilihan yang secara jelas merefleksikan nilai-nilai yang dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan.
 - j. Keputusan, keterampilan rasional dan intuitif yang dipergunakan untuk menilai setiap situasi.
 - k. Kesehatan, kualitas tubuh, pikiran dan semangat yang merefleksikan kekuatan, perspektif, sikap tenang, antusias dan semangat hidup yang selalu optimis.
 - l. Gaya hidup secara umum, apa yang dipercaya oleh seseorang tentang aspek kehidupan dan tindakan untuk mewujudkan kepercayaan itu.
8. Guru sebagai pribadi
- Guru dituntut memiliki kepribadian yang mencerminkan sebagai seorang pendidik sejati. Tuntutan akan kepribadian sebagai pendidik kadang-kadang dirasakan lebih berat dibandingkan profesi lainnya. Untuk itu kestabilan emosi amat diperlukan dalam menjalani kehidupan di sekolah maupun di masyarakat.
9. Guru sebagai peneliti
- Ilmu pengetahuan akan terus berkembang yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Oleh karena itu, guru adalah seorang pencari ilmu atau peneliti yang selalu berusaha mencari ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.

10. Guru sebagai pendorong kreativitas

Kreativitas merupakan hal penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas ditandai adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Peran ini akan memicu guru untuk senantiasa berusaha menemukan cara-cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik sehingga peserta didik akan menilainya bahwa guru memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat rutin saja.

11. Guru sebagai pembangkit pandangan

Guru dituntut untuk memberikan dan memelihara pandangan tentang keagungan kepada peserta didiknya. Mengemban peran ini maka guru harus terampil dalam berkomunikasi dengan peserta didik di segala umur, sehingga setiap langkah dari proses pendidikan yang dikelolanya dilaksanakan untuk menunjang peran ini.

12. Guru sebagai pekerja rutin

Guru bekerja dengan keterampilan, dan kebiasaan tertentu serta kegiatan rutin yang dilakukan hari demi hari. Jika kegiatan tersebut tidak dikerjakan dengan baik dan keikhlasan maka akan menjadi beban yang memberatkan.

Sedikitnya terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan rutin yang dikerjakan guru dalam pembelajaran yaitu:

- a. Bekerja tepat waktu baik di awal maupun akhir pembelajaran. Ketepatan waktu ini menjadi penting karena guru merupakan sosok yang menjadi panutan, apa kata peserta didik kalau gurunya tidak disiplin waktu.
- b. Membuat catatan dan laporan sesuai dengan standar kinerja, ketepatan dan jadwal waktu.
- c. Membaca, mengevaluasi dan mengembalikan hasil kerja peserta didik.
- d. Mengatur kehadiran peserta didik dengan penuh tanggung jawab.

- e. Mengatur jadwal kegiatan harian, jadwal mingguan, semesteran dan tahunan.
 - f. Mengembangkan peraturan dan prosedur kegiatan kelompok termasuk diskusi.
 - g. Menetapkan jadwal kerja peserta didik.
 - h. Mengadakan pertemuan yang terjadwal dengan orang tua dan dengan peserta didik.
 - i. Mengatur tempat duduk peserta didik.
 - j. Memahami peserta didik.
 - k. Menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, kepustakaan, dan media pembelajaran.
 - l. Menghadiri pertemuan dengan guru, orang tua peserta didik dan alumni.
 - m. Menciptakan iklim kelas yang kondusif sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
 - n. Melaksanakan latihan-latihan pembelajaran yang bermanfaat bagi peserta didik.
 - o. Merencanakan program khusus dalam pembelajaran, misalnya karyawisata.
 - p. Menasihati peserta didik.
13. Guru sebagai pemindah kemah
- Guru adalah seorang pemindah kemah, yang suka memindah-mindahkan dan membantu peserta didik meninggalkan hal lama menuju sesuatu yang baru yang bisa mereka alami.
- Guru dan peserta didik bekerja sama mempelajari cara baru dan meninggalkan kepribadian yang telah membantunya mencapai tujuan dan menggantinya sesuai dengan tuntutan masa kini. Proses ini menjadi suatu transaksi edukatif bagi guru dan peserta didik dalam pembelajaran di kelas.
14. Guru sebagai pembawa cerita
- Cerita yang berisikan hikmah dan pelajaran sangat bermanfaat bagi peserta didik, oleh karena itu guru dituntut memiliki kemampuan untuk bercerita. Sebagai pembawa cerita yang baik maka guru harus memahami bagaimana menggunakan suaranya, mampu

memvariasikan irama dan volume suara, memilih waktu pelompatan cerita, mengolah ide yang diperlukan, serta menggunakan kata-kata yang tepat dan jelas.

15. Guru sebagai aktor

Sebagai aktor guru melakukan apa yang ada dalam naskah yang telah disusun dengan mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Untuk itu guru harus mengembangkan pengetahuan yang telah dikumpulkan serta mengembangkan kemampuan untuk mengkomunikasikan pengetahuan itu. Dengan kata lain guru mempelajari dan melakukan semua hal yang berhubungan dengan tugasnya, sehingga dapat bekerja secara efektif.

16. Guru sebagai emansipator

Guru berperan sebagai emansipator bagi peserta didiknya ketika peserta didik telah menilai dirinya sebagai pribadi yang tak berharga, merasa dicampakkan atau selalu diuji dengan berbagai kesulitan sehingga hampir putus asa, dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri. Ketika peserta didik hampir putus asa, diperlukan ketelatenan, keuletan dan seni memotivasi agar timbul kembali kesadaran, dan bangkit kembali harapannya.

17. Guru sebagai evaluator

Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Untuk itu maka guru harus memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teknik penilaian yang tepat.

18. Guru sebagai pengawet

Salah satu tugas pendidikan adalah mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai pengawet terhadap apa yang telah dicapai manusia terdahulu, maka guru berusaha mengawetkan pengetahuan yang telah dimiliki dalam pribadinya dalam arti guru harus berusaha menguasai materi standar yang akan disajikan kepada peserta didik.

19. Guru sebagai kulminator

Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhiran (kulminasi). Dengan rancangannya peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Melalui rancangannya, guru mengembangkan tujuan yang akan dicapai dan akan dimunculkan dalam tahap kulminasi. Guru mengembangkan rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan fisik dan kemampuan intelektual yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui kurikulum.

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas maka dapatlah dipahami bahwa peran dan fungsi guru sangatlah strategis dalam menyukseskan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Peran strategis tersebut tidak dapat tergantikan oleh siapa pun, memang melalui penggunaan teknologi, penyampaian materi pelajaran terhadap peserta didik dapat dilakukan, tetapi hanya sekedar itu, peran-peran lainnya dari seorang guru tidak dapat tergantikan terutama dalam pembentukan nilai-nilai moral, religiusitas dan kemandirian.

C. Guru Efektif

Untuk memberhasikan pembelajaran di kelas maka kehadiran figur guru yang benar-benar efektif dalam melaksanakannya. Menurut Moedjiarto (2002: 69) keefektifan guru merupakan salah satu karakteristik yang berpengaruh pada prestasi akademik siswa di sekolah, artinya semakin efektif seorang guru melakukan tugas dan kegiatannya maka akan semakin tinggi prestasi akademi siswa yang diperolehnya, sebaliknya semakin tidak efektif guru menjalankan tugasnya maka semakin rendah prestasi akademik siswa di sekolah tersebut.

Menurut Marno (2008: 31) guru efektif adalah yang dapat menunaikan tugas dan fungsinya secara profesional. Untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional diperlukan berbagai persyaratan seperti kompetensi akademik, kompetensi metodologis, kematangan pribadi, sikap penuh dedikasi, kesejahteraan yang memadai, pengembangan karir, budaya kerja, dan suasana kerja yang kondusif.

Menurut Rosyada (2004: 112) bahwa secara umum guru harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*. *Capability*

yaitu guru harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi. Loyalitas keguruan yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan tidak semata di dalam kelas, tetapi sebelum dan sesudah di luar kelas.

Hal yang menarik mengkaji urgensi guru efektif karena saat ini terjadi perubahan kecenderungan peranan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini Goble sebagaimana dikutip Mudlofir (2014: 31) mengidentifikasi beberapa kecenderungan perubahan peranan guru sebagai berikut.

1. Kecenderungan ke arah diversifikasi fungsi-fungsi proses pembelajaran dan peningkatan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengorganisasian isi dari proses pembelajaran.
2. Kecenderungan ke arah bergesernya titik berat dari pengajaran yang merupakan pengalihan/transformasi pengetahuan oleh guru kepada proses belajar oleh siswa, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan sumber-sumber belajar yang inovatif di lingkungan masyarakat.
3. Kecenderungan ke arah individualisasi proses belajar dan berubahnya struktur hubungan antara guru dan siswa.
4. Kecenderungan ke arah penggunaan teknologi pendidikan modern dan penguasaan atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
5. Kecenderungan ke arah diterimanya bentuk kerja sama yang ruang lingkupnya lebih luas bersama guru-guru yang mengajar di sekolah lain, dan berubahnya struktur hubungan antara para guru sendiri.
6. Kecenderungan ke arah kebutuhan untuk membina kerja sama yang lebih erat dengan orang tua dan orang lain di dalam masyarakat serta meningkatkan keterlibatan di dalam kehidupan masyarakat.
7. Kecenderungan ke arah diterimanya partisipasi pelayan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.
8. Kecenderungan ke arah sikap yang menerima kenyataan bahwa otoritas tradisional dalam hubungannya dengan anak-anak telah berkurang terutama antara anak-anak yang lebih tua terhadap orang tuanya.

Gary dan Margaret dalam Mulyasa (2007: 21) memaparkan bahwa guru yang efektif dan kompetensi secara professional memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, berkaitan dengan:
 - a. Kemampuan interpersonal untuk menunjukkan empati dan penghargaan kepada peserta didik.
 - b. Hubungan baik dengan peserta didik.
 - c. Menerima dan memperhatikan peserta didik dengan tulus.
 - d. Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar.
 - e. Menciptakan iklim untuk tumbuhnya kerja sama.
 - f. Melibatkan peserta didik dalam mengorganisasikan dan merencanakan pembelajaran, mendengarkan dan menghargai hal peserta didik untuk berbicara dalam setiap diskusi.
 - g. Meminimalkan bahkan mengeleminasi setiap permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran.
2. Memiliki kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran, berkaitan dengan:
 - a. Kemampuan untuk menghadapi dan menangani peserta didik yang bermasalah, suka menyela, mengalihkan pembicaraan.
 - b. Mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam pembelajaran.
 - c. Kemampuan bertanya yang memerlukan tingkat berpikir yang berbeda untuk semua peserta didik.
3. Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*), berkaitan dengan:
 - a. Memberikan umpan balik yang positif terhadap respons peserta didik.
 - b. Memberikan respons yang sifatnya membantu terhadap peserta didik yang lambat belajar.
 - c. Memberikan tindak lanjut terhadap jawaban peserta didik yang kurang memuaskan.
 - d. Kemampuan memberikan bantuan professional kepada peserta didik jika diperlukan.

4. Memiliki kemampuan-kemampuan untuk peningkatan diri, berkaitan dengan:
 - a. Menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif.
 - b. Memperluas dan menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran.
 - c. Memanfaatkan kelompok kerja guru (KKG) untuk menciptakan dan mengembangkan metode pembelajaran yang relevan.

Hunt (1999: 15016) memaparkan guru efektif atau guru yang baik itu harus memenuhi 7 (tujuh) kriteria sebagai berikut.

1. Sifat

Guru yang baik harus memiliki sifat-sifat antusias, stimulatif, mendorong siswa untuk maju, hangat, berorientasi pada tugas dan pekerja kerja, toleran, sopan dan bijaksana, bisa dipercaya, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri, demokratis, penuh harapan bagi siswa, tidak semata mencari reputasi pribadi, mampu mengatasi stereotype siswa, bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar siswa, mampu menyampaikan perasaannya, dan memiliki pendengaran yang baik.

2. Pengetahuan

Guru yang baik juga memiliki pengetahuan yang memadai dalam mata pelajaran yang diampunya, dan terus mengikuti kemajuan dalam bidang ilmunya itu melalui berbagai aktivitas misalnya dengan membaca jurnal-jurnal penelitian, membaca literatur, mengikuti pelatihan, workshop dan sebagainya.

3. Apa yang disampaikan

Guru yang baik juga mampu memberikan jaminan bahwa materi yang disampaikannya mencakup semua unit bahasan yang diharapkan siswa secara maksimal.

4. Bagaimana mengajar

Guru yang baik mampu menjelaskan berbagai informasi secara jelas, dan terang, memberikan layanan yang variatif, menciptakan dan memelihara momentum, menggunakan kelompok kecil secara efektif, mendorong semua siswa untuk berpartisipasi, memonitor dan bahkan sering mendatangi siswa, mampu mengambil berbagai keuntungan dari kejadian-kejadian yang

tidak diharapkan, memonitor tempat duduk siswa, senantiasa melakukan formatif tes dan post test, melibatkan siswa dalam tutorial atau pembelajaran sebaya, menggunakan kelompok besar untuk pengajaran, menghindari kesukaran yang kompleks dengan menyederhanakan sajian informasi, menggunakan beberapa bahan tradisional, menunjukkan kepada siswa tentang pentingnya bahan-bahan yang mereka pelajari, menunjukkan proses berpikir yang penting untuk belajar, berpartisipasi dan mampu memberikan perbaikan terhadap kesalahan konsepsi yang dilakukan siswa.

5. Harapan

Guru yang baik mampu memberikan harapan-harapan pada siswa, mampu membuat siswa akuntabel dan mendorong partisipasi orang tua dalam memajukan kemampuan akademik siswanya.

6. Reaksi guru terhadap siswa

Guru yang baik biasa menerima berbagai masukan, risiko dan tantangan, selalu memberikan dukungan pada siswanya, konsisten dalam kesepakatan-kesepakatan dengan siswa, bijaksana terhadap kritik siswa, menyesuaikan diri dengan kemajuan-kemajuan siswa, pembelajaran yang memperhatikan individu, mampu memberikan jaminan atas kesetaraan partisipasi siswa, mampu menyediakan waktu yang pantas untuk siswa bertanya, cepat dalam memberikan *feedback* bagi siswa dalam membantu mereka belajar, peduli dan sensitif terhadap perbedaan-perbedaan latar belakang sosial ekonomi dan kultur siswa, dan menyesuaikannya pada kebijakan-kebijakan menghadapi berbagai perbedaan.

7. Manajemen

Guru yang baik juga harus mampu menunjukkan keahlian dalam perencanaan, memiliki kemampuan mengorganisasi kelas sejak hari pertama bertugas, cepat memulai kelas, melewati masa transisi dengan baik, memiliki kemampuan dalam mengatasi dua atau lebih aktivitas kelas dalam satu waktu yang sama, mampu memelihara waktu bekerja serta menggunakan secara efisien dan konsisten dapat meminimalisasi gangguan, dapat menerima suasana kelas yang ribut dengan kegiatan pembelajaran, memiliki teknik untuk mengontrol kelas, memberi hukuman dengan bentuk yang paling ringan, dapat memelihara suasana tenang dalam belajar, dan tetap dapat menjaga siswa untuk tetap belajar menuju sukses.

Selanjutnya menurut Beidler (1997: 3-10) terdapat 10 (sepuluh) guru yang baik yaitu:

1. Guru yang baik harus benar-benar berkeinginan untuk menjadi guru yang baik. Guru yang baik harus mencoba, dan terus mencoba, dan biarkan siswa-siswa tahu bahwa dia sedang mencoba, dan bahkan dia juga sangat menghargai siswanya yang senantiasa melakukan percobaan-percobaan, walaupun mereka tidak pernah sukses dalam apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian, siswa akan menghargai, walaupun guru tidak sebaik yang diinginkan, namun guru akan terus membantu siswa yang ingin sukses.
2. Guru yang berani mengambil risiko, guru berani menyusun tujuan yang sangat fantastis, lalu berjuang untuk mencapainya. Jika apa yang mereka inginkan itu tidak terjangkau, namun mereka telah berusaha untuk melakukannya, dan mereka telah mengambil risiko untuk melakukannya, siswa-siswa yang biasanya suka dengan uji coba berisiko tersebut.
3. Guru yang baik memiliki sikap positif. Seorang guru tidak boleh sinis dengan pekerjaannya. Seorang guru tidak boleh berkata bahwa profesi keguruan adalah profesi orang miskin. Guru harus bangga dengan profesinya sebagai guru. Tidak baik bagi seorang guru untuk mempermasalahkan profesi keguruannya dengan mengaitkannya pada indeks gaji yang tidak memadai, karena dia masuk setelah dia tahu bahwa gajinya tidak memadai. Kalau tidak suka dengan indeks gaji seperti itu, ambil putusan segera, dan cari alternatif yang lebih baik. Tidak boleh profesi keguruan menjadi terhina oleh guru itu sendiri hanya karena sikap mereka pada siswanya. Tidak boleh sinis pada siswa karena keterlambatan mereka dalam menyerap pelajaran, dan jangan pula sinis pada siswa karena terjebak dalam sebuah kenakalan. Hadapi dan perbaiki mereka secara wajar, humanis, rasional dan proporsional.
4. Guru yang baik selalu tidak pernah punya waktu yang cukup. Guru yang baik selalu mempersiapkan kelas dengan sempurna, mengidentifikasi semua siswa dengan segala persoalannya, berkomunikasi dengan komite sekolah, banyak menggunakan waktu untuk dikantor menyelenggarakan administrasi pendidikan yang terkait dengan siswa-siswanya, memberikan waktu yang banyak untuk siswa berkonsultasi. Guru yang baik hampir tidak

punya waktu untuk bersantai, waktunya habis untuk memberikan pelayanan terbaik untuk siswa-siswanya. Pada jam-jam keluarga saat mereka punya waktu untuk istirahat, justru membuat berbagai persiapan untuk kelas esok hari, atau memeriksa hasil kelas hari ini.

5. Guru yang baik berpikir bahwa mengajar ada sebuah tugas menjadi orang tua siswa, yakni bahwa guru punya tanggung jawab terhadap siswa sama dengan tanggung jawab orang tua terhadap putra-putrinya sendiri dalam batas-batas kompetensi keguruan, yakni guru punya otoritas untuk mengarahkan siswanya sesuai basis kemampuannya. Guru harus memuka kesempatan bagi para siswanya untuk konsultasi tidak saja dalam soal pelajaran yang menjadi tugas pokoknya, tapi juga persoalan-persoalan lain yang terkait dengan proses pembelajaran.
6. Guru yang baik harus selalu mencoba membuat siswanya percaya diri, karena tidak semua siswa memiliki rasa percaya diri yang seimbang dengan prestasinya. Seorang siswa yang pintar, mampu membuat makalah, menguasai berbagai bahan ajar dengan baik, belum tentu memiliki kepercayaan diri yang sesuai dengan prestasinya untuk mengartikulasikan kemampuannya di depan orang banyak. Oleh sebab itu, guru harus mampu meyakinkan mereka bahwa mereka itu mampu, bahwa mereka itu *excellent*, bahwa mereka itu lebih baik dari lainnya.
7. Guru yang baik selalu membuat posisi tidak seimbang antara siswa dengan dirinya. Guru menciptakan jarak antara kemampuannya dengan kemampuan siswanya, sehingga mereka senantiasa sadar bahwa perjalanan menggapai kompetensinya masih panjang dan membuat mereka terus berusaha untuk menutupi berbagai kelemahannya dengan melakukan berbagai kegiatan dan menambah pengalaman keilmuannya.
8. Guru yang baik selalu mencoba memotivasi siswanya untuk hidup mandiri, lebih independent, khususnya untuk sekolah-sekolah menengah, mereka harus sudah mulai dimotivasi untuk mandiri dan *independent*.
9. Guru yang baik tidak percaya penuh terhadap evaluasi yang diberikan siswanya, karena evaluasi mereka terhadap gurunya tidak objektif, walaupun pernyataan-pernyataan mereka itu penting

sebagai informasi, namun tidak sepenuhnya harus dijadikan patokan untuk mengukur kinerja keguruannya.

10. Guru yang baik senantiasa mendengarkan terhadap pernyataan-pernyataan siswanya, yakni guru itu harus aspiratif mendengarkan dengan bijak permintaan-permintaan siswa-siswanya, kritik-kritik siswanya, serta berbagai saran yang mereka sampaikan.

Menurut Slameto (1995: 95-96) guru efektif dalam melaksanakan tugasnya selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Penguasaan bahan pelajaran

Guru harus menguasai bahan pelajaran sebaik mungkin, sehingga dapat membuat perencanaan pelajaran dengan baik, memikirkan variasi metode, cara memecahkan persoalan dan membatasi bahan, membimbing siswa ke arah tujuan yang diharapkan tanpa kehilangan kepercayaan terhadap dirinya.

2. Cinta kepada yang diajarkan

Guru yang mencintai pelajaran yang diberikan, akan berusaha mengajar dengan efektif, agar pelajaran itu dapat menjadi milik siswa sehingga berguna bagi hidupnya kelak. Guru yang cinta pada pekerjaannya, akan menyadari bahwa mengajar adalah profesinya, sehingga pantang mundur walaupun banyak mengalami kesulitan dalam tugasnya. Bahkan guru tersebut berusaha mengatasi dengan ketekunan, kesabaran dan ketelatenan.

3. Pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa

Pengetahuan yang dibawa siswa dari lingkungan keluarganya dapat memberi sumbangan yang besar bagi guru untuk mengajar. Latar belakang budaya, sikap dan kebiasaan, minat perhatian dan kesenangan berperan pula terhadap pelajaran yang akan diberikan. Guru perlu meneliti hal-hal tersebut termasuk juga kemampuan dan prestasi siswa dengan cara-cara apa saja yang dapat mengungkap masalah itu.

4. Variasi metode

Guru yang mengajar apabila hanya menggunakan salah satu metode maka akan membosankan, siswa tidak tertarik perhatiannya pada pelajaran. Dengan variasi metode dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa.

5. Seorang guru harus menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menguasai dan mendalami semua bahan pelajaran. Untuk itu seorang guru harus selalu menambah ilmunya dan mengadakan diskusi ilmiah dengan teman seprofesi, agar dapat meningkatkan kemampuan mengajarnya.
6. Bila perlu guru harus selalu memberikan pengetahuan yang aktual dan dipersiapkan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang aktual akan menarik minat siswa, karena mereka saat itu sedang mengalami peristiwa itu juga, sehingga pelajaran guru akan menimbulkan rangsangan yang efektif bagi belajar siswa.
7. Guru harus berani memberikan pujian. Pujian yang diberikan dengan tepat maka dapat mengakibatkan siswa mempunyai sikap yang positif daripada guru selalu mengkritik dan mencela. Pujian dapat menjadi motivasi belajar siswa dengan positif.
8. Seorang guru harus mampu menimbulkan semangat belajar secara individual. Masing-masing siswa mempunyai perbedaan dalam pengalaman, kemampuan dan sifat-sifat pribadi yang lain, sehingga dapat memberikan kebebasan dan kebiasaan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan penuh inisiatif dan kreatif dalam pekerjaannya.

Danim (2012: 22-23) mengutip pendapat Ryans memaparkan guru efektif adalah guru yang memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Bersikap adil dan tidak pilih kasih terhadap siswa.
2. Berempati dan berbaik hati kepada komunitas sekolah dan masyarakat.
3. Bertanggung jawab dan suka menolong individu yang lain.
4. Tenang dan stabil emosinya.
5. Akrab, bersahaja, dan memiliki rasa humor.
6. Berkepribadian dinamis yaitu menarik, tangkas dan kerap kali menghidupkan suasana yang menyenangkan.
7. Mempunyai kecerdasan tinggi yang memungkinkannya memahami serta mengajarkan materi pembelajaran dari sudut pandang yang luas.
8. Mempunyai imajinasi tinggi yang memungkinkan memberikan pelbagai jenis contoh yang dapat membantu siswanya memahami konsep dengan mudah dan cepat.

9. Berbahasa lugas dan bertingkah laku beradab.
10. Memiliki kesabatan ketika membimbing siswa, termasuk siswa yang nakal.
11. Bersikap terbuka, jujur dan ikhlas kepada siswanya dan sesama sejawat.
12. Bersikap terbuka, jujur, dan ikhlas kepada siswanya dan sesama sejawat.
13. Bersikap tegas dan menegakkan disiplin sekolah dan tugas-tugas pembelajaran.
14. Mengutamakan ketepatan dan keakuratan layanan kepada siswa.
15. Berdedikasi dan rajin dalam melaksanakan tugas utama dan penunjang.
16. Memberikan ganjaran dan pujian secara adil kepada siswa.

Karakteristik guru efektif sebagaimana tercantum dalam situs <http://news.uns.ac.id> sebagai berikut.

1. Memiliki kadar pengetahuan yang istimewa pada mata pelajaran spesialisasinya
Guru yang pengetahuannya istimewa menghasilkan siswa yang nilainya lebih bagus dalam tes standar. Guru yang menguasai wilayah mata pelajarannya, lebih siap menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan konsep secara baik. Guru tampil tidak gugup dan penjelasannya tidak membingungkan peserta didik.
2. Berpengalaman mengajar
Guru yang berpengalaman cenderung tahu lebih baik apa aktivitas dan praktik mengajar yang harus dipakai saat mengajarkan konsep-konsep tertentu. Guru juga lebih mampu mengindividualisasi pelajaran agar tepat dengan kebutuhan setiap siswa.
3. Ucapannya jelas
Guru dengan kemampuan verbal tinggi dan mempunyai kosa kata luas cenderung menghasilkan siswa yang dapat mengerjakan tes standar lebih baik.
4. Antusias
Guru yang menunjukkan antusiasme saat mengajar, maka akan memotivasi siswa untuk belajar. Antusiasme dapat ditandai dengan

penyampaian vokal secara cepat dan bersemangat, dengan gerak tangan, kontak mata yang bervariasi, dan tingkat energi tinggi. Antusiasme guru juga diikuti dengan meningkatnya penyimpanan memori di kalangan siswa.

5. Peduli

Guru mampu menunjukkan kepedulian yang tulus. Guru benar-benar memperhatikan kesehatan dan kehidupan pribadi siswa. Guru bersikap ramah dan mau mendengarkan masalah siswa maupun orang tuanya. Guru mampu menciptakan suasana kelas terbangun menjadi hangat dan siswa berani ikut terlibat mengambil keputusan. Guru peduli untuk menghadiri kegiatan ekstrakurikuler siswa, melihat kegiatan seni dan pertandingan yang dilakukan siswa.

6. Ceria dan santai

Kepribadiannya sangat baik karena menikmati kegembiraan dan pekerjaannya sebagai pengajar. Guru berpartisipasi dalam kegiatan siswa, mempunyai rasa humor yang baik dan sering tertawa bersama siswa.

7. Siap bekerja sama dengan guru lain maupun orang tua siswa. Untuk itu komunikasi menjadi bagian penting dari aspek ini.

8. Berniat memperbaiki kecakapan mengajarnya dan memajukan pendidikannya. Konsep belajar sepanjang hayat, belajar tanpa henti dan konsep mengajar sambil belajar.

9. Menempelkan aturan pada dinding kelas.

10. Menempelkan karya semua siswa di dinding kelas.

11. Menjaga waktu transisi antarkegiatan sedikit mungkin.

12. Masuk kelas dengan keadaan siap. Siap dengan berbagai aspek yaitu siap dalam penguasaan materi ajar, siap dengan penguasaan metode dan media dalam menyampaikan pembelajaran.

13. Dorongan positif. Dalam hal ini guru hendaknya menjadi pemotivator yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar maupun aktivitas lainnya yang bermanfaat.

14. Memonitor dan menangani gangguan kecil di kelas.

15. Suka berkeliling terutama ketika peserta didik dalam aktivitas diskusi kelompok atau mengerjakan tugas lainnya.

16. Mendisiplinkan siswa secara adil dan wajar. Penegakan disiplin yang dilakukan dengan persuasif dan tidak menakutkan bagi peserta didik, sehingga disiplin itu tumbuh dari dalam diri peserta didik bukan sesuatu yang dipaksakan.
17. Menyampaikan harapan akademik yang tinggi.
18. Menunjukkan suatu tingkat perencanaan dan organisasi yang tinggi, terutama dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan menilai capaian hasil belajar.
19. Mengajar berdasarkan teori dan praktik pendidikan yang kuat, dalam arti kata dukungan teori belajar dan teori pembelajaran yang dikuasai oleh guru.



BAB 2

PROFESI DAN PROFESIONALISME GURU

A. Pengertian

Kata profesi dalam bahasa Inggris adalah “*profession*”, dalam bahasa Belanda “*professie*” yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin “*professio*” yang bermakna pengakuan atau pernyataan. Kata profesi juga terkait secara generik dengan kata “*okupasi*” (Indonesia), *accupation* (Inggris), *accupatio* (Latin) yang bermakna kesibukan atau kegiatan atau pekerjaan atau mata pencaharian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Menurut Tilaar (2002: 86) profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Hal senada dipaparkan Nata (2003: 138) bahwa profesi adalah pernyataan atau pengakuan tentang bidang pekerjaan atau bidang pengabdian yang dipilih.

Vollmer dan Mills sebagaimana dikutip Danim (2010: 56) menyatakan profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan

intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis kepada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.

Menurut Mudlofir (2014: 17) profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya, artinya, profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi yang dilakukan sebelum seorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani suatu profesi.

Danim (2012: 102) menyatakan profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksudkan adalah ada persyaratan pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa profesi sebagai terminologi memiliki banyak makna, hanya saja jika disederhanakan profesi itu dapat dimaknai sebagai pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya, sedangkan profesional berkaitan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Nasution dan Siahaan, 2009: 46).

Dari kata profesi maka terdapat bentukan kata lainnya, seperti profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Menurut McLeod dalam Syah (2010: 229) profesional adalah kata sifat dari kata profesi yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan sedangkan profesional sebagai kata benda, profesional adalah orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profisiensi sebagai mata pencaharian. Menurut Mudlofir (2014: 17) profesional menunjukkan pada dua hal yaitu: (1) orang yang menyandang suatu profesi, dan (2) penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya.

Profesional adalah jenis pekerjaan khas yang memerlukan pengetahuan, keahlian atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang lain, instansi atau lembaga

(Yamin dan Maisah, 2010: 30). Di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kata lain terkait dengan kata profesi adalah “profesionalisme”. Menurut Arifin (1991: 105) profesionalisme berarti pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Selanjutnya Tilaar (2002: 86) memaparkan profesionalisme bermakna bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya.

Profesionalisme menurut Nata (2003: 140) adalah pandangan tentang bidang pekerjaan yaitu pandangan yang menganggap bidang pekerjaan sebagai suatu pengabdian melalui keahlian tertentu dan yang menganggap keahlian itu sebagai suatu yang harus diperbaharui secara terus-menerus dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan.

Profesionalisme menurut Saud (2010: 7) menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Sedangkan menurut Tafsir (1992: 107) profesionalisme sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional.

Menurut Mudlofir (2014: 17) profesionalisme menunjukkan kepada komitmen/teori/paham para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

Selanjutnya kata “profesionalitas” yaitu merujuk pada suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya (Mudlofir, 2014: 5). Menurut Saud

(2010: 7) profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.

Kata berikutnya “profesionalisasi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional. Yamin dan Maisah (2010: 30) menjelaskan profesionalisasi adalah proses yang mengakibatkan pekerjaan bergerak pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih mudah. Menurut Danim (2012: 105) profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu.

Profesionalisasi menurut menurut (2014: 18) menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai suatu anggota suatu profesi. Proses profesionalisasi merupakan proses yang *life-long* dan *never-ending*. Menurut Nugroho Notosusanto, profesionalisasi merupakan upaya secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan profesi (Suwardi, 2008: 21).

Tilaar (2002: 86) memaknai profesionalisasi adalah menjadikan atau mengembangkan suatu bidang pekerjaan atau jabatan secara professional. Hal ini berarti pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria profesi yang terus-menerus berkembang sehingga tingkat keahlian, tingkat tanggung jawab (etika profesi) serta perlindungan terhadap profesi terus-menerus disempurnakan.

Menurut Saud (2010: 7) profesionalisasi menunjuk kepada profesi peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional (*professional development*) baik dilakukan melalui pendidikan/latihan prajabatan maupun dalam jabatan. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses secepat seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah ditarik benang merah dari penjelasan pakar, bahwa profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keadilan, tanggung jawab,

dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu. Profesional menunjuk pada dua hal yaitu penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya, dan menunjuk pada individunya. Profesionalisme mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Profesionalitas menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Profesionalisasi menunjuk pada proses menjadikan individu sebagai seorang profesional melalui pendidikan prajabatan dan/atau dalam jabatan.

B. Ciri-Ciri Profesi Keguruan

Sebelum dipaparkan secara khusus terkait dengan ciri-ciri profesi keguruan, maka terlebih dahulu disajikan paparan mengenai ciri-ciri profesi secara umum dari beberapa ahli yang penulis kutip.

Flexner sebagaimana dikutip Prayitno (2009: 466) memaparkan ciri-ciri profesi dalam 6 (enam) karakteristik sebagai berikut.

1. Keintelektualan

Kegiatan professional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi mental daripada manusia (kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik), lebih memerlukan proses intelektual atau berpikir daripada kegiatan rutin. Melalui proses berpikir tersebut, pelayanan professional merupakan hasil pertimbangan yang matang, berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Kompetensi professional yang dipelajari

Pelayan professional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperoleh begitu saja, melainkan kompetensi tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran secara intensif.

3. Objek praktik spesifik

Pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktik spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Tiap-tiap profesi menangani objek praktik spesifiknya sendiri.

4. Komunikasi

Sege nap aspek pelayanan professional meliputi objek praktik spesifik profesinya, keilmuan dan teknologinya, kompetensi dari dinamika operasionalnya, aspek hukum dan sosialnya, termasuk kode etik dan aturan kredensialisasi, serta imbalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanannya, semua dapat dikomunikasikan kepada siapa pun yang berkepentingan, kecuali satu hal, yaitu materi berkenaan dengan asas kerahasiaan yang menurut kode etik profesi harus dijaga kerahasiaannya itu. Komunikasi ini memungkinkan dipelajari dan dikembangkannya profesi tersebut, dipraktikkan dan diawasi sesuai dengan kode etik serta diselenggarakannya perlindungan terhadap profesi yang dimaksud.

5. Motivasi altruistik

Motivasi kerja seorang professional bukanlah berorientasi kepada kepentingan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan, keberhasilan dan kebahagiaan sasaran pelayanan, serta kemaslahatan kehidupan masyarakat pada umumnya. Motivasi altruistik diwujudkan melalui peningkatan keintelektualan, kompetensi dan komunikasi dalam menangani objek praktik spesifik profesi. Motivasi altruistik akan menjauhkan tenaga professional mengutamakan pamrih atau keuntungan pribadi dan sebaliknya mengutamakan kepentingan sasaran layanan. Bahkan jika diperlukan, tenaga professional tidak segan-segan mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan/kebutuhan sasaran layanan yang benar-benar mendesak.

6. Organisasi profesi

Tenaga professional dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas professional. Organisasi profesi itu di samping membesarkan profesi itu sendiri juga sangat berkepentingan untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dan membahagiakan warga negara dan masyarakat luas.

Ornstein dan Levine sebagaimana dikutip Soetjipto dan Rafli s (1994: 15) memaparkan ciri-ciri profesi sebagai berikut.

1. Melayani masyarakat, merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan).

2. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai.
3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik. Teori baru dikembangkan dari hasil penelitian.
4. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang relatif panjang.
5. Terkendali berdasarkan lisensi baku dan/atau mempunyai persyaratan masuk (untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya).
6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kajian tertentu (tidak diatur oleh orang luar).
7. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan (langsung bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan, tidak dipindahkan ke atasan atau instansi yang lebih tinggi). Mempunyai sekumpulan unjuk kerja yang baku.
8. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan.
9. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya, relatif bebas dari supervisi dalam jabatan.
10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
11. Mempunyai asosiasi profesi dan/atau kelompok elit untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya.
12. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
13. Mempunyai kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya.
14. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi bila dibandingkan dengan jabatan lain.

Pidarta (1997: 267) memaparkan bahwa profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Pilihan terhadap jabatan didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang yang bersangkutan.

2. Telah memiliki ilmu, pengetahuan dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang.
3. Ilmu, pengetahuan, dan keterampilan khusus tersebut di peroleh melalui studi dalam jangka waktu lama di perguruan tinggi.
4. Mempunyai otonomi dalam bertindak ketika melayani klien.
5. Mengabdikan kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial.
6. Tidak mengadvertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien.
7. Menjadi anggota organisasi profesi.
8. Organisasi profesi tersebut menentukan persyaratan penerimaan para anggota, membina profesi anggota, mengawasi perilaku anggota, memberi sanksi dan memperjuangkan kesejahteraan anggota.
9. Memiliki kode etik profesi.
10. Mempunyai kekuatan dan status yang tinggi sebagai *expert* yang diakui oleh masyarakat.
11. Berhak mendapat imbalan yang layak.

Lutfi sebagaimana dikutip Nurdin dan Usman (2002: 16-17) menjelaskan ciri profesi sebagai berikut.

1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu
Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu lama, bahkan seumur hidup.
2. Pengetahuan dan kecakapan/keahlian
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan/keahlian yang khusus dipelajari.
3. Kebakuan yang universal
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum (universal) sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan.
4. Pengabdian
Profesi adalah pekerjaan terutama sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material/finansial bagi diri sendiri.

5. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif
Profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.
6. Otonomi
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapanannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekan seprofesinya.
7. Kode etik
Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat.
8. Klien
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subjeknya.

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) menjelaskan ciri-ciri utama profesi adalah:

1. Memiliki fungsi dan signifikansi sosial.
2. Memiliki keahlian dan keterampilan tingkat tertentu.
3. Memperoleh keahlian dan keterampilan melalui metode ilmiah.
4. Memiliki batang tubuh disiplin ilmu tertentu.
5. Studi dalam waktu lama di perguruan tinggi.
6. Pendidikan ini juga merupakan wahana sosialisasi nilai-nilai profesional di kalangan mahasiswa yang mengikutinya.
7. Berpegang teguh kepada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi dengan sanksi-sanksi tertentu.
8. Bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah bertalian dengan pekerjaannya.
9. Memberi layanan sebaik-baiknya kepada klien dan otonom dari campur tangan pihak luar.
10. Mempunyai prestise yang tinggi di masyarakat dan berhak mendapat imbalan yang layak (Pidarta, 1997: 266).

Nasution dan Siahaan (2009: 47) memaparkan ciri suatu profesi antara lain sebagai berikut.

1. Ada standar untuk kerja yang baku dan bagus.
2. Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan yang bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu.
3. Ada organisasi mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya.
4. Ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku para pelakunya dalam memperlakukan kliennya.
5. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku.
6. Ada pengakuan masyarakat (professional, penguasa dan awam) terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi.

Di samping ciri-ciri di atas, Nasution dan Siahaan (2009: 47) selanjutnya memaparkan ciri profesi sebagai berikut.

1. Profesi itu diakui oleh masyarakat dan pemerintah dengan adanya bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.
2. Memiliki sekumpulan ilmu yang menjadi landasan sejumlah teknik serta prosedur kerja profesi tersebut.
3. Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang melaksanakan pekerjaan professional. Dengan perkataan lain, masyarakat professional mempersyaratkan pendidikan prajabatan yang sistematis yang berlangsung relatif lama.
4. Adanya mekanisme untuk melakukan penyaringan secara efektif, sehingga hanya mereka yang dianggap kompeten yang dibolehkan bekerja memberikan layanan ahli yang dimaksud.
5. Diperlukan organisasi profesi di samping untuk melindungi kepentingan anggotanya dari saingan yang datang dari luar kelompok, juga berfungsi untuk meyakinkan supaya anggotanya menyelenggarakan layanan ahli terbaik yang bisa diberikan demi kemaslahatan para pemakai layanan.

More dalam Syafaruddin (2005: 102) memaparkan ciri profesi sebagai berikut.

1. Seorang profesional menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya.
2. Terikat oleh suatu panggilan hidup dan memperlakukan pekerjaan atau kepatuhan kepada norma-norma yang mengikat.
3. Menjadi anggota organisasi profesional yang formal.
4. Menguasai pengetahuan dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan khusus.
5. Terikat oleh syarat-syarat kompetensi, kesadaran prestasi dan pengabdian.
6. Memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi sekali.

Volmer dan Mills sebagaimana dikutip Sardiman (2003: 134) menjelaskan pekerjaan dapat dikatakan sebagai suatu profesi apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut.

1. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas yaitu memiliki pengetahuan umum dan keahlian yang mendalam.
2. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris, mencakup: adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesional, memiliki otonomi jabatan, memiliki kode etik jabatan dan merupakan karya bakti seumur hidup.
3. Di akui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional yaitu: memperoleh dukungan masyarakat, mendapat pengesahan dan perlindungan hukum, memiliki persyaratan kerja yang sehat dan memiliki hidup yang layak.

Hal senada dijelaskan Westby dan Gibson dalam Sardiman (2003: 134-135) bahwa ciri-ciri profesi yaitu:

1. Diakui oleh masyarakat dan layanan yang diiberikan itu hanya dikerjakan oleh pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.
2. Dimilikinya sekumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik.
3. Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum dapat melaksanakan pekerjaan profesional.

4. Dimiliki mekanisme untuk menjangkau sehingga orang yang berkompoten saja yang diperbolehkan bekerja.
5. Dimilikinya organisasi profesional untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Menurut Tilaar (2000: 137) ciri-ciri dari suatu profesi sebagai berikut.

1. Memiliki suatu keahlian khusus.
2. Merupakan suatu panggilan hidup.
3. Memiliki teori-teori yang baku secara universal.
4. Mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan diri sendiri.
5. Dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif.
6. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya.
7. Mempunyai kode etik.
8. Mempunyai klien yang jelas.
9. Mempunyai organisasi profesi yang kuat.
10. Mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang lain.

Selanjutnya ciri-ciri profesi yang disampaikan Schien dalam Pidarta (1997: 265) sebagai berikut.

1. Bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja.
2. Pilihan pekerjaan itu didasarkan kepada motivasi yang kuat.
3. Memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama.
4. Membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien.
5. Pekerjaan berorientasi kepada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi.
6. Pelayanan itu didasarkan kepada kebutuhan objektif klien.
7. Memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien.
8. Menjadi anggota organisasi profesi, sesudah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu.

9. Memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai *expert* dalam spesialisasinya.
10. Keahlian itu tidak boleh diadvertensikan untuk mencari klien.

Lieberman sebagaimana dikutip Mudlofir (2014: 10-13) menyatakan jika dicermati karakteristik seluruh profesi secara seksama maka ditemukan hal-hal sebagai berikut.

1. *A unique, definite and essential service*

Profesi itu merupakan suatu jenis pelayan atau pekerjaan yang unik (khas) dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apa pun dari yang lainnya. Di samping itu profesi juga bersifat definitif dalam arti jelas batas-batas kawasan cakupan bidang garapannya (meskipun mungkin sampai batas dan derajat tertentu ada kontingensinya dengan bidang lainnya).

Selanjutnya profesi juga merupakan suatu pekerjaan atau pelayanan yang amat penting dalam arti hal itu amat dibutuhkan oleh pihak penerima jasanya sementara pihaknya sendiri tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melakukannya sendiri.

2. *An emphasis upon intellectual technique in performing its service*

Pelayanan itu amat menuntut kemampuan kinerja intelektual, yang berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan manual semata-mata. Benar pelayanan profesi juga terkadang mempergunakan peralatan manual dalam praktik pelayanannya, namun proses penggunaannya dibimbing oleh suatu teori dan wawasan intelektual.

3. *A long period of specialized training*

Untuk memperoleh penguasaan dan kemampuan intelektual (wawasan atau visi dan kemampuan atau kompetensi serta kemahiran atau *skill*) serta sikap profesional tersebut di atas, seseorang akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kualifikasi keprofesian sempurna lazimnya tidak kurang dari 5 tahun lamanya, ditambah dengan pengalaman praktik terbimbing hingga tercapainya suatu tingkat kemandirian secara penuh dalam menjalankan profesinya.

Pendidikan keprofesian termaksud lazimnya diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi, dengan proses pemagangannya sampai batas waktu tertentu dalam bimbingan para seniornya.

4. *A broad range of autonomy for both the individual practitioners and the occupational group as a whole*

Kinerja pelayanan itu demikian cermat secara teknis sehingga kelompok (asosiasi) profesi yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya dipandang mampu untuk melakukannya sendiri tugas pelayanan tersebut, apa yang seyogianya dilakukan dan bagaimana menjalankannya, siapa yang seyogianya memberikan izin dan lisensi untuk melaksanakan kinerja itu. Individu-individu dalam kerangka kelompok asiasinya pada dasarnya relatif bebas dari pengawasan, dan secara langsung mereka menangani praktiknya.

Dalam hal menjumpai sesuatu kasus yang berada di luar kemampuannya, mereka membuat rujukan (*referral*) kepada orang lain dipandang lebih berwenang atau membawanya ke dalam suatu panel atau konferensi kasus (*case conference*).

5. *An acceptance by the practitioners of broad personal responsibility for judgement made and acts performed within the scope of professional autonomy*

Konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepada seorang tenaga praktisi profesional itu, maka berarti pula ia memikul tanggung jawab pribadinya harus secara penuh. Apa pun yang terjadi maka kesemuanya itu harus dipertanggungjawabkan serta tidak selayaknya menudingkan atau melemparkan kekeliruannya kepada pihak lain.

6. *An emphasis upon the service to be rendered, rather than the economic gain to the practitioners, as the basis for the organization and performance of the social service delegated to the occupational group*

Mengingat pelayanan profesional itu merupakan hal yang amat esensial (dipandang dari pihak masyarakat yang memerlukannya) maka hendaknya kinerja pelayanan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pelayanan pemenuhan kebutuhan tersebut, ketimbang untuk kepentingan perolehan imbalan ekonomis yang akan diterimanya.

Hal itu bukan berarti pelayanan profesional tidak boleh memperoleh imbalan yang selayaknya. Bahkan seandainya kondisi dan situasi menuntut atau memanggilnya, seorang profesional itu hendaknya bersedia memberikan pelayanan tanpa imbalan sekalipun.

7. *A comprehensive self governing organization of practitioners*

Mengingat pelayanan itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat menyadari bahwa pelayanan semacam itu hanya mungkin dilakukan penanganannya oleh mereka yang kompeten saja. Karena masyarakat awam di luar yang kompeten yang bersangkutan, maka kelompok (asosiasi) para praktisi itu sendiri satu-satunya, institusi yang seyogianya menjalankan peranan yang ekstra, dalam arti menjadi polisi atau dirinya sendiri ialah mengadakan pengendalian atas anggotanya mulai saat penerimaannya dan memberikan sanksinya bilamana diperlukan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kode etikanya.

8. *A code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous and doubtful points by concrete cases.*

Otonomi yang dinikmati dan dimiliki oleh organisasi profesi dengan para anggotanya seyogianya disertai kesadaran dan maksud yang tulus baik pada organisasi maupun individual anggotanya untuk memonitor perilakunya sendiri. Mengingat organisasi dan sekaligus juga anggotanya harus menjadi polisi atas dirinya sendiri maka hendaknya mereka bertindak sesuai dengan kewajiban dan tuntutan moralnya baik terhadap klien maupun masyarakatnya. Atas dasar itu, adanya suatu perangkat kode etik yang telah disepakati bersama oleh yang bersangkutan seyogianya membimbing hati nuraninya dan mempedomani segala tingkah lakunya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa benang merah ciri profesi yang dikemukakan oleh para ahli adalah: profesi merupakan panggilan hidup dan adanya keahlian. Ciri panggilan hidup mengacu kepada mutu pelayanan atau mutu dedikasi sedangkan ciri keahlian menentukan keunggulan pengabdian atau layanan tersebut.

Selanjutnya terkait dengan ciri-ciri profesi keguruan dijelaskan Ward sebagaimana dikutip Yamin dan Maisah (2010:31) ciri sebagai berikut:

1. Seorang peneliti dan pengambil risiko (*risk-taker*).
2. Banyak mengetahui yang *up-to date* tentang pokok materi yang diajarkan.

3. Dapat menjelaskan pelajaran dengan berbagai cara untuk meyakinkan siswa.
4. Menjelaskan kepada peserta didik tentang standar hasil yang tinggi, kemudian mendorong mereka untuk bekerja keras dan membantu mencapainya.
5. Berpartisipasi dalam penelitian atau usaha pembelajaran untuk mengembangkan kurikulum di luar apa yang diajarkan.

National Education Association (NEA) sebagaimana dikutip Saud (2010: 16) bahwa ciri-ciri profesi guru tersebut adalah:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
Profesi guru dalam aktivitas mengajarnya melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual mulai dari proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan sampai pada penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Jabatan yang menggeluti suatu bidang tubuh ilmu yang khusus
Semua profesi mempunyai monopoli pengetahuan yang membedakan anggota profesinya dengan masyarakat awam. Anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu keprofesiannya dan membangun keahlian mereka serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dari segelintir oknum yang mencari keuntungan. Demikian juga dengan profesi guru, guru menggeluti bidang ilmu pendidikan dan kependidikan yang diterapkan dalam membelajarkan anak didik.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama
Untuk kasus di Indonesia, individu yang ingin memilih profesi guru sejak awal telah mengalami proses pendidikan keguruan di Lembaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sekurang-kurangnya 4 tahun.
4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan
Profesi guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan angka kredit maupun tanpa angka kredit.

5. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen

Fakta di lapangan, menunjukkan kebanyakan guru tetap bertahan pada profesi ini, tidak banyak guru yang pindah ke profesi lain atau bidang lain, walaupun bukan berarti pula jabatan guru mempunyai pendapatan yang tinggi. Seseorang yang pada awalnya telah memilih profesi guru ini tetap berkarir dalam profesi guru sampai akhir hayatnya.

6. Jabatan yang menentukan standar sendiri

Profesi guru memiliki otonomi dengan standar tertentu di dalam melaksanakan tugasnya, namun alam menjalankan aktivitas profesionalnya tersebut membolehkan orang tua, kepala sekolah, pejabat kantor wilayah atau anggota masyarakat lainnya untuk menyatakan apa yang seharusnya dilakukan guru.

Otonomi profesional tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali kontrol terhadap profesional, sebaliknya, ini berarti bahwa kontrol yang memerlukan kompetensi teknis hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan profesional dalam hal tersebut.

7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi

Profesi guru telah dikenal secara universal sebagai suatu profesi yang anggotanya termotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain, bukan disebabkan oleh adanya motif keuntungan ekonomi atau keuangan semata. Motivasi guru yang utama adalah mencerdaskan anak didik dan guru mendapatkan kepuasan rohani dari aktivitas tersebut. Namun demikian bukan pula berarti bahwa guru itu dibayar lebih rendah atau mendudukkan guru pada posisi yang tidak pada tempatnya. Guru adalah profesi yang mulia, tapi guru bukanlah malaikat yang tidak membutuhkan kebutuhan jasmani.

8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Suatu profesi mempunyai organisasi profesinya, demikian juga halnya dengan guru, khususnya di Indonesia, organisasi profesi guru adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI

merupakan wadah berkumpulnya guru-guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru pada tingkat sekolah menengah.

Danim (2012: 106-108) memaparkan karakteristik profesi guru yang secara taat asas dimiliki dan dijunjung oleh guru, sebagai berikut.

1. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan
Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan tinggi, termasuk dalam kerangka ini, pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki penyandang profesi.
2. Memiliki pengetahuan spesialisasi
Pengetahuan spesialisasi adalah sebuah kekhususan penguasaan bidang keilmuan tertentu, dalam hal ini guru memiliki spesialisasi bidang studi dan penguasaan metodologi pembelajaran.
3. Menjadi anggota organisasi profesi
Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota, pemahaman terhadap norma-norma organisasi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh organisasi profesi tempatnya bernaung.
4. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien
Pengetahuan khusus ini bersifat aplikatif, di mana aplikasi didasari atas kerangka teori yang jelas dan teruji.
5. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau *communicable*
Guru mampu berkomunikasi sebagai guru dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh siswanya.
6. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau *self-organization*
Istilah mandiri berarti kewenangan akademiknya melekat pada dirinya. Pekerjaan yang guru lakukan dapat dikelola sendiri, tanpa bantuan orang lain, meski tidak berarti menafikan bantuan atau mereduksi semangat kolegialitas.
7. Mementingkan kepentingan orang lain (*altruism*)
Guru siap memberikan layanan kepada anak didiknya pada saat bantuan itu diperlukan, apakah di kelas, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan di luar sekolah.

8. Memiliki kode etik

Kode etik merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam bekerja. Kode etik merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawatahkan dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa.

9. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas

Manakala terjadi malpraktik, guru siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat atau sanksi dari atasan. Ketika bekerja, guru memiliki tanggung jawab kepada komunitas, terutama anak didiknya. Replikasi tanggung jawab ini menjelma dalam bentuk disiplin mengajar, disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran.

10. Mempunyai sistem upah

Upah atau gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Budaya profesional

Budaya profesi dapat berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbol-simbol untuk profesi lain.

12. Melaksanakan pertemuan profesional tahunan

Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum guru, seminar, diskusi panel, workshop. Topik-topik yang dibahas terutama berkaitan dengan isu-isu tahunan yang relevan di bidang pendidikan keguruan.

Menurut Nata (2003: 142-143) secara garis besar terdapat 3 (tiga) ciri-ciri profesi keguruan sebagai berikut.

1. Seorang guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan baik. Guru benar-benar seorang ahli dalam bidang ilmu yang diajarkannya, selanjutnya karena bidang pengetahuan apa pun selalu mengalami perkembangan, maka seorang guru juga harus terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang diajarkannya sehingga tidak ketinggalan zaman, untuk dapat melakukan peningkatan dan pengembangan ilmu yang diajarkannya itu,

seorang guru harus terus-menerus melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai macam metode.

2. Seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada murid-muridnya secara efektif dan efisien. Untuk itu seorang guru harus memiliki ilmu keguruan yaitu cara membuat persiapan pengajaran sesuatu yang sangat perlu, cara menjalin bahan-bahan pelajaran dan cara menilai hasil pelajaran.
3. Seorang guru profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesional. Dengan cara demikian ilmu yang diajarkan atau nasihat yang diberikannya kepada siswa akan didengarkan dan dilaksanakannya dengan baik.

Selanjutnya guru yang profesional menurut Rihe dalam Sagala (2006) mengemukakan ada 7 ciri-ciri profesionalisasi jabatan guru yaitu:

1. Guru bekerja semata-mata hanya memberi pelayanan kemanusiaan bukan usaha untuk kepentingan pribadi.
2. Guru secara hukum dituntut memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar serta persyaratan yang ketat untuk menjadi anggota profesi keguruan.
3. Guru dituntut memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi.
4. Guru dalam organisasi profesional memiliki publikasi yang dapat melayani para guru sehingga tidak ketinggalan bahkan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi.
5. Guru selalu diusahakan mengikuti kursus-kursus, workshop, seminar, konvensi dan terlibat secara luas dalam berbagai kegiatan *in service*.
6. Guru diakui sepenuhnya sebagai suatu karier hidup (*a live carrier*).
7. Guru memiliki dan etika yang berfungsi secara nasional maupun secara lokal.

Senada dengan penjelasan di atas, Agung (2010: 18) memaparkan bahwa ciri guru profesional adalah menguasai substansi kajian yang mendalam, dapat melaksanakan pembelajaran yang mendidik, berkepribadian dan memiliki komitmen serta perhatian terhadap perkembangan peserta didik. Menurut Bafadal (2003: 6-7) ciri guru

yang profesional adalah guru dengan visi yang tepat dan guru dengan aksi inovatif dan mandiri. Sedangkan menurut Glickman bahwa guru profesional memiliki dua ciri yaitu kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi (Mulyasa, 2007: 13).

Akhirnya untuk menutup pembahasan pada bagian ini, terdapat 5 (lima) hal yang dituntut dari seorang guru untuk menjadi profesional sebagaimana dijelaskan Supriadi yang dikutip Mulyasa (2007: 11) yaitu:

1. Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya.
2. Menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada peserta didik.
3. Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi.
4. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
5. Seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

C. Peningkatan Profesi Keguruan

Profesi guru adalah profesi yang dinamis, maksudnya profesi guru berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini lahir teori-teori terbaru terkait dengan perkembangan peserta didik, tuntutan standar kompetensi yang harus dimiliki guru juga semakin meningkat, demikian juga penggunaan teknologi dalam membantu proses pembelajaran juga semakin banyak dimanfaatkan. Mencermati hal tersebut maka saat ini sebuah keniscayaan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan profesinya. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut Bafadal (2003: 42) urgensi peningkatan profesional guru dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu:

1. Ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, berbagai metode dan media baru telah berhasil dikembangkan. Demikian pula hanya dengan pengembangan materi

dalam rangka pencapaian target kurikulum harus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua itu harus dikuasai sehingga mampu mengembangkan pembelajaran yang dapat membawa anak didik menjadi lulusan yang berkualitas tinggi.

2. Ditinjau dari dari kepuasan dan moral kerja. Peningkatan kemampuan profesional guru merupakan hak setiap guru, artinya setiap guru berhak mendapat pembinaan secara kontinu, apakah dalam bentuk supervisi, studi banding, tugas belajar maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena, pembinaan itu merupakan hal setiap guru maka peningkatan kemampuan profesional guru dapat juga dianggap sebagai pemenuhan hak. Pemenuhan hak tersebut, bilamana dilakukan dengan sebaik-baiknya merupakan satu upaya pembinaan kepuasan dan moral kerja.
3. Ditinjau dari keselamatan kerja. Banyak aktivitas pembelajaran di sekolah, bilamana tidak dirancang dan dilakukan secara hati-hati oleh guru maka akan berpotensi risiko yang tidak kecil. Misalnya dalam pembelajaran di laboratorium jika guru tidak merancang aktivitas pembelajaran dengan baik maka bisa saja berpotensi membahayakan anak didik.
4. Peningkatan kemampuan profesional guru penting dalam rangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Selanjutnya menurut Mudlofir (2014: 32) terdapat lima rasional urgensi peningkatan profesionalisme guru yaitu:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal

Berdasarkan kriteria ini, guru yang memiliki profesional tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar ideal akan mengidentifikasikan dirinya kepada figur yang dipandang memiliki standar ideal.

2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi

Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudan dilakukan melalui berbagai cara, penampilan, cara bicara, penggunaan bahasa, postur, sikap hidup sehari-hari, hubungan antarpribadi dan sebagainya.

3. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional
Berdasarkan kriteria ini, guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk dapat mengembangkan profesinya. Berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan guru antara lain:
 - a. Mengikuti kegiatan ilmiah.
 - b. Mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan.
 - c. Melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - d. Menelaah kepustakaan, membuat karya ilmiah.
 - e. Memasuki organisasi profesi.

4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi

Hal ini mengandung makna bahwa profesionalisme yang tinggi ditunjukkan guru dengan adanya upaya untuk selalu mencapai kualitas dan cita-cita sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu aktif dalam seluruh kegiatan dan perilakunya untuk menghasilkan kualitas yang ideal.

Secara kritis, guru akan selalu mencari dan secara aktif selalu memperbaiki diri untuk memperoleh hal-hal yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran.

5. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya

Profesionalisme ditandai dengan kualitas derajat kebanggaan akan profesi yang dipegangnya. Dalam kaitan ini diharapkan agar guru memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Rasa bangga ini ditunjukkan dengan penghargaan akan pengalamannya di masa lalu, berdedikasi tinggi terhadap tugas-tugasnya sekarang dan meyakini akan potensi dirinya bagi perkembangan di masa depan.

Mencermati pemaparan terkait dengan urgensi peningkatan prrofesi guru maka dapatlah dimakana bahwa peningkatan profesional guru adalah sebagai upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional. Untuk mencapai hal tersebut maka terdapat dua prinsip dasar berkenaan dengan aktivitas peningkatan kemampuan profesional guru sebagai berikut.

1. Peningkatan kemampuan profesional guru merupakan upaya membantu guru yang profesional menjadi profesional. Jadi peningkatan kemampuan profesional guru itu merupakan bantuan profesional. Di satu sisi, bantuan profesional berarti sekadar bantuan, sehingga yang seharusnya lebih berperan aktif dalam upaya pembinaan adalah guru itu sendiri. Artinya guru itu sendirilah yang seharusnya meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pembinaan. Demikian pula dalam hal bantuan yang diperlukan tergantung pada permintaan guru itu sendiri. Walaupun sekadar bantuan, pihak yang berwenang harus melaksanakan bantuan atau pembinaan tersebut secara profesional. Di sisi lain bantuan profesional berarti tujuan akhirnya adalah bertumbuh kembangnya profesionalisme guru.
2. Peningkatan kemampuan profesional guru tidak benar bilamana hanya diarahkan kepada pembinaan kemampuan guru. Prinsip dasar kedua tersebut didasarkan pada prinsip di atas bahwa tujuan akhir pembinaan guru adalah bertumbuh kembangnya profesionalisme guru (Bafadal, 2003: 44).

Memimpikan hal di atas yaitu peningkatan profesi guru yang bertujuan akhir yaitu mendapatkan guru profesional yang dapat berlangsung secara efektif dan efisien maka program peningkatan kemampuan profesional guru dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam hal ini Bafadal (2003: 45) menyampaikan langkah-langkah sistematis dalam program peningkatan profesi guru sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, kesulitan atau masalah-masalah yang seringkali dimiliki atau dialami guru kelas dan guru mata pelajaran. Hal ini menjadi penting karena menjadi dasar untuk merencanakan kegiatan.
2. Menetapkan program peningkatan kemampuan profesional guru yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan, kelemahan, kesulitan dan masalah-masalah yang seringkali dimiliki atau dialami guru kelas dan guru mata pelajaran.
3. Merumuskan tujuan program peningkatan kemampuan profesional guru yang diharapkan dapat dicapai pada akhir program pengembangan. Rumusan harus operasional sehingga

pencapaiannya dapat dengan mudah diukur pada akhir pelaksanaan program.

4. Menetapkan serta merancang materi dan media yang akan digunakan dalam peningkatan kemampuan profesional guru kelas dan guru mata pelajaran.
5. Menetapkan dan merancang metode dan media yang akan digunakan dalam peningkatan kemampuan profesional guru kelas dan guru mata pelajaran.
6. Menetapkan bentuk dan mengembangkan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan program peningkatan kemampuan profesional guru kelas dan guru mata pelajaran.
7. Menyusun dan mengalokasikan anggaran program peningkatan kemampuan profesional guru kelas dan guru mata pelajaran.
8. Melaksanakan program peningkatan kemampuan profesional guru dengan materi, metode, dan media yang telah ditetapkan dan dirancang.
9. Mengukur keberhasilan program peningkatan kemampuan profesional guru.
10. Menetapkan program tindak lanjut peningkatan kemampuan profesional guru kelas dan guru mata pelajaran.

Lebih lanjut dijelaskan Bafadal (2003: 46-58) bahwa program yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan profesional guru dilakukan sebagai berikut.

1. Peningkatan profesional guru melalui supervisi pendidikan
Supervisi pendidikan yang dimaksudkan disini adalah proses pemberian layanan bantuan profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Supervisi pendidikan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaannya sebagai berikut.
 - a. Supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harmonis tersebut sebaiknya yang diciptakan adalah hubungan yang bersifat terbuka, kesetiakawanan dan informal. Untuk itu

dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, kepala sekolah, pengawas dan pembina lainnya harus memiliki sifat-sifat seperti sikap membantu, memahami, terbuka, jujur, konsisten, sabar, antusias dan penuh humor.

- b. Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi pendidikan bukan tugas yang bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan, melainkan harus tetap dibina secara berkesinambungan karena pendidikan dan pembelajaran bersifat dinamis.
- c. Supervisi pendidikan harus demokratis. Supervisor (kepala sekolah, pengawas dan pembina lainnya) tidak boleh mendominasi melaksanakan tugas supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif.
- d. Program supervisi pendidikan harus komprehensif. Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan program pendidikan sekolah, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan sistem penyelenggaraan sekolah sebelumnya.
- e. Supervisi pendidikan harus konstruktif. Supervisi pendidikan bukanlah mencari kesalahan-kesalahan guru. Memang dalam proses supervisi terdapat kegiatan penilaian untuk kerja guru dalam menjalankan tugasnya. Namun, tujuan penilaian tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu dikembangkan.
- f. Supervisi pendidikan harus objektif dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi pendidikan. Objektivitas dalam penyusunan program supervisi berarti bahwa program supervisi harus berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesionalisme guru demikian juga dalam melakukan evaluasi keberhasilan program supervisi pendidikan juga harus objektif.

Upaya peningkatan profesional guru melalui supervisi pendidikan dilakukan dengan berbagai teknik yaitu:

a. Kunjungan kelas

Kunjungan kelas dapat dilakukan kepala sekolah, pengawas atau pembina lainnya dengan cara masuk atau mengunjungi kelas untuk melihat guru yang sedang melaksanakan pembelajaran. Begitu melihat ada guru yang mengalami kesulitan maka langsung dapat diberikan bantuan. Kunjungan kelas dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan guru akan dilakukannya kunjungan kelas sehingga guru yang bersangkutan dapat mempersiapkan terlebih dahulu atau dilakukan tanpa terlebih dahulu memberitahu guru yang bersangkutan.

b. Percakapan pribadi

Percakapan pribadi adalah percakapan langsung secara perorangan antara guru dengan kepala sekolah, pengawas dan pembina lainnya terkait dengan segala hal mengenai pembelajaran yang dilakukan guru.

c. Kunjungan antarkelas

Kunjungan antarkelas adalah kegiatan saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru lainnya dalam satu sekolah. Kunjungan antarkelas juga dapat dilakukan antarsekolah.

d. Penilaian sendiri

Teknik penilaian sendiri adalah teknik supervisi pendidikan dengan memberikan supervisi kepada guru dengan cara menyarankan guru tersebut melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Dengan melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri diharapkan guru melihat keterbatasan dirinya dan berusaha mengatasinya. Teknik penilaian sendiri dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian diri yang tentunya telah dimiliki sebelumnya.

2. Peningkatan profesional guru melalui program sertifikasi

Program sertifikasi bertujuan untuk menyiapkan guru yang berkualitas. Melalui program sertifikasi diharapkan kemampuan guru meningkat dan memiliki kualifikasi sebagai guru profesional. Hasil yang diharapkan melalui program sertifikasi yaitu tersedianya guru terdidik dan terlatih pada sekolah yang memiliki guru kelas

dan guru mata pelajaran, dan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga guru pada sekolah.

3. Peningkatan profesional guru melalui program tugas belajar
Tugas belajar yang diberikan kepada guru secara umum bertujuan sebagai berikut.
 - a. Meningkatkan kualifikasi formal guru sehingga sesuai dengan peraturan yang diberlakukan secara nasional.
 - b. Meningkatkan kemampuan profesional para guru dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
 - c. Menumbuhkembangkan motivasi para guru sekolah dalam rangka meningkatkan kinerjanya.
4. Peningkatan kemampuan profesional guru melalui gugus sekolah
Gugus sekolah didefinisikan sebagai satu pendekatan pengembangan dan pembinaan sekolah yang dimulai pembentukan gugus sekolah yang terdiri atas satu sekolah inti sebagai pusat pengembangan dan sekolah lainnya menjadi sekolah imbas. Gugus sekolah dasar memiliki beberapa komponen yaitu:
 - a. Sekolah inti yang dilengkapi dengan tiga ruang tambahan berupa ruang perpustakaan, serba guna dan ruang pusat kegiatan guru.
 - b. Sekolah imbas.
 - c. Dua orang tutor.
 - d. Lima orang pemandu mata pelajaran.
 - e. Kelompok kerja guru.
 - f. Kelompok kerja kepala sekolah.
 - g. Guru sebagai komponen utama.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit, memaparkan ranah pembinaan dan pengembangan profesi keguruan sebagai berikut.

1. Aktivitas kolektif guru dalam meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

2. Pendidikan pelatihan yang dilakukan Dinas Pendidikan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan lainnya.
3. Pemagangan di satuan pendidikan, dunia industri, lembaga pelatihan.
4. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif melalui jurnal, majalah dan media massa.
5. Karya inovatif.
6. Presentasi pada forum ilmiah.
7. Publikasi buku teks pelajaran yang lolos oleh penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
8. Publikasi buku pengayaan.
9. Publikasi buku pedoman guru.
10. Publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus.
11. Penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Menurut Syafaruddin (2005: 110) profesionalisme guru dalam prosesnya merupakan kewajiban pribadi sebagai tenaga kependidikan. Oleh karena itu, peningkatan profesi guru yang utama adalah datang dari diri guru tersebut, untuk itu terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan guru yaitu:

1. Melakukan teknik belajar mandiri. Upaya ini dimaksudkan guna memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan. Kesadaran yang tumbuh pada diri seorang untuk maju merupakan kunci utamanya dengan kelincahan membagi waktu ditengah-tengah kesibukan tugas. Adakah waktu untuk belajar mandiri? Hal ini merupakan suatu tantangan bagi pengembangan profesionalisme guru. Dengan tugas-tugas memenuhi angka kredit tentunya dapat dijadikan cermin seberapa besar kreativitas guru dalam tugas mandirinya menyusun karya ilmiah.
2. Aktif mengikuti kegiatan organisasi profesi, seperti halnya PGRI adalah untuk meningkatkan mutu profesi itu sendiri. Perlu adanya pertemuan profesi secara periodik, menerbitkan media komunikasi ilmiah, seperti majalah jurnal atau bulletin. Dengan organisasi

profesi upaya pemantapan profesionalisme guru dapat dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

3. Mempersiapkan diri untuk dapat mengikuti program *in service training/in service education*. Setiap guru dituntut terus memupuk semangat menuntut ilmu pengetahuan sebagai suatu kewajiban yang terus berkelanjutan tanpa batas meskipun seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Setidaknya kalau memang pendidikan lanjutan belum terbuka, maka fungsi penataran atau pendidikan dan latihan bagi guru dapat dimanfaatkan secara responsif dan fungsional.

Senada dengan penjelasan di atas, Pidarta (1997: 282-283) menjelaskan terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan profesi keguruannya, dalam hal ini sebagai berikut.

1. Belajar mandiri di rumah. Saat ini terdapat kecenderungan di kalangan pendidik untuk memiliki perpustakaan pribadi di rumah. Seorang pendidik sudah selayaknya guru memiliki perpustakaan pribadi sebab profesinya tidak lepas dari buku.
2. Belajar di perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum. Perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum dapat dimanfaatkan guru untuk menambah wawasan keilmuannya, terutama terkait dengan wawasan keilmuan yang dapat dimanfaatkan secara langsung di dalam melaksanakan pembelajaran.
3. Membentuk persatuan pendidikan sebidang studi atau yang berspesialisasi sama dan melakukan tukar pikiran atau berdiskusi dalam kelompok tersebut. Cara seperti ini akan memberikan dampak positif kepada guru karena saling bertukar informasi, pengalaman dan masukan kepada guru.
4. Mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah. Melalui aktivitas ini akan memberi pengalaman tambahan kepada guru di samping terdapat kemungkinan ada hal-hal yang baru yang belum diketahui guru.
5. Belajar secara formal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik S2 maupun S3 atau dapat juga mengikuti *course-course* pendek yang berdurasi 1 sampai 3 bulan untuk mendalami bidang-bidang tertentu.

6. Mengikuti pertemuan organisasi profesi pendidikan. Pada umumnya berisikan makalah-makalah berupa pengalaman, hasil penelitian ataupun pemikiran kritis sehingga dapat menambah wawasan keilmuan bagi guru.
7. Mengikuti kegiatan dalam kompetisi-kompetisi ilmiah baik yang diadakan oleh organisasi pendidik maupun pemerintah.

Pengembangan profesionalitas guru dilakukan secara terpadu, konseptual dan sistematis, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan sebagaimana dijelaskan Mudlofir (2014: 132-134) sebagai berikut.

1. Melalui pelaksanaan tugas

Pengembangan kompetensi melalui pelaksanaan tugas pada dasarnya merupakan upaya menterpadukan antara potensi profesional dengan pelaksanaan tugas-tugas pokoknya. Dengan cara ini, tugas-tugas yang diberikan dalam kegiatan pelaksanaan tugas, secara langsung ataupun tidak langsung merupakan upaya peningkatan kompetensi guru. Pendekatan ini sifatnya lebih informal, sudah terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Cara ini sangat tepat dalam berbagai situasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a. Kerja kelompok untuk menumbuhkan saling menghormati dan pemahaman sosial.
 - b. Diskusi kelompok untuk bertukar pikiran dalam membahas masalah yang dihadapi bersama.
 - c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri.
2. Melalui respons

Peningkatan kompetensi melalui respons dilakukan dalam bentuk suatu interaksi secara formal atau informal yang biasanya dilakukan melalui berbagai interaksi seperti pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya, ceramah, konsultasi, studi banding, penggunaan media dan forum-forum lainnya. Hal yang dapat menunjang respons ini adalah apabila para guru berada dalam suasana interaksi sesama guru yang memiliki kesamaan latar belakang dan tugas, misalnya Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Dalam pendekatan ini, KKG dan MGMP sebagai wadah para guru dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan profesionalisme guru. Melalui KKG dan MGMP, guru akan memperoleh peluang untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan wawasan dan kualitas diri serta profesi. KKG dan MGMP dapat mengembangkan suatu program kerja yang memungkinkan guru sejenis dapat berkembang, misalnya mendatangkan pakar dalam bidangnya sebagai fasilitator dalam lokakarya, pelatihan, studi kasus dan sebagainya.

3. Melalui penelusuran dan perkembangan diri

Peningkatan kompetensi akan sangat tergantung pada kualitas pribadi guru masing-masing. Namun kenyataannya, setiap individu guru memiliki keunikan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, upaya peningkatan profesionalisme seyogyanya berpusat pada keunikan potensi kepribadian masing-masing guru. Pendekatan ini dirancang untuk membantu guru agar potensi pribadi dapat berkembang secara optimal dan berkualitas sehingga pada gilirannya dapat membawa kepada perwujudan profesionalisme secara lebih bermakna.

Potensi pribadi merupakan bagian dan keseluruhan kepribadian dalam bentuk kecakapan-kecakapan yang terkandung baik aspek fisik, emosional maupun intelektual. Apabila potensi pribadi ini dapat dikembangkan secara efektif, maka akan menjadi kecakapan nyata yang secara terpadu membentuk kualitas kepribadian seseorang. Peningkatan profesionalisme dapat diperoleh melalui suatu perencanaan yang sistematis dengan menata dan mengembangkan potensi-potensi pribadi. Perencanaan ini merupakan suatu rangkaian proses kegiatan yang terarah dan sistematis dalam mengenal, menata, dan mengembangkan potensi pribadi agar mencapai suatu perwujudan diri yang bermakna.

4. Melalui dukungan sistem

Berkembangnya kompetensi guru akan banyak tergantung pada kondisi sistem di mana guru bertugas. Oleh karena itu, upaya peningkatan profesionalisme guru seyogyanya berlangsung dalam sistem organisasi dan manajemen yang kondusif. Untuk hal ini perlu diupayakan agar organisasi dan lingkungan tertata sedemikian rupa, sehingga menjadi suatu sistem dengan manajemen yang

menunjang pengembangan profesionalisme guru. Manajemen dan sarana penunjang yang memadai sangat diperlukan untuk membentuk lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas secara efektif.

Mengingat besarnya peran guru pada tingkat institusional dan instruksional maka manajemen pendidikan harus memprioritaskan manajemen guru utama yang berkenaan dengan manajemen guru adalah bagaimana menciptakan suatu pengelolaan pendidikan yang memberikan suasana kondusif bagi guru untuk melaksanakan tugas profesionalnya secara kreatif dan produktif serta memberikan jaminan kesejahteraan dan pengembangan karirnya.

Manajemen guru harus mencakup fungsi-fungsi yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut.

- a. Profesionalisme, standar, sertifikasi dan pendidikan prajabatan.
- b. Rekrutmen dan penempatan.
- c. Promosi dan mutasi.
- d. Gaji, insentif dan pelayanan.
- e. Supervisi dan dukungan profesional.

Selanjutnya secara teknis, Mudlofir (2014: 135-137) memaparkan strategi dan teknis peningkatan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. *In house training*, yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan.
2. Program magang yaitu pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru.
3. Kemitraan sekolah yaitu pelatihan melalui kemitra sekolah yang dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta dan sebagainya.
4. Belajar jarak jauh, yaitu pelatihan melalui belajar jarak jauh yang dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya.

5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi.
6. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dan lain-lain sebagainya.
7. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
8. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri bagi yang berprestasi.
9. Diskusi masalah-masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah.
10. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru.
11. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun rencana pembelajaran dan sebagainya.
12. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
13. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.

14. Pembuatan media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran.
15. Pembuatan karya teknologi/karya seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Upaya peningkatan profesi guru di Indonesia menurut Nurdin dan Usman (2002: 24-25) dapat dilakukan sebagai berikut. (1) ketersediaan dan mutu calon guru, (2) pendidikan prajabatan, (3) mekanisme pembinaan dalam jabatan, dan (4) peranan organisasi profesi.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengembangan profesionalisme guru sebagai bagian terpenting memenuhi tuntutan *stakeholders* pendidikan, diperlukan beberapa rekomendasi yang sifatnya menguatkan upaya profesionalisasi guru sehingga akuntabilitas lembaga pendidikan persekolahan menjadi terjamin. Dalam hal ini pemerintah mengembangkan berbagai strategi sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas.
3. Penyelenggaraan kebijakan strategi dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.
4. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional.
5. Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesional.
6. Pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah.

7. Penguatan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidikan profesional.
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru.

Selanjutnya Nasution dan Siahaan (2009: 130-131) menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan pengembangan profesionalisme guru sebagai berikut.

1. Mengurangi intervensi pemerintah melalui kementerian terkait terhadap kebijakan persekolahan agar sekolah dapat mengembangkan manajemen kekinian dan kedisinian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan persekolahan.
2. Dihapuskannya aparat pemerintah daerah yang berfungsi membina guru, sehingga guru tidak terjepit dalam sistem birokrasi yang hierarkis dalam melaksanakan tugas dan menerima hak-haknya.
3. Peningkatan profesionalisme guru akan berjalan dengan baik bila sistem juga berjalan dengan baik. Karena itu, sistem perencanaan, perekrutan, penseleksian, penempatan, kesejahteraan dan kompensasi, pengembangan karir maupun jaminan keamanan guru dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Baik kepentingan guru, sekolah maupun *stakeholder* pendidikan.
4. Untuk meningkatkan profesionalisme guru, asosiasi guru memerlukan diversifikasi pada berbagai daerah yang membutuhkannya. Organisasi atau asosiasi guru tersebut tidak hanya sebagai wahana yang bersifat paguyuban tetapi berupa sebagai pemberdayaan profesionalisme, instrumen penyampai aspirasi dan pelindung kepentingan guru, instrumen dewan kehormatan guru jika guru diduga keras melakukan kesalahan atau melanggar kode etik guru.
5. Meningkatkan kesejahteraan guru melalui sistem terpadu, sehingga seluruh kepentingan guru terakomodir melalui penataan yang melibatkan unsur terkait atau instansi yang berwenang menyelenggarakan pendidikan persekolahan secara nasional tetapi dapat diimplementasikan di berbagai daerah.

6. Pembinaan terhadap mutu profesionalisme guru dilakukan melalui prajabatan, pendidikan dalam jabatan, penataran, workshop yang dititikberatkan pada peningkatan efektivitas mengajarnya, mampu mengatasi berbagai persoalan dan proses pembelajaran dan meningkatkan kepekaannya terhadap adanya perbedaan antara individu peserta didik.
7. Sesuai dengan prinsip peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MBS) dan semangat desentralisasi, sekolah di beri kewenangan yang lebih besar untuk menentukan apa yang terbaik untuk pembinaan mutu guru-gurunya. Untuk itu sekolah menyusun program, anggaran disalurkan langsung ke sekolah, dan kepala sekolah menentukan pelatihan untuk menunjang kompetensi guru.
8. Kepemimpinan kepala sekolah, perlu terus-menerus ditumbuh-kembangkan dengan berorientasi kepada jiwa atau watak kewirausahaan yang memungkinkan kepala sekolah melakukan inovasi dalam berbagai upaya peningkatan mutu manajemen persekolahan yang dipimpinnya.
9. Persekolahan selengkapnyalah dilengkapi dengan perangkat yang bersifat organisatoris, seperti perlunya melakukan penguatan terhadap personil dan fungsi komite sekolah, yang dapat memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan sekolah berdasarkan rencana aksi yang akan dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah dilihat benang merah terkait dengan peningkatan profesi guru yaitu harus dilakukan secara sistematis dalam arti direncanakan secara terukur, kemudian dilaksanakan secara taat asas dan kemudian dievaluasi secara objektif sehingga lahirlah guru profesional.



BAB 3

KODE ETIK GURU

A. Pengertian

Kode etik merupakan konsep yang terdiri dari dua kata yang bermakna yaitu “kode” dan “etik”. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan kode berarti tulisan (kata-kata, tanda) yang dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud yang tertentu. Menurut Wiyani (2015: 15) kode dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersipat prinsipil atau mendasar yang dibuat dan ditetapkan secara bersistem oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi.

Kata etik berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang bermakna watak, adab atau cara hidup. Makna yang terkandung di dalamnya juga berkaitan dengan cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia. Sedangkan etik berarti aturan tata susila, sikap atau akhlak. Menurut Wiyani (2015: 16) etik adalah asas-asas atau nilai-nilai yang harus dipahami melalui pemikiran dan diaktualisasikan melalui perbuatan seseorang sebagai bagian dari suatu organisasi.

Etik yang dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai disebut dengan “kode” sehingga menjadi sebuah istilah yang disebut dengan “kode etik”. Secara harfiah kode etik berarti sumber etik. Dengan

demikian dapatlah dipahami bahwa aturan yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

Menurut Saud (2010: 78) kode etik keprofesian (*professional code of ethic*) pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang bergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan/atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhi dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dari sanksi seandainya terjadi kelalaian atau pelanggaran.

Gibson sebagaimana dikutip Djamarah (2005: 49) menyatakan bahwa kode etik guru dikatakan sebagai suatu *statement* formal yang merupakan norma (aturan tata susila) dalam mengatur tingkah laku guru. Dari pernyataan ini dapatlah dimaknai bahwa kode etik merupakan penangkal dari kecenderungan manusiawi seorang guru yang ingin menyeleweng agar tidak berbuat salah.

Sardiman (2003: 151) memaparkan bahwa secara harfiah kode etik berarti sumber etik. Etik artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kode etik diartikan aturan tata susila keguruan. Maksudnya aturan-aturan tentang keguruan yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru dilihat dari segi susila. Selanjutnya menurut Wiyani (2015: 17) kode etik profesi adalah rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh seseorang pekerja di suatu organisasi atau lembaga. Mematuhi rambu-rambu merupakan perbuatan yang baik dan sudah barang tentu jika melanggar rambu-rambu tersebut akan menjadi perbuatan yang buruk.

Merujuk kepada penjelasan di atas maka dapatlah dimaknai bahwa kode etik guru dapat diartikan sebagai aturan terkait dengan aturan tata susila keguruan. Etika profesi keguruan merupakan aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya, dalam hal ini dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan saja yang mendorong perilaku guru itu, tetapi nilai moral

dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya (Sutarsih, 2012: 27).

Syamsuddin dan Budiman (2003: 4) memaparkan kode etik guru merupakan pedoman yang mengatur hubungan dengan teman sejawat, peserta didik, orang tua peserta didik, pimpinan, masyarakat dan dengan misi tugasnya. Jalinan hubungan tersebut dilakukan untuk berbagai kepentingan, terutama untuk kepentingan perkembangan siswa secara optimal, dan secara jelas jalinan hubungan itu diatur oleh kode etik.

Kode etik profesi menurut Rochman dan Gunawan (2012: 108) yaitu norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Sedangkan menurut Mudlofir (2014: 205) kode etik profesi sebagai perangkat standar berperilaku yang dikembangkan atas dasar kesepakatan nilai-nilai dan moral dalam profesi itu.

Danim (2012: 107) memaparkan kode etik guru merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantahkan dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. Selanjutnya dijelaskan Danim bahwa kode etik dimaksudkan menjadi norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah dipahami bahwa kode etik merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat.

B. Urgensi Kode Etik

Kode etik guru adalah salah satu bagian dari profesi pendidik. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga profesional maka perlu memiliki kode etik guru yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama pengabdianya. Kode etik guru ini merupakan

ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Apabila guru telah melakukan perbuatan asusila dan amoral berarti guru telah melanggar kode etik guru. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi guru itu sendiri.

Kode etik guru merupakan suatu yang harus dilaksanakan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan guru dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Menurut Saud (2010: 79) maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik adalah untuk menjamin agar tugas-pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya memberikan imbalan dan pihak pengemban tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya.

Mulyasa (2007: 43) menjelaskan pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Setidaknya menurut Mulyasa (2007: 44) terdapat 6 (enam) urgensi tujuan menyusun kode etik profesi yaitu:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi.

Diakui ataupun tidak, jika ada anggota profesi yang melanggar kode etik maka akan muncul citra negatif terhadap profesi tersebut dari masyarakat. Itulah sebabnya kode etik profesi ditetapkan dengan tujuan agar martabat profesi tetap terjaga dan dijunjung tinggi.

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Kesejahteraan mencakup lahir atau material maupun batin, spiritual, emosional dan mental. Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya.

3. Pedoman berperilaku

Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.

4. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Kode etik berkaitan dengan peningkatkan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugas keprofesiannya.

5. Untuk meningkatkan mutu profesi

Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

6. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Zanti sebagaimana dikutip Amini (2013: 50) menjelaskan urgensi kode etik sebagai berikut.

1. Agar guru terhindar dari penyimpangan profesi, karena sudah adanya landasan yang digunakan sebagai acuan.
2. Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja dan masyarakat, jabatan profesi dan pemerintah.
3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
4. Pemberi arah yang benar kepada penggunaan profesinya.

Hal senada dijelaskan Hermawan sebagaimana dikutip Sutjipto dan Kosasi (1994: 31) bahwa urgensi tujuan perlunya kode etik pada suatu profesi adalah:

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Profesi bukan barang mewah untuk dipajang, dihargai dan dihormati akan tetapi nilai-nilai yang melekat pada profesi harus

dipelihara dan dijadikan standar pekerjaan. Untuk itu maka setiap guru sebagai pendidik yang memiliki kode etik harus menjunjung tinggi martabat profesinya.

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya
Tuntutan hidup, standar hidup bahkan seluruh orang yang terlibat dalam profesi tersebut harus mendapat perlindungan. Perlindungan dalam hal ini perlindungan standar minimal. Bahkan pendapatan atau gaji harus dijadikan bagian penting dari kode etik guru.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
Melalui bergabung dalam organisasi profesi, maka setiap anggota akan lebih mudah akses dengan berbagai pihak. Pengabdian yang dilakukan apabila mungkin tidak dilakukan sendiri, tetapi saling bekerja sama, berkolaborasi untuk kepentingan kelompok profesi.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi
Kualitas profesi di mana para anggotanya dapat tumbuh dan berkembang dengan bergabung dalam organisasi profesi tentu salah satu tujuannya adalah terjadinya peningkatan mutu dan kualitas dari pekerjaan, pengabdian serta karya-karya yang diberikan oleh anggota profesi. Jadi semua program, kegiatan harus berusaha menjadi alat untuk peningkatan kualitas atau mutu dari semua karya anggotanya.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
Melalui aktivitas berkumpul sesama profesi, maka setiap anggota harus melakukan sesuatu seperti perencanaan organisasi yang baik, pengelolaan yang transparan, kepemimpinan yang kuat, pengembangan yang memperhitungkan masa depan. Dengan cara seperti itu mutu organisasi profesi akan lahir dari orang-orang yang sadar bahwa kelompok profesi adalah sebuah kebutuhan anggotanya.

Menurut Saondi dan Suherman (2010: 90) tujuan dari kode etik profesi antara lain adalah:

1. Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi
Setiap anggota organisasi profesi dapat menjalankan profesinya dengan baik, dan dapat pula menjalankan profesinya dengan buruk. Sudah barang tentu pada suatu organisasi profesi yang

ingin dimunculkan adalah setiap anggota organisasi profesi harus menjalankan profesinya dengan baik. Hal ini dapat terjadi manakala setiap anggota organisasi profesi mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan. Perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang dilakukan oleh anggota organisasi profesi berhubungan erat dengan citra profesinya di mata masyarakat.

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota organisasi profesi

Kode etik diperlukan dengan tujuan agar anggota organisasi profesi dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik dan tidak merugikan pihak lain. Ketika hal itu dapat terjadi, maka kebutuhan akan terpenuhi dengan baik dan pada gilirannya dapat memelihara, menjaga, bahkan meningkatkan kesejahteraannya sebagai anggota organisasi profesi.

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota organisasi profesi

Kode etik profesi dapat menggerakkan para anggota organisasi profesinya untuk berbuat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, ketika itu dilakukan maka pada dasarnya sedang melakukan suatu pengabdian. Pengabdian adalah melakukan upaya mengabdikan dengan cara berbakti kepada orang lain atau masyarakat dengan melayaninya secara baik.

4. Untuk meningkatkan mutu profesi

Mutu profesi terkait dengan keinginan seseorang untuk berprofesi dan kebanggaan seseorang terhadap profesinya. Seseorang akan ingin berprofesi dan bangga dengan profesinya manakala profesinya dinilai baik oleh orang lain atau masyarakat. Masyarakat dapat menilai baik profesinya manakala seluruh anggota organisasi profesi mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan.

5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Ketika mutu profesi meningkat, maka hal itu akan berimbas pada mutu organisasi profesi. Itulah sebabnya pemimpin pada organisasi profesi harus dapat mengarahkan semua anggota organisasi profesi untuk senantiasa mematuhi kode etik profesinya.

6. Untuk meningkatkan layanan di atas kepentingan pribadi
Kode etik profesi harus ditaati setiap anggota organisasi profesi, tanpa terkecuali pemimpin organisasi profesi tersebut. Ketika hal itu dapat terjadi maka tidak ada satupun anggota organisasi profesi ataupun pimpinan organisasi profesi yang menonjolkan kepentingan pribadinya, yang dikedepankan adalah bagaimana mereka bisa saling melayani koleganya agar tujuan organisasi profesi tercapai. Bukankah ketika tujuan organisasi tercapai maka tujuan atau kepentingan pribadi juga tercapai.
7. Untuk menciptakan organisasi profesi yang kuat
Ketika martabat suatu profesi dijunjung tinggi, ketika anggota organisasi profesi hidup sejahtera, ketika anggota organisasi profesi memiliki dedikasi yang tinggi dalam bekerja dan mengabdikan, ketika mutu profesi dan mutu organisasi profesi tinggi dan ketika setiap orang yang ada dalam organisasi mematuhi kode etik profesi, maka dampaknya adalah akan tercipta organisasi profesi yang kuat.
8. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota organisasi profesi
Kuatnya organisasi profesi mencerminkan bahwa pada organisasi profesi tersebut tujuan organisasi dapat dicapai melalui upaya kerja sama. Kerja sama akan sangat mungkin terjadi manakala anggota organisasi mau dan mampu berkomunikasi serta mau dan mampu menjaga hubungan harmonis antar anggota. Itulah sebabnya kepatuhan anggota organisasi profesi terhadap kode etik profesi disadari ataupun tidak dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota organisasi profesi.
9. Untuk menentukan suatu standar kinerja anggota organisasi profesi
Kepatuhan anggota profesi dalam suatu organisasi profesi akan ditentukan oleh kemampuannya dalam bekerja. Jika anggota profesi tersebut tidak mampu dalam melakukan suatu pekerjaan maka tidak menutup kemungkinan ia akan melanggar kode etik profesi. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik profesi juga ditentukan oleh karakternya. Itulah sebabnya diperlukan suatu standar kinerja anggota organisasi profesi yang mencakup aspek keahlian atau keterampilan, dan aspek kepribadian yang sesuai dengan kode etik profesi.

Dari pemaparan di atas maka dapatlah dipahami bahwa urgensi kode etik profesi sesungguhnya adalah memberikan perlindungan bagi anggotanya dalam bekerja, mengembangkan karir baik di dalam jabatan profesinya maupun ditengah-tengah masyarakat. Bagi pengemban tugas profesi akan menjadi pegangan dalam bertindak serta acuan dasar dalam seluk beluk keperilakuannya dalam rangka memelihara dan menjunjung tinggi martabat dan wibawa serta kredibilitas visi, misi, fungsi bidang profesinya. Bagi pihak klien atau penerima layanan, kode etik dapat merupakan landasan jika dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan kepada pihak yang berwenang dalam hal mana terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dari pengemban profesi yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan urgensi kode etik profesi tersebut maka dapatlah dilihat bahwa fungsi kode etik profesi dapat dilihat dari berbagai perspektif, sebagaimana dijelaskan oleh Barmawi dan Arifin (2012: 53) sebagai berikut.

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota organisasi profesi mengenai perbuatan baik apa yang harus dilakukan

Kode etik profesi menjadi sesuatu yang harus ada dalam suatu organisasi profesi, jika tidak ada kode etik profesi, maka tidak ada asas atau nilai yang dapat dijadikan oleh setiap anggota organisasi profesi sebagai rambu-rambu dalam berperilaku. Itulah sebabnya kode etik profesi berfungsi sebagai pemberi pedoman bagi setiap anggota organisasi profesi dalam berbuat dan bertindak.

2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan

Kode etik berfungsi sebagai pemberi pedoman bagi anggota organisasi profesi dalam berbuat baik. Selain sebagai pedoman, kode etik profesi juga berfungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi tersebut. Masyarakat dapat menilai, menegur atau bahkan mempidanakan seorang anggota profesi yang melakukan pelanggaran kode etik profesinya melalui prosedur-prosedur tertentu yang telah ditentukan secara yuridis formal.

3. Mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi terkait dengan hubungan etika dalam keanggotaan profesi

Setiap individu sudah barang tentu memiliki kepentingan, demikian juga dengan setiap anggota organisasi profesi dan setiap organisasi

profesi memiliki kepentingannya masing-masing. Jenis kepentingan sangat ditentukan oleh bidang profesi dan tujuan organisasi profesinya. Namun demikian pada saat-saat tertentu antarorganisasi profesi yang berbeda memiliki kepentingan yang sama.

Misalnya organisasi profesi keguruan dan organisasi profesi kedokteran. Organisasi profesi keguruan memiliki alah satu kepentingan mendidik peserta didiknya adalah menjadi anggota masyarakat yang hidup bersih dan sehat. Kepentingan tersebut juga sama dengan kepentingan organisasi profesi kedokteran yang bergerak di bidang kesehatan. Kedua organisasi profesi tersebut dapat saling bekerja sama dalam mencapai kepentingannya. Namun demikian, tidak berarti organisasi profesi keguruan dapat mengintervensi organisasi kedokteran demikian juga sebaliknya ketika melakukan kerja sama.

Senada dengan penjelasan Barmawi dan Arifin di atas, Satori dkk (2012: 55) memaparkan secara umum dapat dirinci fungsi kode etik profesi guru sebagai berikut.

1. Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga ia terhindar dari penyimpangan profesi.
2. Agar guru bertanggung jawab atas profesinya.
3. Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal.
4. Agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat.
5. Agar guru dapat memecahkan masalah dan mengembangkan dirinya.
6. Agar guru profesi terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.

C. Kode Etik Guru Indonesia

Dalam wilayah Republik Indonesia, guru dinaungi oleh organisasi profesi guru yang dikenal dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Melalui kongres ke XIII di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan pada kongres ke XVI tahun 1989 di Jakarta dan kongres ke XXI tahun 2013 dengan nomor VI/Kongres/XXXI/PGRI ditetapkan kode etik guru Indonesia.

Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Pedoman sikap dan berperilaku adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah.

Di dalam rumusan kode etik guru Indonesia, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa tujuan kode etik guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Sedangkan fungsi kode etik guru Indonesia dinyatakan dalam Pasal 3 yaitu sebagai perangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.

Selanjutnya terkait dengan sumber nilai-nilai yang terdapat di dalam kode etik guru Indonesia adalah:

1. Nilai-nilai agama dan Pancasila.
2. Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial dan kompetensi profesional.
3. Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial dan spiritual.

Teks kode etik guru sebagai berikut. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setiap pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut.

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila

Sesuai dengan *roefing*-nya guru harus mengabdikan dirinya secara ikhlas untuk menuntut dan mengantarkan anak didik seutuhnya, baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun mental agar menjadi insan pembangunan yang menghayati dan mengamalkan serta melaksanakan berbagai aktivitasnya dengan mendasarkan pada sila-sila Pancasila. Guru harus membimbing anak didiknya ke arah hidup yang selaras, serasi dan seimbang.

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional

Dalam hal ini guru harus mampu mendesain program pembelajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap diri anak didik. Yang lebih penting lagi guru harus menerapkan kurikulum secara benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak didik.

3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan

Dalam hal ini guru harus mengadakan komunikasi dan hubungan baik dengan anak didik. Hal ini terutama agar guru mendapatkan informasi secara lengkap mengenai diri anak didik. Dengan mengetahui keadaan dan karakteristik anak didik ini, maka akan sangat membantu bagi guru dan siswa dalam upaya menciptakan proses pembelajaran yang optimal. Untuk ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan yakni:

- a. Segala bentuk kekakuan dan ketakutan harus dihilangkan dari perasaan anak didik, tetapi sebaliknya harus dirangsang sedemikian rupa sehingga sifat terbuka, berani mengemukakan pendapat dan segala masalah yang dihadapinya.
 - b. Semua tindakan guru terhadap anak didik harus selalu mengandung unsur kasih sayang, ibarat orang tua dengan anaknya. Guru harus bersifat sabar, ramah dan terbuka.
 - c. Diusahakan guru dan anak didik dalam satu kebersamaan orientasi agar tidak menimbulkan suasana konflik.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses pembelajaran

Dalam hal ini guru harus dapat menciptakan kondisi-kondisi optimal sehingga anak didik merasa belajar, harus belajar, perlu

dididik dan perlu bimbingan. Usaha menciptakan suasana kehidupan sekolah menyangkut dua hal penting yaitu:

- a. Berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas secara langsung sebagai berikut.
 - 1) Pengaturan tata ruang kelas yang lebih kondusif untuk kepentingan pembelajaran.
 - 2) Menciptakan iklim atau suasana pembelajaran yang lebih serasi dan menyenangkan. Untuk menciptakan iklim yang lebih serasi dan menyenangkan dapat dilakukan dengan cara antara lain:
 - Adanya keterikatan antara guru dengan anak didik, anak didik dengan anak didik.
 - Menetapkan standar tingkah laku.
 - Diadakan diskusi-diskusi kelompok.
 - Memberikan penghargaan dan pemeliharaan semangat kerja.
 - b. Menciptakan kehidupan sekolah dalam arti luas yakni hubungan baik dan interaksi antara guru dengan guru, guru dengan anak didik, guru dengan pegawai, pegawai dengan anak didik. Dengan demikian akan dituntut adanya keterlibatan semua pihak di dalam lembaga kependidikan sehingga dapat menunjang berhasilnya proses pembelajaran.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan
- Sesuai dengan tripusat pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat), maka orang tua dan masyarakat ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, guru harus juga membina hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat agar dapat menjalankan tugas sebagai pelaksana pembelajaran.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guru harus selalu meningkatkan mutu profesinya, baik dilaksanakan secara individu ataupun secara bersama-sama. Hal ini sangat

penting, karena baik-buruknya layanan akan memengaruhi citra guru di tengah-tengah masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu profesi guru dapat dilakukan:

- a. Secara individu, dilakukan dengan cara:
 - Menekuni dan mempelajari secara kontinu pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan teknik atau proses pembelajaran secara umum.
 - Mendalami spesialisasi bidang studi yang diajarkan.
 - Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesiannya.
 - Mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan pengajaran.
 - Melakukan supervisi dialog dan konsultasi dengan guru-guru senior dan berpengalaman.
 - b. Secara bersama-sama, dilakukan dengan cara:
 - Mengikuti berbagai bentuk penataran dan lokakarya.
 - Mengikuti program pembinaan keprofesian secara khusus.
 - Mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi dan saling tukar pikiran dengan teman sejawat terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial

Kerja sama dan pembinaan hubungan antarguru di lingkungan tempat kerja, merupakan upaya yang penting. Karena dengan pembinaan kerja sama antarguru di lingkungan kerja akan dapat meningkatkan kelancaran mekanisme kerja, bahkan juga sebagai langkah-langkah peningkatan mutu profesi guru secara kelompok. Bersamaan dengan itu guru juga perlu membina hubungan dengan sesama guru secara keseluruhan termasuk guru-guru di luar lingkungan tempat kerja. Hal ini dapat memberi masukan dan menambah pengalaman guru, karena mungkin perkembangan di suatu daerah berbeda dengan perkembangan di daerah lainnya.

8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian

Di Indonesia wadah atau organisasi profesi guru adalah PGRI, di dalam organisasi ini guru dapat memperjuangkan segala hal terkait dengan keprofesiannya dan sekaligus sarana bagi guru dalam melaksanakan pengabdian. Oleh karena itu, organisasi profesional ini maka guru secara bersama-sama terus memelihara dan meningkatkan mutu melalui berbagai program yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan mutu organisasi profesional itu di samping untuk melindungi kepentingan guru juga sebagai wadah kegiatan dan peningkatan mutu profesionalisme guru.

9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan

Guru sebagai bagian dari warga Negara Republik Indonesia yang berperan dan berfungsi melaksanakan tugas-tugasnya dalam bidang kependidikan maka tidak terlepas dari kewajiban untuk mematuhi segala hal terkait dengan kebijakan pemerintah khususnya kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi guru dalam pendidikan. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah hendaknya dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan keikhlasan yang besar dengan tentunya tidak melupakan upaya inovasi dan kreativitas guru itu sendiri. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Guru harus memahami secara tepat, maksud dan arah kebijaksanaan pendidikan agar dapat mengambil langkah-langkah secara tepat.
- b. Guru harus terus-menerus meningkatkan profesi dan kesadaran guru untuk memenuhi hakikat keprofesiannya.
- c. Dilakukan penilaian, pengawasan dan sanksi objektif dan rasional.
- d. Pemangku kebijakan harus bersifat terbuka dalam upaya menerjemahkan setiap kebijakan pendidikan yang diputuskan.

Di samping 9 (sembilan) kode etik di atas, di dalam rumusan kode etik guru Indonesia pada Pasal 6 diatur hubungan guru dengan peserta didik, hubungan guru dengan orang tua/wali siswa, hubungan

guru dengan masyarakat, hubungan guru dengan sekolah, hubungan guru dengan profesi, hubungan guru dengan organisasi profesinya, dan hubungan guru dengan pemerintah.

1. Hubungan guru dengan peserta didik
 - a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
 - b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah dan anggota masyarakat.
 - c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
 - d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
 - e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
 - f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
 - g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat memengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
 - h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
 - i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
 - j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
 - k. Guru berperilaku taat kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.

- l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
 - m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dan kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan.
 - n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
 - o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral dan agama.
 - p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
2. Hubungan guru dengan orang tua/wali siswa
 - a. Guru berusaha membina hubungan kerja sama yang efektif dan efisien dengan orang tua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - b. Guru memberikan informasi kepada orang tua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
 - c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua/walinya.
 - d. Guru memotivasi orang tua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
 - e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
 - f. Guru menjunjung tinggi hak orang tua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
 - g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

3. Hubungan guru dengan masyarakat
 - a. Guru menjalin komunikasi dan kerja sama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
 - b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
 - c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
 - d. Guru bekerja sama secara adil dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
 - e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
 - f. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
 - g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
 - h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan masyarakat.
4. Hubungan guru dengan sekolah
 - a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
 - b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - c. Guru menciptakan dan melaksanakan proses yang kondusif.
 - d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.
 - e. Guru menghormati rekan sejawat.
 - f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
 - g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.

- h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
 - i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
 - j. Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
 - k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
 - l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
 - m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
 - n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya.
 - o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
 - q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
5. Hubungan guru dengan profesi
- a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
 - b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan.

- c. Guru terus-menerus meningkatkan kompetensinya.
 - d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
 - e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
 - f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
 - g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
 - h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.
6. Hubungan guru dengan organisasi profesinya
- a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
 - b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
 - c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
 - d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
 - e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
 - f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
 - g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dan organisasi profesinya.

- h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Hubungan guru dengan pemerintah
- a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Guru dan Dosen dan ketentuan Perundang-undangan lainnya.
 - b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.
 - c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan serta persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
 - e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

Dokumen kode etik guru Indonesia juga memaparkan sumpah/janji guru Indonesia sebagaimana tertera pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pada Pasal 3 berbunyi:

1. Setiap guru harus mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat dalam kode etik guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
2. Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.
3. Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Pada Pasal 4 dinyatakan:

1. Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kode etik guru Indonesia.

2. Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas.

Naskah sumpah guru Indonesia sebagai berikut.

Demi Allah (diucapkan sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing), sebagai guru Indonesia saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan:

1. Membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya.
2. Melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia.
3. Melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru.
4. Melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan.
5. Menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila.
6. Menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia.
7. Berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional.
8. Berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar kependidikan.
9. Memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih pada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia.
10. Menjalin kerja sama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia.
11. Berusaha untuk menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik dan masyarakat.
12. Menghormati, menaati dan mengamalkan kode etik guru Indonesia.

Selanjutnya di dalam dokumen kode etik guru Indonesia yang disusun oleh PGRI terdapat diktum terkait dengan pelanggaran dan sanksi kode etik. Pada Pasal 8 dinyatakan:

1. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.
2. Guru yang melanggar kode etik guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Pasal 9 kode etik guru Indonesia membicarakan tentang sanksi sebagai berikut.

1. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran kode etik guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
2. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
3. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
5. Siapa pun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi, atau pejabat yang berwenang.
6. Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

D. Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik Guru

Kode etik profesi guru yang dipaparkan di atas bukanlah sekadar pajangan atau etalase pernyataan saja. Terdapat upaya yang dilakukan

guru secara internal maupun organisasi profesi secara eksternal untuk meningkatkan pelaksanaan kode etik profesi guru tersebut. Dalam hal ini Pidarta (1997: 276-277) menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan kode etik guru sebagai berikut.

1. Guru diberi kesempatan seluas-luasnya, selama mereka mampu untuk studi lanjut S2 atau S3. Dengan menimba ilmu lebih banyak serta meningkatkan sikap dan pribadinya sebagai pendidik, diharapkan kode etik guru tersebut lebih disadari keharusannya untuk ditaati dan dilaksanakan.
2. Membangun perpustakaan pendidik di lembaga-lembaga pendidikan yang belum memiliki perpustakaan seperti itu. Perpustakaan ini disiapkan untuk pendidik yang tidak memiliki kesempatan studi lanjut. Guru dapat belajar secara mandiri lewat buku-buku di perpustakaan tersebut untuk meningkatkan profesinya dan menyadarkan dirinya akan pentingnya etika guru untuk dilaksanakannya.
3. Meningkatkan kesejahteraan guru. Guru yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi cenderung tidak menghiraukan kode etik jabatannya. Kondisi ekonomi guru saat ini sudah diperhatikan pemerintah melalui program sertifikasi guru. Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan guru maka sangatlah memungkinkan pelaksanaan kode etik guru dapat ditingkatkan.
4. Sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan guru, kerja sama lembaga pendidikan dengan orang tua dan masyarakat perlu ditingkatkan. Melalui kerja sama tersebut lebih memungkinkan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan tambahan, sehingga dengan dana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang sekaligus bermuara pada peningkatan kode etik guru itu sendiri.
5. Sistem penilaian kinerja guru perlu dibenahi dan ditingkatkan dan yang terpenting adalah pengawasan kinerja guru dilakukan secara efektif dan efisien, termasuk dalam melaksanakan kode etik guru.
6. Mengintensifkan pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh lembaga pendidikan itu sendiri (kepala sekolah, pengawas, ataupun yayasan), khususnya dalam mengarahkan pengawasan pada praktik kode etik yang dilakukan oleh guru di sekolah masing-masing,

sehingga jika terjadi penyimpangan maka dapat dideteksi sedini mungkin untuk segera diperbaiki. Melalui cara ini secara bertahap kode etik guru dapat ditegakkan.

7. Untuk guru yang telah yang melanggar kode etik dan sudah tidak dapat diberi nasihat atau teguran lisan maka kiranya dapat diambil tindakan kelas dengan menerapkan sanksi kepada guru sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kode etik tersebut.



BAB 4

KOMPETENSI GURU

A. Pengertian

Kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris “*competency*” yang bermakna kecakapan, kompetensi dan kewenangan. Kata kompetensi diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan. Dalam pengertian luas kompetensi adalah setiap cara yang digunakan dalam pelajaran yang ditunjukkan untuk mencapai kompetensi adalah untuk mengembangkan manusia yang bermutu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana disyaratkan.

Spencer dan Spencer memandang kompetensi sebagai karakteristik yang menonjol dari seorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dan/atau superior dalam suatu pekerjaan atau situasi. Selanjutnya Guiton mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan mengindikasikan cara-cara berperilaku atau berpikir, dalam segala situasi dan berlangsung terus dalam periode waktu yang lama (Uno, 2008: 78)

Johnson sebagaimana dikutip Usman (2002: 14) menjelaskan kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku

guru yang tampak sangat berarti. Selanjutnya McShane dan Glinow sebagaimana dikutip Yamin dan Maisah (2007: 1) menjelaskan kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, bakat, nilai-nilai, pengaruh dan karakteristik pribadi lainnya yang mendorong ke arah performansi unggul.

Majid (2005: 5) menjelaskan kompetensi adalah seperangkat tindakan intelijen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat intelijen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.

Kompetensi dalam Wikipedia (2011: 1) bermakna sesuatu yang distandarkan sebagai persyaratan seorang individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan spesifik. Kompetensi yang dimaksud meliputi kombinasi yang memanfaatkan *knowledge, skills dan behavior* untuk meningkatkan performan. Hal senada dijelaskan Amini (2013: 85) bahwa kompetensi merupakan paduan antara pengetahuan, keterampilan, dan penerapan pengetahuan serta keterampilan tersebut dalam melaksanakan tugas di lapangan pekerjaan.

Kenezovich sebagaimana dikutip Yamin dan Maisah (2010: 6) menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan-kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan tersebut merupakan hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa pengetahuan, keterampilan, kecerdasan dan lain-lain yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan organisasi.

Mulyasa (2007: 25) mengutip Broke dan Stone menjelaskan kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sebagaimana dikutip Yamin dan Maisah (2007: 7) menjelaskan kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Kompetensi dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia menurut Gilley dan Enggland sebagaimana dikutip Yamin dan Maisah (2010: 2) adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sehingga membolehkan ia untuk mengisi suatu peran. Kompetensi

juga merupakan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi kunci untuk menghasilkan *output* dari suatu pelatihan dan pengembangan peran mereka.

Kreitner dan Kinicki sebagaimana dikutip Yamin dan Maisah (2010: 2) memaknai kompetensi dari perspektif perbedaan individu yang dihubungkan dengan prestasi yaitu ciri yang luas dan karakteristik tanggung jawab yang stabil pada tingkat prestasi yang maksimal berlawanan dengan kompetensi kerja mental maupun fisik. Kompetensi adalah karakteristik stabil yang berkaitan dengan kemampuan fisik dan mental maksimum seseorang dan keterampilan adalah kapasitas khusus untuk memanipulasi objek secara fisik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memaparkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

B. Standar Kompetensi Guru

Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan (Majid, 2005: 6).

Mulyasa (2007: 31-32) menyatakan standar kompetensi suatu spesifikasi teknis kompetensi yang dibakukan yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masa kini dan masa mendatang untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Standar kompetensi guru menurut Suwardi (2008: 8) memiliki 3 (tiga) komponen yaitu: (1) komponen pengelolaan pembelajaran, (2) komponen pengembangan potensi, dan (3) komponen penguasaan akademik. Selain ketiga komponen kompetensi tersebut, guru sebagai pribadi yang utuh harus juga memiliki sikap dan kepribadian yang positif, di mana sikap dan kepribadian tersebut senantiasa mendasari komponen kompetensi yang menunjang potensi guru.

Hal senada dengan pernyataan di atas, Majid (2005: 6) menjelaskan 3 (tiga) komponen kompetensi yaitu:

1. Komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran yang mencakup:
 - a. Penyusunan perencanaan pembelajaran.
 - b. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar.
 - c. Penilaian prestasi belajar peserta didik.
 - d. Pelaksanaan tindakan lanjut hasil penilaian.
2. Komponen kompetensi pengembangan potensi yang diorientasikan pada pengembangan profesi.
3. Komponen kompetensi penguasaan akademik yang mencakup: (a) pemahaman wawasan kependidikan, dan (b) penguasaan bahan kajian akademik.

Detailnya mengenai standar kompetensi yang disebutkan Majid di atas dipaparkan sebagai berikut.

1. Kompetensi pengelolaan pembelajaran
 - a. Penyusunan rencana pembelajaran
 - Mampu mendeskripsikan tujuan/kompetensi pembelajaran.
 - Mampu memilih/menentukan materi.
 - Mampu mengorganisir materi.
 - Mampu menentukan metode/strategi pembelajaran.
 - Mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran.
 - Mampu menyusun perangkat penilaian.
 - Mampu menentukan teknik penilaian.
 - Mampu mengalokasikan waktu.
 - b. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar
 - Mampu membuka pelajaran.
 - Mampu menyajikan materi.
 - Mampu menggunakan metode/media.
 - Mampu menggunakan alat peraga.
 - Mampu menggunakan bahasa yang komunikatif.
 - Mampu memotivasi siswa.
 - Mampu mengorganisasi kegiatan.

- Mampu berinteraksi dengan siswa secara komunikatif.
 - Mampu menyimpulkan pembelajaran.
 - Mampu memberikan umpan balik.
 - Mampu melaksanakan penilaian.
 - Mampu menggunakan waktu.
- c. Penilaian prestasi belajar peserta didik
- Mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran.
 - Mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda.
 - Mampu memperbaiki soal yang tidak valid.
 - Mampu memeriksa soal.
 - Mampu mengklasifikasikan hasil-hasil penilaian.
 - Mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian.
 - Mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian.
 - Mampu menentukan korelasi antara soal berdasarkan hasil penilaian.
 - Mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil penilaian.
 - Mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas dan logis.
- d. Pelaksanaan tindakan lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik
- Menyusun program tindak lanjut hasil penilaian.
 - Mengklasifikasikan kemampuan siswa.
 - Mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian.
 - Melaksanakan tindak lanjut.
 - Mengevaluasi hasil tindak lanjut.
 - Menganalisis hasil evaluasi program tindakan lanjut hasil penilaian.
2. Kompetensi pengembangan potensi
- a. Pengembangan profesi
- Mengikuti informasi perkembangan IPTEK yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah.

- Mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah.
 - Mengembangkan berbagai model pembelajaran.
 - Menulis makalah.
 - Menulis/menyusun diktat pelajaran.
 - Menulis buku pelajaran.
 - Menulis modul.
 - Menulis karya ilmiah.
 - Melakukan penelitian ilmiah.
 - Menemukan teknologi tepat guna.
 - Membuat alat peraga/media.
 - Menciptakan karya seni.
 - Mengikuti pelatihan terakreditasi,
 - Mengikuti pendidikan kualifikasi.
 - Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.
3. Kompetensi penguasaan akademik
- a. Pemahaman wawasan
 - Memahami visi dan misi.
 - Memahami hubungan pendidikan dan pengajaran.
 - Memahami konsep pendidikan dasar dan menengah,
 - Memahami fungsi sekolah.
 - Mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil pendidikan.
 - Membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah.
 - b. Penguasaan bahan kajian akademik
 - Memahami struktur pengetahuan.
 - Menguasai substansi materi.
 - Menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa.

Selanjutnya paparan rinci terkait dengan standar kompetensi yang melekat pada diri seorang guru dijelaskan Sardiman (2003: 164-179) sebagai berikut.

1. Menguasai bahan

Guru yang tampil di depan kelas maka sebelumnya harus menguasai bahan yang dikontrakkan dan sekaligus bahan-bahan yang dapat mendukung jalannya pembelajaran. Melalui penguasaan bahan tersebut, guru akan dapat menyampaikan materi pembelajaran secara dinamis.

2. Mengelola program pembelajaran

Guru yang berkompeten harus mampu mengelola program pembelajaran terkait dengan kemampuan:

- a. Merumuskan tujuan pembelajaran.
- b. Mengenal dan dapat menggunakan proses pembelajaran yang tepat.
- c. Melaksanakan program pembelajaran.
- d. Mengenal kemampuan anak didik.
- e. Merencanakan dan melaksanakan program remedial.

3. Mengelola kelas

Guru dituntut mampu mengelola kelas yakni menyediakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya proses pembelajaran, misalnya mengatur tata ruang kelas dan menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas.

4. Menggunakan media/sumber

Terkait dengan kompetensi menggunakan media/sumber maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Mengenal, memilih dan menggunakan sesuatu media harus selektif karena dalam menggunakan suatu media harus mempertimbangkan komponen-komponen yang lain dalam proses pembelajaran misalnya apa materi dan bagaimana metodenya.
- b. Membuat alat-alat bantu pelajaran yang sederhana. Maksudnya agar mudah di dapat dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda.
- c. Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses pembelajaran.

- d. Menggunakan buku pegangan/buku sumber. Buku sumber perlu lebih dari satu dan kemudian ditambah buku-buku lain yang menunjang.
- e. Menggunakan perpustakaan dalam proses pembelajaran.
5. Menguasai landasan-landasan kependidikan
Guru diharapkan menguasai teori-teori dasar yang menjadi landasan dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran.
6. Mengelola interaksi pembelajaran
Berdasarkan lima kompetensi yang disampaikan di atas merupakan kompetensi yang harus melekat pada diri guru di dalam mengelola interaksi pembelajaran.
7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.
Guru harus memiliki kompetensi untuk menilai prestasi siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik evaluasi yang tepat.
8. Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah
Dalam tugas dan perannya di sekolah, guru juga harus mampu mengkondisikan dirinya sebagai pembimbing atau konselor. Oleh karena itu, guru harus mengenal fungsi dan program dan layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah agar pembelajaran bersama siswa menjadi lebih tepat dan produktif.
9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
Guru di sekolah di samping berperan sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing juga sebagai administrator. Dengan demikian maka guru harus mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, hal ini sebagai upaya pemuasan layanan terhadap siswa.
10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Di samping bertugas sebagai pendidik dan pembimbing anak didik dalam rangka pengabdianannya, maka guru juga harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian setidaknya guru hendaknya membaca dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian. Hal ini dalam rangka menumbuhkan penalaran dan mengembangkan proses pembelajaran.

Agung (2010: 18-20) menyatakan kompetensi yang harus dimiliki guru antara lain:

1. Kompetensi penguasaan bahan kajian (kompetensi profesional)
Salah satu ciri keberhasilan guru mendidik siswanya adalah membantu siswa mengembangkan nalarnya (pengetahuan) dan menguasai kecakapan tertentu. Oleh karena itu, penguasaan bahan kajian akademik oleh guru sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan dapat menjabarkan serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis (berpola), relevan dengan tujuan pembelajaran, selaras dengan perkembangan siswa, tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta informasi dan menyesuakannya dengan kondisi maupun fasilitas yang ada.
2. Kompetensi pengelolaan pembelajaran (kompetensi pedagogik)
Proses pembelajaran di kelas merupakan hal penting yang perlu diperhatikan agar pendidikan dan pengajaran dapat berhasil. Kompetensi dalam pengelolaan proses pembelajaran sering diabaikan dibanding dengan yang lain, padahal tidak mustahil kegagalan siswa disebabkan lemahnya pembelajaran. Di sisi lain kompetensi dalam pendidikan dan pengajaran dikatakan berhasil bila pembelajaran dikelola secara baik dan hasilnya tampak dari perubahan positif pada diri anak didik.
3. Kompetensi pengembangan diri (kompetensi personal/kepribadian)
Peningkatan kemampuan guru dapat dilakukan secara sistematis baik berdasarkan pembinaan secara struktural maupun dari prakarsa guru itu sendiri yang diselenggarakan melalui berbagai kegiatan seperti penataran, kursus, melanjutkan pendidikan, belajar sendiri dan lain sebagainya. Hal ini dapat terlaksana bila ada kemauan dalam diri guru untuk mengembangkan dirinya. Guru harus dapat mengikuti perkembangan yang secara terus-menerus terjadi, tekun serta cakap dalam belajar keilmuan guna mengembangkan karirnya, dan mampu bekerja sama dengan teman sejawat, atau narasumber untuk kepentingan pengayaan keilmuannya. Oleh karena itu, aspek pengembangan diri guru yang meliputi hal-hal di atas perlu dikaji dalam studi ini mengingat kemauan untuk mengembangkan diri merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan individu.

4. Kompetensi bermasyarakat (kompetensi sosial)

Kompetensi sosial diartikan sebagai kemampuan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali dan masyarakat sekitar.

Terkait dengan standar kompetensi, Usman (2002: 16-19) memaparkan dua kompetensi yang harus melekat pada diri seorang guru yaitu:

1. Kompetensi pribadi

Kompetensi pribadi meliputi:

a. Mengembangkan kepribadian

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa meliputi:
 - 1) Mengkaji ajaran agama yang dianut.
 - 2) Mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianut.
 - 3) Menghayati peristiwa yang mencerminkan sikap saling menghargai antarumat beragama.
- Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila meliputi:
 - 1) Mengkaji berbagai ciri manusia Pancasila.
 - 2) Mengkaji sifat-sifat kepatriatan bangsa Indonesia.
 - 3) Menghayati kontribusi patriot dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
 - 4) Membiasakan diri menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
 - 5) Mengkaji hubungan manusia dengan lingkungan alamiah dan buatan.
 - 6) Membiasakan diri menghargai dan memelihara mutu lingkungan hidup.
- Mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru meliputi:
 - 1) Mengkaji sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki guru.
 - 2) Membiasakan diri menerapkan sifat-sifat sabar, demokratis, menghargai pendapat orang lain, sopan santun dan tanggap terhadap pembaharuan.

- b. Berinteraksi dan berkomunikasi
- Berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional meliputi:
 - 1) Mengkaji struktur organisasi.
 - 2) Mengkaji hubungan kerja profesional.
 - 3) Berlatih menerima dan memberikan balikan.
 - 4) Membiasakan diri mengikuti perkembangan profesi.
 - Berinteraksi dengan masyarakat untuk penunjaian misi pendidikan meliputi:
 - 1) Mengkaji berbagai lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pendidikan.
 - 2) Berlatih menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan yang menunjang usaha pendidikan.
- c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan
- Membimbing siswa mengalami kesulitan belajar meliputi:
 - 1) Mengkaji konsep-konsep dasar bimbingan.
 - 2) Berlatih mengenal kesulitan belajar siswa.
 - 3) Berlatih memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar.
 - Membimbing siswa yang berkelainan dan berbakat khusus meliputi:
 - 1) Mengkaji ciri-ciri anak berkelainan dan berbakat khusus.
 - 2) Berlatih mengenal anak berkelainan dan berbakat khusus.
 - 3) Berlatih menyelenggarakan kegiatan untuk anak berkelainan dan berbakat khusus.
- d. Melaksanakan administrasi sekolah
- Mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah meliputi:
 - 1) Mengkaji berbagai jenis dan sarana administrasi.
 - 2) Mengkaji pedoman administrasi pendidikan.
 - Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah meliputi:

- 1) Berlatih membuat dan mengisi berbagai format administrasi sekolah.
 - 2) Berlatih menyelenggarakan administrasi sekolah.
- e. Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pembelajaran
- Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah meliputi:
 - 1) mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah yang sederhana.
 - 2) Memahami laporan penelitian sederhana untuk kepentingan pembelajaran.
 - Melaksanakan penelitian sederhana meliputi:
 - 1) Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pembelajaran.
 - 2) Membiasakan diri melakukan penelitian untuk keperluan pembelajaran.
2. Kompetensi profesional
- Kompetensi profesional meliputi:
- a. Menguasai landasan kependidikan.
 - b. Menguasai bahan pembelajaran.
 - c. Menyusun program pembelajaran.
 - d. Melaksanakan program pembelajaran.
 - Menciptakan iklim pembelajaran yang tepat
 - Mengatur ruang belajar meliputi:
 - 1) Mengkaji berbagai tata ruang belajar.
 - 2) Mengkaji kegunaan sarana dan prasarana kelas.
 - 3) Mengatur ruang belajar yang tepat.
 - Mengelola interaksi pembelajaran meliputi:
 - 1) Mengkaji cara-cara mengamati kegiatan pembelajaran.
 - 2) Dapat mengamati kegiatan pembelajaran.
 - 3) Menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar.
 - 4) Dapat menggunakan berbagai keterampilan dasar mengajar.

- 5) Dapat mengatur anak didik dalam kegiatan pembelajaran.
- e. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- Menilai prestasi anak didik untuk kepentingan pembelajaran meliputi:
 - 1) Mengkaji konsep dasar penilaian.
 - 2) Mengkaji berbagai teknik penilaian.
 - 3) Menyusun alat penilaian.
 - 4) Mengkaji cara mengolah dan menafsirkan data untuk menetapkan taraf pencapaian anak didik.
 - 5) Dapat menyelenggarakan penilaian pencapaian anak didik.
 - Menilai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan meliputi:
 - 1) Menyenggarakan penilaian untuk perbaikan proses pembelajaran.
 - 2) Dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan proses pembelajaran.

Di samping standar kompetensi terkait dengan profesi guru sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka guru juga harus memiliki standar-standar lainnya. Dalam hal ini Mulyasa (2007: 28) mencatat standar lain yang harus dimiliki guru adalah:

1. Standar mental
Guru harus memiliki mental yang sehat, mencintai, mengabdikan dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya.
2. Standar moral
Guru harus memiliki budi pekerti luhur dan sikap moral yang tinggi.
3. Standar sosial
Guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat lingkungannya.
4. Standar spiritual
Guru harus beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. yang diwujudkan dalam ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

5. Standar intelektual

Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional.

6. Standar fisik

Guru harus sehat jasmani, berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan diri peserta didik dan lingkungannya.

7. Standar psikis

Guru harus sehat rohani, artinya tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas profesionalnya.

C. Kompetensi Guru Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memaparkan bahwa kompetensi guru Indonesia meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Deskripsi detail terkait dengan kompetensi guru mulai dari guru Taman Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipaparkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sedangkan khusus untuk guru Bimbingan Konseling (BK) atau konselor dipaparkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Selanjutnya Kementerian Agama

juga menyusun standar kompetensi yang harus dimiliki guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada madrasah dan sekolah umum.

1. Standar Kompetensi Guru PAUD/TK/RA

a. Kompetensi Pedagogik

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
 - Memahami karakteristik peserta didik usia TK/PAUD yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, dan latar belakang sosial-budaya.
 - Mengidentifikasi potensi peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan.
 - Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan.
 - Mengidentifikasi kesulitan peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip bermain sambil belajar yang mendidik yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK/PAUD.
 - Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik bermain sambil belajar yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna, yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK/PAUD.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu
 - Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - Menentukan tujuan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - Menentukan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pengembangan.
 - Memilih materi kegiatan pengembangan yang mendidik yaitu kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan tujuan pengembangan.

- Menyusun perencanaan semester, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan di TK/PAUD.
 - Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik
- Memahami prinsip-prinsip perancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan.
 - Mengembangkan komponen-komponen rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan.
 - Menyusun rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, maupun di luar kelas.
 - Menerapkan kegiatan bermain yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna.
 - Menciptakan suasana bermain yang menyenangkan, inklusif, dan demokratis.
 - Memanfaatkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan pendekatan bermain sambil belajar.
 - Menerapkan tahapan bermain anak dalam kegiatan pengembangan di TK/PAUD.
 - Mengambil keputusan transaksional dalam kegiatan pengembangan di TK/PAUD sesuai dengan situasi yang berkembang.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
- Menyediakan berbagai kegiatan bermain sambil belajar untuk mendorong peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik

- Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
 - Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
 - Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
 - Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran
 - Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
 - Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

b. Kompetensi Kepribadian

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
 - Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
 - Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
 - Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan, dan akhlak mulia.
 - Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
- 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
 - Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
 - Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
 - Bekerja mandiri secara profesional.
- 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru

- Memahami kode etik profesi guru.
- Menerapkan kode etik profesi guru.
- Berperilaku sesuai dengan kode etik guru

c. Kompetensi Sosial

- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
 - Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
 - Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat
 - Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
 - Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
 - Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya
 - Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.
 - Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain

- Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
- Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

d. Kompetensi Profesional

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
 - Menguasai konsep dasar matematika, sains, bahasa, pengetahuan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, kesehatan dan gizi sebagai sarana pengembangan untuk setiap bidang pengembangan anak TK/PAUD.
 - Menguasai penggunaan berbagai alat permainan untuk mengembangkan aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, nilai moral, sosial budaya, dan bahasa anak TK/PAUD.
 - Menguasai berbagai permainan anak.
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
 - Memahami kemampuan anak TK/PAUD dalam setiap bidang pengembangan.
 - Memahami kemajuan anak dalam setiap bidang pengembangan di TK/PAUD.
 - Memahami tujuan setiap kegiatan pengembangan.
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
 - Memilih materi bidang pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
 - Mengolah materi bidang pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
 - Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus.

- Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
 - Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

2. Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI

a. Kompetensi Pedagogik

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
 - Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
 - Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
 - Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI.

- Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu
 - Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
 - Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
 - Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI.
 - Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
 - 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
 - Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
 - Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
 - Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.
 - Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
 - Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.
 - 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
 - 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
 - Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk

mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.

- Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
- Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
 - Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran.
 - Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
 - Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.

- Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran
- Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
 - Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.

b. Kompetensi Kepribadian

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
 - Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
 - Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
 - Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.

- 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
 - Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
 - Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
 - Bekerja mandiri secara profesional.
- 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru
 - Memahami kode etik profesi guru.
 - Menerapkan kode etik profesi guru.
 - Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.

c. Kompetensi Sosial

- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
 - Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
 - Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat
 - Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
 - Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
 - Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya

- Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.
 - Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain
- Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
 - Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

d. Kompetensi Profesional

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu

Bahasa Indonesia

- Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa.
- Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.
- Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis).
- Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
- Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif.

Matematika

- Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika.

- Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.
- Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
- Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.

IPA

- Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.
- Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.

IPS

- Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.
- Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.
- Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.
- Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.

PKn

- Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.
- Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.

- Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.
 - Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
 - Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI.
 - Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI.
 - Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.
 - 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
 - Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
 - Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
 - 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
 - Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus.
 - Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
 - Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
 - 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

3. Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK/MAK

a. Kompetensi Pedagogik

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
 - Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
 - Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
 - Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
 - Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
 - Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
 - Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu
 - Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.
 - Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.
 - Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
 - Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
 - Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.

- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
 - Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
 - Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
 - Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
 - Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.
 - Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
 - Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
 - Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.
 - Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
 - Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.
 - Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari:

- a) Penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh.
 - b) Ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian.
 - c) Respons peserta didik terhadap ajakan guru.
 - d) Reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
 - Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
 - Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
 - Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
 - Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

- Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.
- Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

b. Kompetensi Kepribadian

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Nasional Indonesia
 - Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
 - Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan Nasional Indonesia yang beragam.
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
 - Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
 - Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
- 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
 - Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
 - Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
 - Bekerja mandiri secara profesional.
- 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru
 - Memahami kode etik profesi guru.

- Menerapkan kode etik profesi guru.
- Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.

c. Kompetensi Sosial

- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
 - Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
 - Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat
 - Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
 - Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
 - Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya
 - Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik.
 - Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
 - Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.

- Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.

d. Kompetensi Profesional

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
 - a) Guru mata pelajaran pendidikan agama pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK*
 - (1) Kompetensi guru pendidikan agama Islam
 - Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam.
 - Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam.
 - (2) Kompetensi guru pendidikan agama Kristen
 - Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen.
 - Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen.
 - (3) Kompetensi guru pendidikan agama Katolik
 - Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Katolik.
 - Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Katolik.
 - (4) Kompetensi guru pendidikan agama Hindu
 - Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Hindu.

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Hindu.
- (5) Kompetensi guru pendidikan agama Buddha
- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Buddha.
 - Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Buddha.
- (6) Kompetensi guru pendidikan agama Konghucu
- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Konghucu.
 - Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Konghucu.
- b) Kompetensi guru mata pelajaran PKn pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
 - Memahami substansi pendidikan kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.
- c) Kompetensi guru mata pelajaran seni budaya pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK*
- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan (mencakup materi yang bersifat konsepsi, apresiasi, dan kreasi/rekreasi) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran seni budaya (seni rupa, musik, tari, teater) dan keterampilan.

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran seni budaya.
- d) Kompetensi guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan Kesehatan pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK
- Menjelaskan dimensi filosofis pendidikan jasmani termasuk etika sebagai aturan dan profesi.
 - Menjelaskan perspektif sejarah pendidikan jasmani.
 - Menjelaskan dimensi anatomi manusia, secara struktur dan fungsinya.
 - Menjelaskan aspek kinesiology dan kinerja fisik manusia.
 - Menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja latihan.
 - Menjelaskan aspek psikologi pada kinerja manusia, termasuk motivasi dan tujuan, kecemasan dan stress, serta persepsi diri.
 - Menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja diri, termasuk dinamika sosial; etika dan perilaku moral, dan budaya, suku, dan perbedaan jenis kelamin.
 - Menjelaskan teori perkembangan gerak, termasuk aspek-aspek yang memengaruhinya.
 - Menjelaskan teori belajar gerak, termasuk keterampilan dasar dan kompleks dan hubungan timbal balik di antara domain kognitif, afektif dan psikomotorik.
- e) Kompetensi guru mata pelajaran matematika pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
- Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan.
 - Menggunakan pengukuran dan penaksiran.
 - Menggunakan logika matematika.
 - Menggunakan konsep-konsep geometri.
 - Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang.
 - Menggunakan pola dan fungsi.
 - Menggunakan konsep-konsep aljabar.

- Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik.
 - Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit.
 - Menggunakan trigonometri.
 - Menggunakan vektor dan matriks.
 - Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.
 - Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika.
- f) Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
- Mengoperasikan komputer personal dan periferalnya.
 - Merakit, menginstalasi, men-*setup*, memelihara dan melacak serta memecahkan masalah (*troubleshooting*) pada komputer personal.
 - Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek.
 - Mengolah kata (*word processing*) dengan komputer personal.
 - Mengolah lembar kerja (*spreadsheet*) dan grafik dengan komputer personal.
 - Mengelola pangkalan data (*database*) dengan komputer personal atau komputer server.
 - Membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah komunikasi visual dan interpersonal.
 - Membuat media grafis dengan menggunakan perangkat lunak publikasi.
 - Membuat dan memelihara jaringan komputer (kabel dan nirkabel).
 - Membuat dan memelihara situs laman (*web*).
 - Menggunakan sarana telekomunikasi (*telephone, mobilephone, faximile*).
 - Membuat dan menggunakan media komunikasi, termasuk pemrosesan gambar, audio dan video.

- Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam disiplin atau materi pembelajaran lain dan sebagai media komunikasi.
 - Mendesain dan mengelola lingkungan pembelajaran/ sumber daya dengan memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan.
 - Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung pembelajaran.
 - Memahami EULA (*End User Licence Agreement*) dan keterbatasan serta keluasan penggunaan perangkat lunak secara legal.
- g) Kompetensi guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada SMP/MTs
- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA serta penerapannya secara fleksibel.
 - Memahami proses berpikir IPA dalam mempelajari proses dan gejala alam.
 - Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam.
 - Memahami hubungan antarberbagai cabang IPA, dan hubungan IPA dengan matematika dan teknologi.
 - Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum alam sederhana.
 - Menerapkan konsep, hukum, dan teori IPA untuk menjelaskan berbagai fenomena alam.
 - Menjelaskan penerapan hukum-hukum IPA dalam teknologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
 - Memahami lingkup dan kedalaman IPA sekolah.
 - Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA.
 - Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium IPA sekolah.

- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, laboratorium.
 - Merancang eksperimen IPA untuk keperluan pembelajaran atau penelitian
 - Melaksanakan eksperimen IPA dengan cara yang benar.
 - Memahami sejarah perkembangan IPA dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.
- h) Kompetensi guru mata pelajaran biologi pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori biologi serta penerapannya secara fleksibel.
 - Memahami proses berpikir biologi dalam mempelajari proses dan gejala alam.
 - Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam/biologi.
 - Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antarkonsep) ilmu.
 - Biologi dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
 - Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum biologi.
 - Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika kimia dan matematika untuk menjelaskan/mendeskripsikan fenomena biologi.
 - Menjelaskan penerapan hukum-hukum biologi dalam teknologi yang terkait dengan biologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
 - Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah.
 - Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu biologi dan ilmu-ilmu yang terkait.
 - Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium biologi sekolah.
 - Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran biologi di kelas, laboratorium dan lapangan.

- Merancang eksperimen biologi untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
 - Melaksanakan eksperimen biologi dengan cara yang benar.
 - Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya biologi dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.
- i) Kompetensi guru mata pelajaran fisika pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori fisika serta penerapannya secara fleksibel.
 - Memahami proses berpikir fisika dalam mempelajari proses dan gejala alam.
 - Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam.
 - Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antarkonsep) ilmu.
 - Fisika dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
 - Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum fisika.
 - Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika untuk menjelaskan fenomena biologi, dan kimia.
 - Menjelaskan penerapan hukum-hukum fisika dalam teknologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
 - Memahami lingkup dan kedalaman fisika sekolah.
 - Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu fisika dan ilmu-ilmu yang terkait.
 - Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium fisika sekolah.
 - Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran fisika di kelas, laboratorium, dan lapangan.
 - Merancang eksperimen fisika untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
 - Melaksanakan eksperimen fisika dengan cara yang benar.

- Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya fisika dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.
- j) Kompetensi guru mata pelajaran kimia pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia yang meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel.
 - Memahami proses berpikir kimia dalam mempelajari proses dan gejala alam.
 - Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam/kimia.
 - Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antarkonsep) ilmu.
 - Kimia dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
 - Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum kimia.
 - Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika dan matematika untuk menjelaskan/mendeskripsikan fenomena kimia.
 - Menjelaskan penerapan hukum-hukum kimia dalam teknologi yang terkait dengan kimia terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
 - Memahami lingkup dan kedalaman kimia sekolah.
 - Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu yang terkait dengan mata pelajaran kimia.
 - Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium kimia sekolah.
 - Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia di kelas, laboratorium dan lapangan.
 - Merancang eksperimen kimia untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
 - Melaksanakan eksperimen kimia dengan cara yang benar.

- Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya kimia dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.
- k) Kompetensi guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada SMP/MTs
- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran IPS baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global.
 - Membedakan struktur keilmuan IPS dengan Ilmu-ilmu Sosial.
 - Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan dalam bidang IPS.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran IPS.
- l) Kompetensi guru mata pelajaran ekonomi pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran ekonomi.
 - Membedakan pendekatan-pendekatan ekonomi.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran ekonomi.
- m) Kompetensi guru mata pelajaran sosiologi pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami materi, struktur, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran sosiologi.
 - Memahami angkah-langkah kerja ilmuwan sosial.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran sosiologi.
- n) Kompetensi guru mata pelajaran antropologi pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran antropologi.
 - Membedakan jenis-jenis antropologi.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran Antropologi.

- o) Kompetensi guru mata pelajaran geografi pada SMA/MA, SMK/MAK
- Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi.
 - Membedakan pendekatan-pendekatan geografi.
 - Menguasai materi geografi secara luas dan mendalam.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi.
- p) Kompetensi guru mata pelajaran sejarah pada SMA/MA, SMK/MAK
- Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek Sejarah.
 - Membedakan pendekatan-pendekatan Sejarah.
 - Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sejarah.
- q) Kompetensi guru mata pelajaran bahasa Indonesia pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami konsep, teori, dan materi berbagai aliran linguistik yang terkait dengan pengembangan materi pembelajaran bahasa.
 - Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa.
 - Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.
 - Menguasai kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
 - Mengapresiasi karya sastra secara reseptif dan produktif.
- r) Kompetensi guru mata pelajaran bahasa asing
- (1) Kompetensi guru bahasa Inggris pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK
- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

- Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- (2) Kompetensi guru bahasa Arab pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Arab (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
 - Menguasai bahasa Arab lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- (3) Kompetensi guru bahasa Jerman pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Jerman (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
 - Menguasai bahasa Jerman lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- (4) Kompetensi guru bahasa Prancis pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Prancis (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
 - Menguasai bahasa Prancis lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- (5) Kompetensi guru bahasa Jepang pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Jepang (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
 - Menguasai bahasa Jepang lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- (6) Kompetensi guru bahasa Mandarin pada SMA/MA, SMK/MAK

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Mandarin (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
 - Menguasai bahasa Mandarin lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
 - Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu.
 - Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
 - Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
 - 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
 - Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
 - Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
 - 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
 - Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus.
 - Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
 - Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
 - 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

4. Standar Kompetensi Guru Bimbingan Konseling atau Konselor

a. Kompetensi Pedagogik

- 1) Menguasai teori dan praksis pendidikan
 - Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya.
 - Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran.
 - Menguasai landasan budaya dan praksis pendidikan.
- 2) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli
 - Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
 - Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
 - Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
 - Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberkatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
 - Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
- 3) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.
 - Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
 - Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.
 - Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta tinggi.

- a. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
- b. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
- c. Menguasai keilmuan, kajian kritis, dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
- d. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat.

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagai berikut.

- a. Pembelajaran PLPG diawali tes kemampuan awal sesuai bidang studi/mata pelajaran.
- b. PLPG diselenggarakan dengan bobot 90 Jam Pertemuan (JP), dengan alokasi 30 JP teori dan 60 JP praktik. Satu JP setara 50 menit. Distribusi alokasi waktu tersebut adalah:
 - 1) 4 JP teori untuk penyampaian materi pengembangan profesionalitas guru.
 - 2) 8 JP teori dan 12 JP praktik untuk penyampaian materi pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru.
 - 3) 10 JP teori dan 12 JP praktik untuk penyampaian materi model-mode pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi dan seni termasuk keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
 - 4) 4 JP teori dan 6 JP praktik untuk penyampaian materi penelitian tindakan kelas dan penulisan karya ilmiah.
 - 5) 30 JP praktik pelaksanaan pembelajaran (*peer teaching*).
 - 6) 4 JP teori untuk ujian tulis.
- c. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pemerintah.
- d. Materi PLPG yang disusun memperhatikan empat kompetensi guru yaitu pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial.

- e. Instruktur PLPG ditetapkan oleh ketua Rayon LPTK dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut.
- 1) Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada rayon LPTK penyelenggara sertifikasi. Dalam hal rayon LPTK tidak mempunyai bidang syudi yang relevan maka dapat meminta bantuan rayon lain.
 - 2) Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik serta sanggup melaksanakan tugas.
 - 3) Berpendidikan minimal S2 (dapat S1 dan S2 kependidikan, atau S1 kependidikan dan S2 nonkependidikan, atau S1 nonkependidikan dan S2 kependidikan. Khusus untuk guru bidang kejuruan, instruktur dapat berkualifikasi S1 dan S2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki akta V atau sertifikat *applied approach*.
 - 4) Memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun, khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki pengalaman menjadi konselor.
 - 5) Instruktur *peer teaching* diutamakan yang memiliki nomor induk asesor (NIA) dan memiliki pengalaman menjadi instruktur/narasumber/fasilitator pada bidang yang relevan.
- f. Pelaksanaan PLPG bertempat di LPTK atau di kabupaten/kota dengan memperhatikan kelayakannya (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran.
- g. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata pelajaran. Dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dari segi jumlah rombel dapat dilakukan berdasarkan rumpun bidang studi/mata pelajaran.
- h. Dalam satu rombel maksimal 30 orang peserta dan dalam satu kelompok *peer teaching* maksimal 10 peserta.
- i. Dalam proses pembelajaran, instruktur menggunakan multimedia dan multimetode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).
- j. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi yang mengukur kompetensi dasar peserta dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan

PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (praktik pembelajaran).

- k. Ujian tulis pada akhir PLPG dilaksanakan dengan pengaturan tempat duduk yang layak dan setiap 30 peserta diawasi oleh dua orang pengawas.
- l. Ujian praktik dilaksanakan terpadu dengan kegiatan *peer teaching* pada penampilan ketiga.
- m. Penentuan kelulusan peserta PLPG dilakukan secara objektif dan didasarkan pada rambu-rambu penilaian yang telah ditentukan.
- n. Peserta yang lulus mendapatkan sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali.
- o. Peserta yang belum lulus pada ujian ulang yang kedua diserahkan kembali ke dina pendidikan kabupaten/kota untuk dibina lebih lanjut.

Melalui PLPG diharapkan akan muncul guru yang sadar akan profesinya dan setiap saat mampu meningkatkan profesinya. Dikatakan demikian karena bekal yang peserta peroleh melalui PLPG akan mampu merangsang melakukan peningkatan keprofesionalannya secara terus-menerus.

3. Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan atau secara lengkap disebut dengan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Peserta belajar selama 2 (dua) semester di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan ini diutamakan adalah guru-guru yang memiliki prestasi dan memiliki keunggulan. Proses seleksinya dilakukan oleh LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah.

Secara umum tujuan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program sertifikasi jalur pendidikan bertujuan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya.
- b. Memantapkan kemampuan mengajar guru.

- c. Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional.
- d. Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.

Jalur pendidikan menerapkan sistem pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kemampuan guru peserta program sertifikasi yang mempersyaratkan pemahaman konsep-konsep yang mantap dan kemudian diterapkan dalam praktik. Dalam hal ini sistem pembelajaran tidak cukup menekankan pada segi apa, dan mengapa, tetapi pada segi bagaimana penerapannya. Dengan demikian proses pembelajaran dalam program ini perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Program pendidikan diselenggarakan selama-lamanya dua semester.
- b. Pengembangan bahan ajar dilakukan berdasarkan standar isi kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi setempat.
- c. Dalam proses pembelajaran, dosen mampu berperan sebagai model bagi guru sehingga peserta mendapat gambaran nyata tentang perilaku guru yang harus ditampilkan ketika mengajar.
- d. Kegiatan pembelajaran menerapkan pendekatan yang dapat melibatkan peserta didik dalam pemerolehan konsep dan makna materi kajian melalui pengalaman langsung dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan.
- e. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara bervariasi, sehingga memungkinkan terbentuknya dampak langsung dan dampak pengiring, seperti keterbukaan, kemampuan kerja sama, berpikir kritis, dan saling menghargai.
- f. Kegiatan pembelajaran memanfaatkan media dan sumber belajar yang dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik untuk memilih alternatif media dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih saat berada di sekolah.
- g. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka penuh waktu yang dilaksanakan di kampus induk, sedangkan kegiatan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dilakukan di sekolah mitra.

D. Urgensi Uji Kompetensi dalam Sertifikasi Guru

Uji kompetensi baik secara teoritis maupun praktis memiliki urgensi yang penting dalam program sertifikasi guru, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Pentingnya uji kompetensi dalam sertifikasi guru dikemukakan Mulyasa (2007: 192-194) sebagai berikut.

1. Alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru

Uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengembangkan standar kompetensi guru. Berdasarkan hasil uji dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana yang perlu ditingkatkan dan siapa guru yang perlu mendapatkan pembinaan secara kontinu, serta siapa guru yang telah mencapai standar kemampuan minimal.

2. Alat seleksi penerimaan guru

Pada saat ini telah banyak calon guru lulusan dari lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta yang antri menunggu pengangkatan. Banyaknya calon mengakibatkan perlunya seleksi untuk memilih guru sesuai dengan kebutuhan. Untuk kepentingan tersebut, perlu ditetapkan kriteria secara umum kompetensi-kompetensi dasar yang perlu dipenuhi sebagai syarat menjadi guru.

Kriteria calon guru merupakan pedoman penting bagi para administrator, dan pemerintah dalam memilih dan menentukan mana guru yang diperlukan untuk sekolah tertentu. Kriteria ini akan mendorong calon guru untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya, sehingga dapat diterima dan lolos uji kompetensi. Melalui uji kompetensi, diharapkan dapat terjaring guru-guru yang kompeten sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya.

Dengan uji kompetensi yang digunakan sebagai alat seleksi penerimaan guru baru dapat dilakukan secara profesional, tidak didasarkan atas suka-tidak suka, atau alasan subjektif lain, yang bermuara pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tetapi berdasarkan standar kompetensi yang objektif dan berlaku secara umum untuk semua calon guru. Jika uji kompetensi digunakan secara profesional dalam penerimaan guru baru, maka akan sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan, karena akan terjaring

guru-guru kompetensi dan siap melaksanakan tugasnya secara kreatif, profesional dan menyenangkan.

3. Pengelompokan guru

Hasil uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengelompokkan dan menentukan mana guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesional, tunjangan jabatan, dan penghargaan profesi serta guru yang tidak profesional yang tidak berhak menerimanya. Dalam hal ini, guru-guru dapat dikelompokkan berdasarkan hasil uji kompetensi misalnya kelompok tinggi, kelompok sedang dan kelompok kurang. Untuk kelompok kurang harus mendapat perhatian dan pembinaan agar dapat meningkatkan kompetensinya, karena jika dalam kurun waktu tertentu tidak dapat meningkatkan kompetensinya dan tidak lulus uji kompetensi maka mereka dapat diberhentikan sebagai guru, atau dialihfungsikan menjadi tenaga nonguru, misalnya tenaga administrasi.

4. Bahan acuan dalam pengembangan kurikulum

Keberhasilan pendidikan tercermin dalam kualitas pembelajaran dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini harus dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon guru atau calon tenaga kependidikan, karena keberhasilan tersebut terletak pada berbagai komponen dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan. Secara khusus keberhasilan lembaga pendidikan dalam mempersiapkan calon guru ditentukan oleh berbagai komponen dalam lembaga tersebut, antara lain kurikulum.

Oleh karena itu, kurikulum lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon guru harus dikembangkan berdasarkan kompetensi guru. Tujuan, program pendidikan, sistem pembelajaran dan evaluasi perlu direncanakan sedemikian rupa agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kompetensi guru. Melalui proses yang demikian, diharapkan guru mampu menjalankan tugasnya dengan tenang dan menyenangkan, karena apa yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah dipersiapkan sejak dalam pendidikan melalui kurikulum lembaga pendidikan.

5. Alat pembinaan guru

Untuk memperoleh guru yang ideal seperti yang diharapkan peserta didik, maka perlu ditetapkan jenis kompetensi yang perlu dibenahi

sebagai syarat agar seseorang dapat diterima menjadi guru. Dengan adanya syarat yang menjadi kriteria calon guru, maka akan terdapat pedoman bagi para administrator dalam memilih, menseleksi dan menempatkan guru sesuai dengan karakteristik dan kondisi, serta jenjang sekolah.

Asumsi yang mendasari kriteria ini adalah bahwa setiap calon guru yang memenuhi syarat diharapkan berhasil dalam mengemban tugas dan fungsinya, serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, pemilihan atau seleksi guru tidak dilakukan berdasarkan atas suka – tidak suka, atau karena alasan yang bersifat subjektif, melainkan dilakukan guru secara objektif dan berlaku secara umum untuk semua calon guru.

6. Mendorong kegiatan dan hasil belajar

Kegiatan belajar dan hasil belajar peserta didik tidak saja ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, uji kompetensi guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal, karena guru yang teruji kompetensinya akan senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan kebutuhan dan pembelajaran.

Guru yang teruji kompetensinya akan lebih mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan (PAIKEM), sehingga mampu mengembangkan potensi seluruh peserta didiknya secara optimal. Dengan demikian, uji kompetensi guru merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan terhadap setiap guru dan calon guru. Hal ini penting, terutama untuk mempersiapkan guru kreatif, profesional, dan menyenangkan.

E. Efek Rantai Sertifikasi

Proses sertifikasi guru menuju profesionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan efek kepada kenaikan kesejahteraan, sistem rekrutmen, pendidikan dan pembinaan guru, dan peningkatan karir guru.

1. Kenaikan kesejahteraan

Berkaitan dengan kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan insentif yang diperoleh. Gaji guru di Indonesia masih relatif

rendah, rendahnya kesejahteraan guru bisa memengaruhi kinerja guru, semangat pengabdianya dan juga upaya mengembangkan profesionalismenya. Kenaikan gaji dilakukan bersamaan dengan perbaikan pada aspek-aspek kesejahteraan lain yaitu prosedur kenaikan pangkat, jaminan rasa aman, kondisi kerja, kepastian karir, penghargaan terhadap tugas atau peran keguruan.

Tunjangan fungsional yang merupakan insentif bagi guru sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. Kesulitan tempat bertugas.
- b. Kemampuan, keterampilan dan kreativitas guru.
- c. Fungsi, tugas dan peranan guru di sekolah.
- d. Prestasi guru dalam mengajar, menyiapkan bahan ajar, menulis, meneliti dan membimbing, serta berhubungan dengan stakeholder. Dalam hal ini guru perlu diberi kesempatan bersaing untuk memperoleh penghargaan berbentuk insentif.

2. Sistem rekrutmen

Sistem rekrutmen guru dan penempatannya memerlukan kebijakan yang tepat mengingat banyak calon guru yang sering memilih tugas ditempat yang diinginkannya. Dalam hal rekrutmen dan penempatan perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Asal tempat calon guru.
- b. Memperketat persyaratan calon guru yang diangkat dengan melihat hasil pendidikan dan seleksi.
- c. Menetapkan batas waktu tugas untuk bisa mengajukan mutasi atau pindah.
- d. Memberikan insentif dan jaminan lain bagi calon guru yang ditempatkan di daerah terpencil.
- e. Memperkuat disiplin di tempat tugas dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar.
- f. Memintakan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat untuk menjamin kesejahteraan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan guru, terutama guru yang berasal dari daerah lain.
- g. Untuk mengisi kekurangan guru sebaliknya memberdayakan lulusan yang ada di tempat tersebut.

3. Pendidikan dan pembinaan guru

Pendidikan dan pembinaan tenaga guru dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, dan pendidikan akta mengajar.

a. Pembinaan calon guru melalui pendidikan prajabatan memerlukan pertimbangan sebagai berikut.

- Peningkatan mutu pelayanan akademik pada lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) yang meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sarana/prasarana.
- Seleksi calon yang ketat dalam hal inteligensi, latar belakang, sifat dan sikap pribadi.
- Pendidikan guru yang dapat menjamin mutu penguasaan ilmu-ilmu pendidikan, keguruan, psikologi dan ilmu bidang khusus yang menjadi spesialisasinya serta penguasaan praktik mengajar.
- Calon guru harus dapat menguasai ilmu dan keterampilan meneliti, menulis, membaca, sosial, budaya dan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Untuk mampu mengikuti perkembangan maka calon guru harus trampil menggunakan komputer, familiar dengan perpustakaan, olahraga dan kesenian.
- Calon guru minimal satu tahun mengalami hidup dalam asrama untuk membina pemahaman kerja sama, sikap hidup bersama, dan terutama mampu menyelami dan menghargai sifat dan watak yang berbeda-beda.

b. Pembinaan guru melalui program dalam jabatan biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga pelatihan, dinas pendidikan maupun organisasi profesi seperti persatuan guru Republik Indonesia (PGRI). Untuk membina karir guru melalui pelatihan dalam jabatan ini perlu dikembangkan:

- Program yang tidak mengganggu tugas guru.
- Pelatihan-pelatihan jangka pendek yang baik dan praktis mengenai metode/strategi mengajar, manajemen, kepemimpinan, pengembangan keilmuan maupun keterampilan lainnya yang harus dikuasai guru, penelitian dan penulisan.

- Sebaiknya tiap enam bulan atau satu tahun diadakan evaluasi kinerja guru, dan hasil evaluasi itu ditindak lanjuti dengan mengembangkan pelatihan dalam jabatan, dengan menerapkan peningkatan mutu berbasis sekolah.
 - Setiap peningkatan mutu selayaknya mendapat dukungan dana dari pusat, daerah dan stakeholder. Oleh sebab itu, perlu digalakkan program pembinaan dalam jabatan yang kontiniu baik di sekolah, luar sekolah, antarsekolah, antarbidang dan dalam bidang studi.
 - Khusus pembinaan peningkatan guru sekolah melalui Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang belajar jarak jauh perlu ada biaya dari pusat dan daerah.
- c. Pembinaan calon guru melalui akta mengajar bagi lulusan diploma dan sarjana non keguruan. Dalam hal ini perlu dilakukan seleksi sebelum mereka mengikuti akta mengajar, sehingga profesi guru bukan tempat pelarian untuk mencari kerja.
4. Peningkatan karir guru
- Pengembangan karir guru terkait dengan profesionalisme dan daya tarik jabatan guru memerlukan kebijakan sebagai berikut.
- a. Menumbuhkembangkan kesadaran guru terhadap kode etik sebagai guru yang profesional, serta mencintai tugasnya dan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya.
 - b. Menyederhanakan prosedur dan birokrasi penilaian kenaikan jabatan fungsional guru.
 - c. Beban yang tidak terkait dengan fungsi dan tugas guru sebaiknya dihilangkan karena akan mengganggu perhatian guru pada tugas pokoknya.
 - d. Pengangkatan kepala sekolah/madrasah perlu dilakukan melalui seleksi yang ketat dan adil, mempertimbangkan latar belakang mental dan prestasi kerja, serta melibatkan lembaga profesi.
 - e. Pengawasan kepada semua jenjang pendidikan harus dilaksanakan secara teratur, terkendali dan terus-menerus dengan menggunakan paradigma penilaian yang akademik.

Selanjutnya apabila ditinjau dalam ruang lingkup manajemen dapat dimaknai bahwa program sertifikasi guru sebagai cara yang praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik. Dengan sertifikasi maka keuntungan yang diperoleh antara lain mutu, komitmen, gagasan, dan sebagainya. Sertifikasi yang dilakukan akan memunculkan kecakapan baru yang meliputi:

1. Membuat mampu (*enabling*), di mana segala sumber daya yang diperlukan dapat diberdayakan secara penuh. Sumber-sumber daya itu mencakup waktu, personel, uang dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Memperlancar (*facilitating*), dalam kaitan ini dituntut untuk meniadakan halangan, rintangan dan penundaan yang menghalangi pekerjaan sebaik-baiknya. Secara organisasional biasanya halangan dan rintangan tersebut berupa sistem dan prosedur. Hal ini bisa dimengerti mengingat sistem dan prosedur merupakan salah satu alat manajemen untuk melakukan pengendalian. Dengan demikian memperlancar berarti memperhatikan apa yang perlu dilakukan oleh orang yang diberdayakan, lalu menyediakan jalan selapang mungkin.
3. Berkonsultasi (*consulting*), dalam kaitan ini yang diberdayakan tidak saja berkaitan dengan kegiatan sehari-hari melainkan juga menyangkut masalah-masalah strategis. Konsultasi tersebut tidak terbatas hanya pada pendapat dan gagasan saja. Bisa juga dengan menyediakan kotak saran. Melalui upaya ini diharapkan akan saling mengisi kekurangan masing-masing pihak.
4. Kerja sama (*collaborating*), di mana lembaga pendidikan dan *stakeholder* pendidikan hendaknya melakukan kerja sama dari setiap program pembedayaan. Hanya dengan kerja sama bebas, terbuka, dan penuh, seluruh kekayaan, kecakapan dan pengetahuan dalam organisasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kerja sama juga merupakan ujian akhir yang akan membuktikan tidak hanya seberapa besar kecakapan manajer dalam pemberdayaan, melainkan juga seberapa kuat kemampuan melaksanakannya secara penuh.

Namun hal itu tidak berarti manajer tidak mampu memulai perubahan strategis, sebab untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya mereka yang diberdayakan. Justru

melalui kerja sama dapat membantu memastikan perubahan yang strategis yang dipikirkan secara lebih matang. Hal itu berarti bahwa kerja sama merupakan kecakapan yang berkembang melalui praktik.

5. Membimbing (*mentoring*), bertambahnya kematangan dan pengalaman akan sampai kepada kesadaran untuk mencapai lebih banyak dan memperluas pengaruh melalui kerja sama dengan orang lain. Diharapkan suka menularkan apa yang dipelajari dari pada menerapkan pengetahuan secara langsung sehingga dapat mencapai lebih banyak dengan cara ini daripada mengerjakannya sendiri. Proses ini disebut membimbing, yaitu bertindak sebagai teladan dan pelatih.
6. Mendukung (*supporting*), baik mengetahui perlunya mendukung orang yang diberdayakan dan membantu mereka untuk mandiri. Dampak nyata pemberdayaan baru muncul bila para manajer melihat bahwa peran utama mereka adalah memberi dukungan yang tepat. Untuk itu diperlukan upaya memimpin dari belakang yang mengarahkan pada kemandirian mereka yang diberdayakan.



BAB 7

ORGANISASI PROFESI GURU

A. Pengertian

Organisasi profesi adalah organisasi dari para profesional dalam suatu profesi tertentu (Tilaar, 2002: 87). Selanjutnya Tilaar menjelaskan bahwa organisasi profesi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang profesinya, serta melindungi hak dan kewajiban anggota profesi tersebut dan mempunyai kode etik yang harus dipatuhi oleh anggotanya sebagai suatu paguyuban.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memaparkan bahwa organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Lebih lanjut dicantumkan pada Pasal 41 sebagai berikut.

1. Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

4. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

B. Peran dan Fungsi Organisasi Profesi

Dalam menjalankan organisasinya maka setiap organisasi profesi termasuk juga di dalamnya organisasi profesi guru memiliki peran dan fungsi yang strategis di dalam mengayomi anggota profesinya. Secara umum peran dan fungsi organisasi profesi, menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam Goble (1977: 206) bahwa organisasi profesi menunjukkan kemungkinan kiprahnya dalam tugas, peranan dan tanggung jawabnya dalam memprakarsai kesempatan bagi guru untuk meningkatkan mutu profesionalnya dengan melakukan bidang-bidang garapan sebagai berikut.

1. Apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi untuk membantu peningkatan dan pengembangan karir para anggotanya? Ke dalamnya dapat termasuk juga jika anggotanya itu ingin alih fungsi dari guru kepada nonguru (pengelola, peneliti, pengembang dan sebagainya) dan sebaliknya. Juga termasuk kelancaran proses penangan dan penyelesaiannya yang justru sering terjadi permasalahan, untuk itu diperlukan terjalannya komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya pihak pengguna tenaga kependidikan.
2. Apa program kegiatan organisasi profesi guru untuk membantu para anggotanya dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan profesionalnya?
3. Apa program kegiatan organisasi profesi guru untuk membantu para anggotanya meningkatkan kewenangan dalam arti peningkatan jenjang pendidikan formal keprofesiannya? Mengembangkan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK)? Menghimpun dana, mencari sponsor untuk menunjang kelanjutan studi para anggotanya.

4. Apa upaya organisasi profesi guru untuk membina martabat profesinya? Merumuskan kode etik dan membentuk dewan/majelis pertimbangan kode etiknya? Membina disiplin kerja keprofesian serta mengupayakan penampilan yang dapat meningkatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak yang berkepentingan?
5. Apa program kegiatan organisasi profesi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan material, sosial, mental, dan spiritual para anggotanya? Membangun koperasi? Mengembangkan badan usaha? Menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, rekreasi, dan perhimpunan keagamaan dan kerohanian dan sebagainya.

Menurut Mudlofir (2014: 241) secara garis besar peran dan fungsi organisasi profesi mencakup hal-hal yang bertalian dengan:

1. Upaya-upaya yang menunjang terjaminnya pelaksanaan hak dan kewajiban para anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya mengenai jaminan-jaminan hukum, hidup, keluarga, sosial, hari tua dan kesejahteraan yang layak, sehingga dapat menunaikan kewajibannya dengan rasa aman, penuh kegairahan dan keikhlasan kerja yang optimal.
2. Upaya-upaya yang memajukan dan mengembangkan kemampuan profesional dan karir para anggotanya, melalui berbagai kegiatan ilmiah dan profesional seperti seminar, simposium, penerbitan dan *clearing house*, penataran, lokakarya dan sebagainya.
3. Upaya-upaya yang menunjang bagi terlaksananya, hak dan kewajiban pengguna jasa pelayanan profesional, baik keamanan maupun kualitasnya, sebagaimana di atur dalam kode etiknya.
4. Upaya-upaya yang bertalian dengan pengembangan dan pembangunan yang relevan dengan bidang keprofesiannya. Bagi organisasi profesi kependidikan, antara lain:
 - a. Turut serta dalam proses pembuatan undang-undang kependidikan, seperti pembuatan undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya.
 - b. Turut serta dalam pengembangan kurikulum dan sistem pendidikan.
 - c. Turut serta dalam penentuan standar pendidikan dan latihan prajabatan dan dalam jabatan profesi keguruan.

Peran dan fungsi organisasi profesi khususnya organisasi profesi guru menurut Pidarta (1997: 285-286) sebagai berikut.

1. Menciptakan kriteria pendidik yang profesional.
2. Menampung para pendidik yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota organisasi profesi.
3. Mencari peluang untuk memajukan profesi para anggota, antara lain untuk studi lanjut.
4. Mengadakan pembinaan profesi, antara lain dalam bentuk tim-tim pembina ke daerah-daerah.
5. Mengawasi pelaksanaan pendidikan dan menilai tingkat profesionalitas pendidik.
6. Menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik pendidik.
7. Meneliti dan menilai konsep-konsep dan praktik-praktik pendidikan di tingkat makro maupun mikro.
8. Mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala atau insidental untuk mengkomunikasikan informasi-informasi pendidikan, bertukar pikiran, dan bila mungkin menyatukan pendapat.
9. Membentuk konsep-konsep pendidikan melalui hasil-hasil penelitian pendidikan di tanah air.
10. Memperjuangkan hak-hak pendidik sebagai pejabat profesional.
11. Meningkatkan kesejahteraan pendidik agar bisa berpenghasilan layak sebagai orang profesional.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 42 dapat dilihat kewenangan organisasi profesi guru sebagai berikut.

1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
2. Memberikan bantuan hukum kepada guru.
3. Memberikan perlindungan profesi guru.
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
5. Memajukan pendidikan nasional.

C. Bentuk Organisasi Profesi Guru

Organisasi merupakan struktur koordinasi terencana yang formal, melibatkan dua orang atau lebih, dalam rangka mencapai tujuan bersama yang ditandai dengan adanya hubungan kewenangan dan tingkatan pembagian tenaga kerja (Robbins, 2002: 3). Koontz dan O'Donnel sebagaimana dikutip Hasibuan (2001: 25) menyatakan organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal, maupun secara horizontal di antara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Allen memaknai organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan (Hasibuan, 2001: 24). Selanjutnya Selznick menjelaskan organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan tekanan internal dan eksternal dan selalu dalam proses evolusi yang kontinu (Hasibuan, 2001: 26).

Organisasi menurut Atmosudirdjo adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu (Indrawijaya, 2000: 4). Sedangkan Manullang mendeskripsikan organisasi sebagai suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatalan tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

Schien dalam Muhammad (2007: 23) menyatakan organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Menurut Siagian (2003: 6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Indrawijaya (2004: 4) mendefinisikan organisasi sebagai suatu himpunan interaksi manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama. Menurut Hasibuan (2001: 24) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah dilihat bahwa organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu mencapai tujuan yang sudah ditentukan bersama. Di dalamnya terkandung aspek-aspek: (1) adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, (2) adanya sistem kerja sama yang terstruktur dari sekelompok orang, (3) adanya pembagian kerja dan hubungan kerja, (4) adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi, (5) adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati, (6) adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas, (7) adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi, dan (8) adanya penempatan orang yang akan melakukan pekerjaan.

Selanjutnya terkait dengan bagian-bagian utama yang terdapat dalam suatu organisasi dijelaskan Mudlofir (2014: 229-230) sebagai berikut.

1. Kesatuan sosial

Organisasi terdiri dari kelompok (himpunan, perserikatan) orang-orang yang saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam suatu kesatuan yang bermakna bagi dirinya dan bagi organisasi.

2. Struktur dan koordinasi

Aktivitas orang-orang dalam organisasi dirancang dan disusun dalam suatu pola tertentu yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja setiap bagian, dan hubungan kerja antarbagian. Pelaksanaan kegiatan setiap bagian tersebut dilakukan secara bersama-sama, menyeluruh, seimbang dan terpadu.

Struktur organisasi mempunyai tiga komponen yaitu:

- a. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada di dalam organisasi. Termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di

dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauhmana unit-unit organisasi tersebar secara geografis.

- b. Formalitas merupakan tingkat sejauhmana sebuah organisasi menyanggahkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku daripada anggotanya atau pegawainya.
- c. Sentralisasi mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengambilan keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua ujung dari sebuah rangkaian kesatuan (kontinum). Organisasi cenderung untuk desentralisasi atau cenderung untuk didesentralisasi. Namun untuk menetapkan letak organisasi di dalam rangkaian keputusan tersebut merupakan salah satu faktor utama di dalam menentukan apa jenis struktur yang ada.

3. Batasan yang dapat diidentifikasi

Setiap organisasi mempunyai batasan yang membedakan antara anggota organisasi dan bukan anggota organisasi, siapa dan apa yang menjadi bagian dan bukan menjadi bagian organisasi. Batasan organisasi dapat diidentifikasi melalui kontrak perjanjian yang disepakati oleh anggota dan organisasi. Anggota organisasi mempunyai ikatan dan berkontribusi secara terus-menerus melakukan aktivitas organisasi batasan organisasi ini juga dapat teridentifikasi melalui aktivitas organisasi yang dilakukan oleh para anggotanya.

4. Tujuan

Organisasi timbul dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi mencakup juga tujuan individu-individu yang berada dalam organisasi tersebut. Tujuan organisasi tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara kerja sama yang saling mendukung secara berkelompok.

Bentuk organisasi profesi guru ataupun organisasi dalam bidang pendidikan cukuplah beragam bentuknya. Hal ini dikarenakan bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesionalan itu ternyata cukup bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterikatannya dengan/dan antaranggotanya. Mudlofir (2014: 239) mencatat berbagai bentuk keorganisasian profesi guru antara lain:

1. Persatuan (*union*), antara lain Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Australian Education Union, Singapore Teacher's Union, National Union of the Teaching Profession Malaysia, Japan Teacher's Union.
2. Federasi (*federation*), antara lain: All India Federation of Teacher's Organisation, Bangladesh Teacher's Federation, Federation of Elementary Education Teacher's Association of Thailand.
3. Aliansi (*alliance*), antara lain: Alliance of Concerned Teachers Philippine.
4. Asosiasi (*association*) yang terdapat di kebanyakan negara.

Apabila ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaannya, organisasi profesi keguruan juga menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi seperti menurut:

1. Jenjang pendidikan di mana guru bertugas (tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi).
2. Status penyelenggaraan kelembagaan pendidikan (negeri atau swasta).
3. Bidang studi/keahlian (guru bahasa Inggris, matematika, fisika dan sebagainya).
4. Gender (pria atau wanita).
5. Latar belakang etnis (Melayu, Tamil, China dan sebagainya).

Bentuk organisasi profesi guru dapat juga dilihat dari struktur dan kedudukan dari segi jangkauan wilayah kerjanya antara lain:

1. Lokal (kedaerahan, kewilayahan), antara lain:
 - a. Forum interaksi guru Banyumas (Figurmas).
 - b. Asosiasi guru Nangroe Aceh Darussalam (Asgu-NAD).
 - c. Forum guru-guru Garut (Foggar).
 - d. Jakarta Teacher Club (JTC Jakarta).
2. Nasional (negara), antara lain:
 - a. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
 - b. Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI).
 - c. Federasi Serikat guru Indonesia (FSGI).
3. Internasional.

D. Organisasi Profesi Guru Indonesia

Organisasi profesi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang berdiri tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.

Organisasi PGHB bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah dan penilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka dua. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial dan latar belakang pendidikan yang berbeda.

Sejalan dengan perkembangan organisasi PGHB, berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu (PGB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan Guru Ambachs School (PGAS), Perserikatan Normal School (PNS), Hogere Kweek School Bond (HKSB), di samping itu juga terdapat juga organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Christelijke Onderwijs Veregening (COV), Katolieke Onderwijs Bond (KOB), Veregening Van Muloleerkrachten (VVM) dan Nederlands Indische Onderwijs Genootschap (NIOG) yang beranggota semua guru tanpa membedakan golongan agama.

Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi terhadap pihak Belanda. Hasilnya antara lain kepala sekolah setingkat HIS yang dulunya selalu dijabat oleh orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan.

Pada tahun 1932 nama PGHB diubah menjadi PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan yang tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.

Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, PGI tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya. Setelah kemerdekaan tepat pada tanggal 24-25 November 1945 diadakan kongres guru Indonesia di Surakarta. Melalui kongres ini segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama dan suku, sepakat dihapuskan. Maka tepat tanggal 25 November 1945 terbentuklah organisasi PGRI yang beranggota guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan.

Dengan semangat pelek merdeka bertalu-talu, di tengah bau mesiu pengeboman oleh tentera Inggris atas studio RRI Surakarta, guru-guru serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan yaitu: (1) mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, (2) mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, dan (3) membela hak dan nasib buruh umumnya dan guru pada khususnya.

Sejak kongres guru Indonesia di Surakarta tersebut, maka semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah PGRI. Jiwa pengabdian, tekad perjuangan dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia tetap setia dalam pengabdian sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan yang bersifat unitaristik, independen dan tidak berpolitik praktis. Untuk itulah sebagai penghormatan kepada guru, maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan hari lahir PGRI pada tanggal 25 November sebagai hari guru nasional.

Visi PGRI adalah terwujudnya PGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenagakerjaan yang mandiri dan non partai politik. Sedangkan misi organisasi PGRI adalah:

1. Menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, membela dan mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Berperan aktif dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan asas demokrasi, keterbukaan,

pengakuan terhadap hak asasi manusia, keberpihakan kepada rakyat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan anggota.
4. Melaksanakan, mengamalkan, mempertahankan dan menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia.
5. Membangun sikap kritis terhadap kebijakan pendidikan yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat.
6. Melaksanakan dan mengelola organisasi berdasarkan tata kelola yang baik (*good governance*).
7. Memperjuangkan perlindungan hukum, profesi dan kesejahteraan guru.
8. Mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang mempunyai kewenangan akreditasi, sertifikasi dan lisensi pendidik dan tenaga pendidikan.
9. Memperkuat solidaritas, demokratisasi, dan kemandirian organisasi disemua level/tingkatan.
10. Menyamakan persepsi, visi, dan misi para guru/pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional.
11. Mewujud PGRI sebagai organisasi yang memiliki kekuatan penekan (*pressure group*), pemikir (*thinker*), dan pengendali (*control*).

Selanjutnya nilai-nilai utama yang dianut organisasi PGRI sebagai berikut.

1. Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.
2. Unitaristik, independen, dan non partai politik.
3. Membangun persatuan, kesatuan, dan kebersamaan.
4. Membangun solidaritas guru yang kuat dan bersatu.
5. Mengedepankan mutu dan komitmen moral.
6. Menjunjung tinggi profesionalisme organisasi dalam memajukan pendidikan.
7. Disiplin, tertib, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
8. Membela harkat dan martabat anggota profesi.

9. Membangun dan mengedepankan kekeluargaan, persatuan, dan musyawarah dalam mufakat.
10. Memotivasi anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta menegakkan disiplin dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Di dalam mengembangkan visi dan misi yang telah dicanangkan maka strategi yang dijalankan organisasi PGRI adalah:

1. Menata, mempertahankan, dan meningkatkan citra PGRI sebagai organisasi profesi, ketenagakerjaan, dan perjuangan ada seluruh *stakeholders* pendidikan.
2. Menjadikan PGRI sebagai pilihan utama dan pertama para guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan dan menyalurkan aspirasinya.
3. Memperjuangkan realisasi anggaran pendidikan 20% APBN/APBD melalui berbagai instrument hukum, organisasi, perjuangan, dan kerja sama nasional dan internasional.
4. Memperjuangkan dan mengawal realisasi UUGD dan penertiban berbagai peraturan turunannya.
5. Memperjuangkan anggota PGRI khususnya dan guru pada umumnya untuk memperoleh peningkatan kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan memperoleh hak-hak profesionalnya sebagaimana yang diatur Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD).
6. Bekerja sama dengan berbagai pihak baik institusi pemerintah maupun swasta, organisasi kemasyarakatan dan berbagai *stakeholders* pada semua tingkat dan lini.
7. Memperluas jaringan dan akses dengan media dan organisasi sosial lain di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
8. Mengembalikan kesadaran dan kecintaan kepada PGRI melalui kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan organisasi pada semua tingkatan.
9. Melakukan sosial konstitusi organisasi pada anggotanya.
10. Mendorong dan memperkuat Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan menuju pengelolaan pendidikan yang transparan, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik dan orang tua.

11. Meningkatkan kemampuan *leadership* dan kemampuan pengurus.
12. Mendorong pelaksanaan manajemen pendidikan yang transparan responsif dan akuntabel pada semua lini pendidikan.
13. Berpartisipasi aktif mewujudkan tercapainya wajib belajar dan sekolah gratis untuk pendidikan dasar.
14. Memperjuangkan kesetaraan pendidikan negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan pendidikan.
15. Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dedikasi, dan loyalitas anggota PGRI, serta memperjuangkan pelaksanaan sertifikasi sesuai amanat UUGD dengan PGRI sebagai anggota konsorsium sertifikasi.

Selain organisasi profesi keguruan PGRI, maka di Indonesia terdapat berbagai organisasi keprofesian yang bertalian dengan kegiatan atau permasalahan garapan yang bertalian erat dengan bidang pendidikan, namun tidak ada kaitannya secara organisatoris secara kelembagaan dengan PGRI. Organisasi yang dimaksud antara lain:

1. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).
2. Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMAPI).
3. Himpunan Sarjana Pendidikan Agama Islam (HSPAI).
4. Ikatan Pengembang Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI).
5. Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN).
6. Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia (HIPKIN).
7. Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3 KNI).
8. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAI).
9. Dan sebagainya.



BAB 8

KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN DAN PERLIINDUNGAN GURU

A. Kesejahteraan Guru

Membicarakan mengenai kesejahteraan guru ini, dalam memori penulis kembali mengingat beberapa puluh tahun tepatnya tahun 1980-an lalu ketika bersekolah di sebuah sekolah dasar swasta di sudut desa di kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Guru yang mengajar pada waktu itu menggunakan sepeda sebagai transportasi pergi-pulang mengajar. Penulis juga masih mengingat, entah karena melihat “kesederhanaan hidup” guru jika tidak boleh menggunakan istilah ketidakcukupan maka ketika ditanyakan apa cita-cita yang ingin dicapai pada masa depan, maka kami pada waktu itu berjumlah 20-an, rata-rata menjawab ingin menjadi dokter dan pilot, dan hampir dipastikan hanya 1-2 orang dari kami yang menjawab ingin menjadi guru. Terkesan bagi kami bahwa profesi dokter dan pilot menyenangkan, sedangkan profesi guru cukup memprihatinkan.

Beberapa dekade lalu, profesi guru dalam konteks Indonesia tidaklah begitu mempesona bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, persoalannya adalah sederhana saja jika dikaji yaitu profesi guru ini belum menjanjikan dari aspek kesejahteraannya jika dibandingkan

dengan profesi-profesi lainnya. Hal ini dikarenakan: (1) gaji dan tunjangan fungsional yang tidak layak, (2) banyak berbagai potongan gaji, (3) karir yang tidak jelas, (4) prosedur kenaikan pangkat yang rumit, (5) belum terciptanya hubungan kerja yang profesional-kolegial, (6) kondisi kerja yang tidak memadai, dan (7) prosedur penerimaan gaji yang rawan terhadap terjadinya potongan (Jalal dan Supriadi, 2001: 323).

Tingkat kesejahteraan guru, khusus di Indonesia cukuplah memprihatinkan, diakui ataupun tidak, gaji guru di Indonesia, terlebih-lebih guru yang mengajar di lembaga pendidikan swasta masih jauh dari harapan, indikatornya dapat dilihat jika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima buruh/karyawan di masing-masing kabupaten/kota. Gaji guru swasta yang demikian belum dapat memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi guru. Jika keadaannya demikian, bagaimana guru bisa menjalankan pekerjaannya sebagai pendidik dan pengajar secara maksimal, kira-kira seperti apakah *performance* guru ketika sedang mendidik dan mengajar peserta didiknya?

Rendahnya kesejahteraan yang dialami guru yang tidak memadai dengan kebutuhannya, di tambah lagi dengan berbagai hal yang disebutkan di atas maka lengkaplah sudah penderitaan guru. Kemungkinan guru tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan pekerjaan sampingan. Akan menjadi tampak wajar ketika pekerjaan sampingan tersebut tetap berhubungan dengan pekerjaannya sebagai guru, misalnya mengajar kursus, mengajar bimbingan belajar (bimbel), mengajar les privat, menulis artikel, menulis buku, dan menjual buku. Namun tidak semua menjalani pekerjaan sampingannya seperti demikian, tak jarang ditemukan guru yang melakukan pekerjaan sampingannya sebagai tukang ojek, jual pulsa dan sebagainya. Hal ini tidak salah karena pekerjaan itu halal adanya, namun menjadi miris bagi kita melihat kondisi yang demikian.

Filosofi mendasar dalam sistem kesejahteraan guru adalah pemberian kompensasi yaitu pembayaran jasa sesuai dengan tugas. Oleh karena itu, dalam memberikan kesejahteraan guru sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Sistem penggajian yang adil (*equitable salary system*)

Semua sistem penggajian harus mengenali keterampilan yang diperlukan untuk masing-masing jabatan. Karena itu, tiap jabatan

harus dievaluasi untuk menentukan pentingnya dan hubungannya dengan jabatan yang lain. Tiap jabatan kemudian disusun berdasarkan nilainya, dengan demikian diperoleh deret peringkat klasifikasi yang dapat digunakan untuk menentukan gaji.

2. Dapat diperbandingkan (*comparability*)
Sistem pengajian harus kompetitif dan jika mungkin juga dengan institusi dan industri swasta lainnya.
3. Evaluasi jabatan (*position evaluation*)
Nilai relatif untuk tiap-tiap jabatan harus dibentuk bersama-sama melalui panitia yang terdiri dari administrator dan tenaga lainnya.
4. Insentif kinerja (*performance incentive*)
Program ganjaran difokuskan kepada perbaikan kinerja, oleh karena itu sistem penggajian harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat mendorong kinerja. Dalam jaitan ini penilaian kinerja harus teliti dan jujur.
5. Review gaji (*salary*)
Struktur gaji perlu selalu direview tiap tahun agar dapat kompetitif dengan profesi lainnya (Rebore, dalam Nasution dan Siahaan, 2009: 123)

Namun seiring dengan perkembangan perekonomian yang baik dan perhatian pemerintah yang fokus pada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, maka berdampak pada salah aspek yang penting untuk diperhatikan yaitu kesejahteraan guru. Menurut Jalal dan Supriadi (2001) bahwa secara umum, kesejahteraan guru perlu ditingkatkan hingga secara kumulatif meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan mencapai sekitar 2 kali lipat dari keadaan sekarang agar mereka dapat memenuhi kebutuhan minimalnya setiap bulan yang saat ini baru terpenuhi sekitar separuhnya. Untuk memberikan jaminan pada kesejahteraan guru, gaji tersebut (tetap) dibayarkan melalui anggaran pemerintah dalam APBN.

Saat ini pemerintah telah melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan profesi bagi guru melalui program tunjangan profesi yang diperuntukkan kepada guru-guru di Indonesia yang telah memperoleh sertifikat pendidik melalui proses sertifikasi. Bahkan terkait dengan tunjangan profesi

dan kemaslahatan lainnya telah dikukuhkan secara permanen dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 15 dinyatakan tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidikan yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen.
2. Memenuhi beban kerja sebagai guru.
3. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
4. Terdapat pada departemen sebagai guru tetap.
5. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun).
6. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bertempat tugas.

Bagi guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana di atas kecuali yang bertugas sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai berikut.

1. Kepala satuan pendidikan dengan bebas kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan.
2. Wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan.
3. Ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan.
4. Kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan.
5. Kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi.

6. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor.
7. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.

Selanjutnya bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidikan yang:

1. Berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
2. Memenuhi persyaratan akademik sebagai guru dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki sertifikat pendidikan.
4. Melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.

Selain gaji pokok, tunjangan fungsional dan tunjangan profesi, maka saat ini melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru juga diatur terkait dengan kemaslahatan tambahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Masalah tambahan ini diberikan kepada guru dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi guru yang bersangkutan.

Guru yang memperoleh masalah tambahan, apabila guru tersebut memiliki prestasi yaitu:

1. Menghasilkan peserta didik berprestasi akademik atau nonakademik.
2. Menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri.
3. Menghasilkan inovasi dan inovasi pembelajaran yang diakui oleh Pemerintah.
4. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual.
5. Memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.
6. Menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh Pemerintah.

7. Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai guru dengan dedikasi yang baik.

Syarat guru yang memperoleh masalah tambahan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh Departemen.
2. Memenuhi beban kerja sebagai guru.
3. Mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampunya.
4. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
5. Melaksanakan kewajiban sebagai guru.
6. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Maslahat tambahan juga diberikan kepada guru apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1. Diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan.
2. Diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan.
3. Diberi tugas tambahan sebagai ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan.
4. Bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pengawas satuan pendidikan.
5. Diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan.
6. Diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan.

7. Bertugas menjadi guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor.
8. Bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.

Maslahat tambahan yang diberikan kepada guru berupa: (1) tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi guru, dan (2) kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/atau putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain.

Mencermati pemaparan di atas, saat ini telah banyak kemaslahatan yang diterima oleh guru, namun pertanyaan adalah apakah gaji atau kemaslahatan lainnya yang diterima guru tersebut dapat menstimuli guru untuk bekerja lebih baik lagi, lebih profesional? Jawabannya adalah sangat bergantung kepada individu masing-masing guru. Karena sesungguhnya uang yang diperoleh dari sistem pengajian dan kemaslahatan lainnya bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan akhir yaitu memberikan yang terbaik kepada anak didik. Memang uang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup para guru tetapi uang bukanlah menjadi dasar utama untuk tidak memberikan yang terbaik kepada anak didik. Pengabdian adalah yang utama, terutama bagi seorang muslim yaitu ingin mendapatkan keridaan Ilahi Allah Swt.

Akhirnya, diakui ataupun tidak, faktor kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor yang menentukan tinggi-rendahnya kinerja guru. Makin tinggi kesejahteraan guru, maka diharapkan akan semakin tinggi pula kinerjanya. Dengan kesejahteraan yang tinggi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis guru secara pribadi dan keluarganya dapat terpenuhi dan tercukupi. Dengan kata lain, tinggi kesejahteraan yang diperoleh guru menjadi salah satu hal yang dapat memotivasi guru untuk bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan maksimal. Bukan hanya terbatas hal tersebut, kesejahteraan yang diterima guru juga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya ditengah-tengah masyarakat sehingga profesi guru dapat menjadi kebanggaan.

B. Penghargaan Terhadap Guru

Guru dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai mendapat posisi yang penting dalam pendidikan dan pembelajaran. Sebagai sebuah profesi yang diakui dan dihargai bahkan tata kelolanya diatur oleh pemerintah, hal ini setidaknya terlihat dari pengakuan eksistensi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 30 ayat satu dinyatakan bahwa guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah khusus.

Prestasi kerja guru dapat berupa: (1) menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional, (2) menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional, dan/atau (3) menjalankan tugas dan kewajiban sebagai guru dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.

Dedikasi luar biasa dapat berupa pelaksanaan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.

Guru yang bertugas di daerah khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama karirnya sebagai guru.

Di samping tiga kriteria guru di atas yang mendapat penghargaan, maka pemberian penghargaan kepada guru juga diberikan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan. Bahkan pada Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dinyatakan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman guru yang gugur di daerah khusus.

Bentuk penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

Bentuk penghargaan tersebut dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.

Waktu pemberian penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional dan/atau hari besar lainnya.

C. Perlindungan Guru

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh pencipta-Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan.

Hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia.

Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945.

Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlingkungannya seperti berikut ini:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

1. Perlindungan hukum

Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

- a. Tindak kekerasan.
 - b. Ancaman, baik fisik maupun psikologis.
 - c. Perlakuan diskriminatif.
 - d. Intimidasi.
 - e. Perlakuan tidak adil.
2. Perlindungan profesi
- Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Secara rinci, subranah perlindungan profesi dijelaskan sebagai berikut.
- a. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
 - b. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
 - c. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
 - d. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
 - e. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.
 - f. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan.
 - g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk:
 - 1) Mengungkapkan ekspresi.
 - 2) Mengembangkan kreatifitas.
 - 3) Melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

- h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
 - i. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
 - j. Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi:
 - 1) Substansi.
 - 2) Prosedur.
 - 3) Instrumen penilaian.
 - 4) Keputusan akhir dalam penilaian.
 - k. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi:
 - 1) Penetapan taraf penguasaan kompetensi.
 - 2) Standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan.
 - 3) Menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.
 - l. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi:
 - 1) Mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik.
 - 2) Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru.
 - 3) Bersikap kritis dan objektif terhadap organisasi profesi.
 - m. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi:
 - 1) Akses terhadap sumber informasi kebijakan.
 - 2) Partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal.
 - 3) Memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.
3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan

kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:

- a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas.
- c. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap:
 - 1) Risiko gangguan keamanan kerja.
 - 2) Risiko kecelakaan kerja.
 - 3) Risiko kebakaran pada waktu kerja.
 - 4) Risiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja.
 - 5) Risiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- d. Terbebas dari tindakan risiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- e. Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat:
 - 1) Kecelakaan kerja
 - 2) Kebakaran pada waktu kerja.
 - 3) Bencana alam.
 - 4) Kesehatan lingkungan kerja.
 - 5) Risiko lain.
- f. Terbebas dari multiancamannya, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat:
 - 1) Bahaya yang potensial.
 - 2) Kecelakaan akibat bahan kerja.
 - 3) Keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya.

- 4) Frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja.
- 5) Risiko atas alat kerja yang dipakai.
- 6) Risiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

4. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Pengakuan HaKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup: (1) hak cipta atas penulisan buku, (2) hak cipta atas makalah, (3) hak cipta atas karangan ilmiah, (4) hak cipta atas hasil penelitian, (5) hak cipta atas hasil penciptaan, (6) hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan (7) hak paten atas hasil karya teknologi



BAB 9

PROFESI KEGURUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian

Pendidik adalah orang yang tugasnya mendidik. Sedangkan dalam pengertian khusus – perspektif falsafah pendidikan Islami – pendidik adalah orang yang bertugas untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali perjanjian suci (*syahadâh*) yang pernah diikrarkan manusia di hadapan Tuhannya. Untuk melakukan tugas itu, maka pendidik haruslah seorang yang memiliki *al-'Ilm wa al-adâb*, yang dengan *al-'Ilm* dan *adab* tersebut ia mampu mengantarkan dirinya pada *syahadâh* terhadap Tuhan, sehingga ia layak menempati posisi sebagai pemelihara dan pembimbing manusia untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali perjanjian atau *syahadâh* primordialnya terhadap Allah Swt. (Al Rasydin dan Nizar, 2005).

Pendidik sebagai pengendali dan pengarah proses serta pembimbing arah perkembangan dan pertumbuhan manusia-didik. Pendidikan adalah manusia hamba Allah yang bercita-cita Islami yang telah matang rohaniah dan jasmaniahnya dan memahami kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan manusia-didik bagi kehidupannya di masa depan. Pendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang diperlukan

manusia didik, melainkan juga mentransformasikan tata nilai Islami ke dalam pribadi mereka sehingga mapan dan menyatu serta mewarnai perilaku mereka sebagai pribadi yang bernafaskan Islam (Arifin, 1993: 143).

Menurut Al Rasydin dan Nizar (2005) dalam historika pendidikan Islam, masyarakat Muslim mengenal beberapa terminologi yang selalu digunakan untuk menyebut atau memanggil orang-orang yang bertugas sebagai pendidik. Istilah tersebut antara lain *mu'allim*, *murabbi*, *muaddib*, *mudarris*, *mursyid*, *syaiikh*, dan *ustadz*.

Secara literal, *mu'allim* berarti orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karenanya, sebagai *mu'allim*, pendidik harus merupakan sosok 'alimun, yaitu ilmuwan yang memiliki pengetahuan tentang *al-Ālīm*, manusia, alam semesta, dan semua makhluk ciptaan-Nya dan ia sendiri hidup dengan pengetahuan yang dimilikinya tersebut. Dengan pengetahuannya itu, ia mampu menempatkan diri secara tepat dan benar sebagai *mu'allim* yang bertugas membantu peserta didik (*muta'allim*) dalam mengembangkan diri dan potensi yang mereka miliki untuk sampai pada *syahadāh* kepada Allah Swt. Karenanya, dalam perspektif Islam, seorang *mu'allim* tidak hanya bertugas 'membacakan' ayat-ayat *Qur'aniyah* dan *Kauniyah*, tetapi juga berkemampuan mensucikan jiwa (*tazkiyah al-nafs*) peserta didik sehingga dengan kesucian itu mereka mampu memahami dan menguasai *al-Kitāb* dan *al-Hikmah*, serta hal-hal lain yang belum mereka ketahui.

Kemudian *murabbi*, yang juga berarti pendidik. Terma ini merupakan *masdar* dari kata *rabba* yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Allah Swt. disebut sebagai *Rabb al-Alamin*, karena Dia-lah pemelihara dan pendidik alam semesta. Al-Maududi, sebagaimana dikutip Abdur Rahman Shalih Abdullah, menyatakan bahwa mendidik dan memberikan perhatian merupakan salah satu dari makna-makna implisit kata *Rabb*. Kemudian, dengan mengutip ar-Razi, dijelaskan bahwa sebagai pendidik, Allah Swt. tahu betul segala kebutuhan yang dididik-Nya, karena Dia adalah zat pencipta. Perhatian-Nya tidak terbatas hanya terhadap sekelompok manusia, tetapi Dia memperhatikan dan mendidik seluruh makhluk, dan karenanya Dia digelar *Rabb al-Alamin*.

Beranjak dari pengertian di atas, maka seorang *murabbi* atau pendidik harus merupakan sosok yang memiliki sifat-sifat *rabbany*, yaitu nama yang diberikan bagi orang-orang bijaksana, yang terpelajar dalam bidang

pengetahuan tentang *al-Rabb*. Pada satu sisi, pengetahuan tentang *al-Rabb* inilah yang mengantarkan dirinya pada peneguhan dan realisasi *syahadâh* primordial terhadap Tuhan. Sementara di sisi lain, pengetahuan dan *syahadâh* tentang *al-Rabb* itu pulalah yang menjadikannya layak sebagai *murabbi* bagi peserta didiknya (*mutarrabi*). Bila dikaitkan dengan QS *Al-Isra'* ayat 24: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” Maka dalam terma *murabbi* terkandung pula makna adanya kasih dan sayang dalam diri dan kepribadian seorang *murabbi*.

Adapun *muaddib*, secara literal bermakna manusia yang beradab (*insân adabî*). Karenanya, dalam konteks ini, sebagai *muaddib*, pendidik adalah orang yang bertugas menyemai dan menanamkan *adâb* ke dalam diri seseorang (*mutaaddib*). Hal ini telah dipesankan Rasulullah Saw. dalam salah satu hadisnya: *Jika memelihara seorang anak, maka berikanlah pendidikan yang baik (fa ahsana ta'dibahâ)*. Untuk itu, seorang *muaddib* haruslah sosok yang memiliki *adâb*, yang dengan *adâb* tersebut ia mampu mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, jiwa, dan perilaku bersyahadâh kepada Allah Swt.

Selain 3 (tiga) istilah di atas, di dalam literatur pendidikan Islam dikenal juga istilah *mursyid*, *mudarris*, dan *ustadz* untuk menyebut pendidik dalam pendidikan Islam. Pengertian *mursyid* biasa atau lazim digunakan untuk menyebut guru dalam lingkungan *Thariqah* (Tasawuf). Dalam konteks ini, *mursyid* adalah pendidik spiritual yang memberikan bimbingan ruhaniah kepada peserta didik untuk menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebagai seorang *mursyid*, pendidik berusaha menularkan akhlak, kepribadian, dan penghayatan spiritualnya kepada peserta didik, baik dalam hal beribadah, bekerja, belajar, yang kesemuanya serba *lillâh Ta'âlâ*. Dalam konteks pendidikan islami, hal itu mengandung makna bahwa pendidik merupakan *model* atau *significant person* yang menjadi sentral *identifikasi diri*, yakni pusat anutan dan teladan, bahkan konsultan ruhani bagi semua peserta didiknya.

Kemudian, terma *mudarris* juga merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menyebutkan pendidik dalam pendidikan Islam. Secara etimologi, terma *mudarris* berasal dari kata “*darasa – yadrusu – darsan wa durusan wa dirasatan*”, yang berarti: terhapus, hilang bekasnya,

menghapus, menjadikan usang, melatih, dan mempelajari. Dari pengertian etimologi ini, maka pendidik dapat didefinisikan sebagai orang yang berusaha mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, melatih keterampilan kepada peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, serta mengajarkan apa-apa yang belum diketahui peserta didiknya.

Menurut Muhaimin (2003: 285) kata *ustaz* mengandung pengertian bahwa sebagai *ustaz*, seorang pendidik dituntut komitmen dan kualifikasi profesionalismenya dalam mengemban tugas-tugas kependidikan. Seseorang dikatakan profesional manakala pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continious improvement*, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamanya di masa depan.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka profesi guru dapat diartikan dengan pekerjaan yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai peserta didik dengan bekal pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Konsep keguruan sendiri sebenarnya telah ada dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122 sebagai berikut. "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".

Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122 di atas menunjukkan kepada kita bahwa Allah Swt. menghendaki agar sebagian mukminin untuk mencari pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dan untuk selanjutnya kemudian mengajarkannya kepada saudara-saudaranya agar mereka dapat menjaga dirinya.

B. Peran, Fungsi dan Tugas Guru

Dalam perspektif Islam profesi atau pekerjaan termasuk profesi guru menempati posisi penting. Profesi atau pekerjaan menurut Islam harus

dilakukan karena Allah Swt., dalam hal ini motivasi pekerjaan karena Allah Swt. adalah dalam rangka mendapatkan keridaan-Nya. Meskipun pekerjaan itu dilakukan untuk orang lain, tetapi niat yang mendasari melakukan pekerjaan tersebut adalah perintah Allah. Dari sini dapatlah dipahami bahwa profesi atau pekerjaan dalam Islam dilakukan untuk atau sebagai pengabdian kepada dua objek yaitu: (1) pengabdian kepada Allah Swt., dan (2) pengabdian atau dedikasi kepada manusia atau kepada orang lain sebagai objek pekerjaan itu (Tafsir, 1992: 113).

Al Rasyidin (2006: 14) memaparkan dalam Islam, mendidik dipandang sebagai suatu tugas yang sangat mulia. Karenanya, Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya bila dibanding dengan manusia lainnya. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan (*ulama*) pada dasarnya merupakan penerus tugas-tugas para nabi dan rasul untuk mendidik umat manusia.

Pendidik muslim dilihat dari fungsinya, bukanlah hanya sebagai pribadi yang berwibawa terhadap manusia didiknya, melainkan juga sebagai pembawa/pendukung norma-norma Islami yang meneruskan tugas dan misi kerasulan para Rasulullah, sebagai pendidik utama, mencontoh sifat-sifat Allah sebagai Maha Pendidikan sekalian alam (Arifin, 1993: 143). Selanjutnya dijelaskan Arifin pendidik Islam adalah pemegang kendali proses kependidikan yang terarah kepada tujuan pendidikan Islam, lebih mementingkan pada penciptaan suasana edukatif yang mendorong efektivitas proses pembelajaran.

Tafsir (1992: 78) memaparkan secara umum, tugas pendidik adalah mendidik. Aktivitas mendidik itu sebahagian dilakukan dalam bentuk mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, memberi dorongan, memuji, memberi contoh atau keteladanan, membiasakan, bahkan memberi hadiah dan hukuman. Karenanya, tugas mendidik bukan hanya sekadar mengajar, tetapi juga memotivasi, menggerakkan, memberi penguatan, mengklarifikasi, dan memfasilitasi proses pembelajaran, yaitu proses di mana peserta didik dibina agar dapat merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya secara maksimal.

Menurut Al Rasydin (2006: 16) dalam Islam, tugas utama yang harus diemban pendidik pada dasarnya adalah mengenalkan dan meneguhkan kembali 'perjanjian suci' manusia terhadap Allah Swt. Untuk itu, seorang pendidik harus berupaya mengantarkan peserta

didiknya ke arah pengenalan kembali *syahadâh* kepada Allah Swt. yang telah diikrarkan ketika individu manusia berada di alam *rûh*.

Proses pengenalan itu harus berlanjut pada upaya edukatif untuk meneguhkan *syahadâh*, yakni konsistensi pengakuan akan ke-Maha Esaan Allah Swt. dalam seluruh sikap, amal, dan perbuatan sepanjang kehidupan. Dengan demikian, melalui pendidikan islami, pendidik berupaya mengantarkan peserta didik pada keimanan dan kedekatan kepada Allah Swt. Agar tujuan itu tercapai, maka pendidik harus berusaha mensucikan diri atau jiwa peserta didiknya; sebab hanya diri atau jiwa-jiwa yang suci sajalah yang dapat menuju dan dekat dengan Allah Swt., Tuhan Yang Maha Suci.

An-Nahlawi (1992: 239) memaparkan selain bertugas mengalihkan berbagai pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, tugas paling utama yang harus dilakukan pendidik adalah *tazkiyah al-nafs*, yaitu mengembangkan, membersihkan, dan mengangkat jiwa peserta didik agar sampai kepada penciptanya, menjauhkannya dari kejahatan, dan menjaga agar mereka tetap berada pada *fithrahnya*.

Sesungguhnya, *tazkiyah al-nafs* merupakan tugas pertama yang dilakukan para nabi dalam mendidik umatnya. Al-Qur'an menginformasikan bahwa sebelum men-*ta'lim* manusia dengan *al-'ilm*, sebagai pendidik, para nabi dan rasul terlebih dahulu melakukan proses pensucian jiwa. Pensucian tersebut merupakan pra kondisi untuk mempermudah proses penyemaian *al-'ilm*, penanaman *adab*, dan pembiasaan beribadah serta beramal shalih.

Karenanya, dalam posisinya sebagai pewaris tugas para nabi, maka pendidik Muslim harus meneladani mereka dalam melaksanakan tugas mendidik umat. Dalam konteks ini, mendidik bukan hanya mengajar, apalagi sekadar memindahkan pengetahuan kepada peserta didik. Mendidik adalah suatu aktivitas menyemaikan ilmu pengetahuan ke dalam diri peserta didik, menanamkan atau menginternalisasikan *adâb* ke dalam jiwa dan kepribadian mereka, dan melatih serta membiasakan mereka melaksanakan ibadah dan berbagai amal *shalih*.

Dalam perspektif Islam, pembuktian *syahadâh* kepada Allah Swt. harus ditunjukkan seorang hamba dalam bentuk pelaksanaan fungsi dan tugas penciptaannya di muka bumi. Dari dimensi fungsi, manusia diciptakan Allah Swt. sebagai makhluk ibadah (*'abd Allah*) yang

diperintahkan untuk secara kontinum mengabdikan dengan tulus dan ikhlas hanya kepada Allah Swt. semata. Untuk itu, dalam konteks pendidikan islami, tugas seorang pendidik Muslim adalah mengarahkan, mendidik, membimbing, dan mengantarkan diri peserta didik – diri jasmani dan ruhani – agar secara tulus dan ikhlas mengabdikan diri secara kontinum hanya kepada Allah Swt.

Kemudian, dari dimensi tugas, manusia diciptakan Allah Swt. sebagai khalifah, yang disertai amanah sebagai pemimpin dan pemakmur kehidupan di bumi. Dalam konteks ini harus dipahami bahwa kemampuan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan merupakan wujud nyata atau pembuktian *syahadâh* primordial manusia terhadap Tuhan. Untuk itu, seorang pendidik Muslim harus bertugas *men-ta`lim*, *men-ta`dib*, dan *mentarbiahkan al-'Ilm* serta melatih berbagai keterampilan atau kecakapan yang dibutuhkan peserta didik untuk mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas kekhilafahannya alam semesta ini.

C. Karakteristik Guru

Ibn Muqaffa menyatakan bahwa guru yang baik adalah guru yang mau berusaha memulai dengan mendidik dirinya, memperbaiki tingkah lakunya, meluruskan pikirannya dan menjaga kata-katanya terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada orang lain (Nata, 2003: 143).

Al-Ghazali menyatakan bahwa seorang guru yang menyampaikan ilmu pengetahuan harus berhati bersih, berbuat dan bersikap yang terpuji. Di samping itu guru juga harus bersikap sebagai pengayom, berkasih sayang terhadap murid-muridnya dan hendaknya memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Guru harus mengontrol, menasihati, memberikan pesan-pesan moral tentang ilmu dan masa depan anak didiknya dan tidak membiarkan mereka melanjutkan pelajarannya kepada yang lebih tinggi sebelum menguasai pelajaran sebelumnya dan memiliki akhlak yang mulia. Keseimbangan perkembangan keilmuan (akal) dan akhlak (hati perilaku) merupakan hal yang harus selalu dikontrol guru (Nata, 2003: 143-144).

Menurut An-Nahlawi (1992: 239-246) karakteristik seorang pendidik Muslim sebagai berikut.

1. Mempunyai watak dan sifat *Rabbaniyah* yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. Jika pendidik telah memiliki sifat *rabbani*, maka dalam semua aktivitas edukasi, ia akan berupaya menjadikan para peserta didiknya menjadi insan *rabbani* pula.
2. Bersifat ikhlas. Dengan profesi sebagai pendidik dan dengan keluasan ilmunya, ia bertugas hanya untuk mencari keridaan Allah Swt. dan menegakkan kebenaran.
3. Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik. Sebab, mendidik itu memerlukan pelatihan dan pengulangan, variasi metode, dan melatih jiwa peserta didik dalam memikul beban. Aktivitas mendidik harus dapat melahirkan hasrat dalam diri peserta didik untuk menyerap pengajaran ke dalam jiwa dan menerapkan atau mengamalkannya dalam perbuatan.
4. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Tanda kejujuran itu adalah menerapkan terlebih dahulu apa-apa yang akan diajarkan kepada peserta didik ke dalam dirinya sendiri. Sebab, jika ilmu dan amal sejalan, maka peserta didik akan mudah meniru dan mengikuti dalam setiap perkataan dan perbuatan.
5. Senantiasa membekali diri dengan ilmu dan kesediaan diri untuk terus mengkajinya. Sebab Allah Swt. memerintahkan kepada para rasul dan orang-orang *rabbani* untuk senantiasa belajar.
6. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan metode mengajar yang selaras dengan materi pengajaran dan situasi pembelajaran.
7. Mampu mengelola siswa, tegas dalam bertindak, dan berperilaku proporsional.
8. Mengetahui kehidupan psikis para peserta didik sesuai dengan masa perkembangannya, sehingga ia dapat memperlakukan mereka sesuai dengan kondisi atau keberadaannya.
9. Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang memengaruhi jiwa, keyakinan, dan pola berpikir peserta didik.
10. Bersikap adil terhadap para peserta didiknya. Adil dalam hal memberikan penilaian, adil dalam hal menegakkan kedisiplinan, adil dalam hal memberikan sanksi atau hukuman dan sebagainya.

Menurut Al-Abrasyi sebagaimana dikutip Yahya (2013: 27) bahwa sifat-sifat guru yang Islam itu antara lain: zuhud, bersih tubuh, bersih

jiwa, tidak ria, tidak pendendam, tidak menyenangi permusuhan, tidak malu mengakui ketidaktahuan, tegas dalam perkataan dan perbuatan, bijaksana, ikhlas, rendah hati, lemah lembut, pemaaf, sabar, berkepribadian, tidak merasa rendah diri, bersifat kebabakan, mengetahui karakter siswa.

Selanjutnya menurut Mahmud Yunus sebagaimana dikutip Tafsir (1992: 82) memaparkan sifat-sifat guru itu antara lain kasih sayang kepada siswa, bijak dalam memilih bahan pelajaran, melarang siswa melakukan hal-hal yang tidak baik, memberikan peringatan, memberikan nasihat, menghargai pelajaran lain yang bukan pegangannya, bijak memilih bahan pelajaran sesuai dengan taraf kecerdasan siswa, mementingkan berpikir dan berijtihad, jujur dalam keilmuan dan adil.

Tasmara sebagaimana dikutip Majid (2005: 72-73), karakteristik utama yang dimiliki seorang guru adalah "*fathonah*". Seorang yang *fathonah* itu tidak saja cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kearifan dalam berpikir dan bertindak dan mampu menangkap gejala dan hakikat di balik semua peristiwa.

Seorang yang *fathonah* mampu belajar dan menangkap peristiwa yang ada di sekitarnya, kemudian menyimpulkannya sebagai pengalaman berharga dan pelajaran yang memperkaya khazanah. Mereka tidak segan untuk belajar dan mengajar karena hidup hanya semakin berbinar ketika seseorang mampu mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan Tasmara bahwa karakteristik yang terkandung dalam *fathonah* sebagai berikut.

1. *The man of wisdom*

Guru tidak hanya menguasai dan terampil melaksanakan profesinya, tetapi juga sangat berdedikasi dan dibekali dengan hikmah kebijakan (QS Al-Baqarah ayat 269: "*Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)*").

2. *High integrity*

Guru sangat bersungguh-sungguh dalam segala hal, khususnya dalam meningkatkan kualitas keilmuan dirinya. Guru tidak hanya

memikirkan apa yang tampak, tetapi mampu melihat apa yang dibalik yang tampak tersebut melalui proses perenungan atau tafakur (QS Ali Imran ayat 190: “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal*”).

3. *Willingness to learn*

Guru memiliki motivasi yang sangat kuat untuk terus belajar dan mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dihadapinya (QS Yusuf ayat 111: “*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman*”).

4. *Proactive stance*

Guru bersikap proaktif dan ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Melalui pengalaman dan kemampuan dirinya, guru telah menjadikannya sebagai sosok yang mampu mengambil keputusan yang terbaik dan menjauhi hal-hal yang akan merugikan (QS Al-Maidah ayat 100: “*Katakanlah: Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan*”).

5. *Faith in god*

Guru sangat mencintai Tuhannya dan karenanya selalu mendapatkan petunjuk dari-Nya. Hidupnya bagaikan telah diatur Allah sehingga tumbuh rasa optimis untuk menjadikan Allah sebagai tempat dirinya bersandar atau bertawakkal (QS Ali Imran ayat 7: “*Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur’an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal*”).

6. *Credible and reputable*

Guru selalu berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai insan yang dapat dipercaya sehingga tidak pernah mau mengingkari janji atau mengkhianati amanah yang dipikulkan kepada dirinya (QS Ar-Ra'd ayat 19-22: “Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)”).

7. *Being the best*

Guru selalu ingin menjadikan dirinya sebagai teladan dan menampilkan unjuk kerja yang terbaik (QS Ali Imran ayat 110: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”).

8. *Empathy and compassion*

Guru menaruh cinta kepada orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri (QS At-Taubah ayat 128: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”).

9. *Emotional maturity*

Guru memiliki kedewasaan emosi, tabah, dan tidak pernah mengenal kata menyerah serta mampu mengendalikan diri dan tidak pernah terperangkap dalam keputusan yang emosional (QS Luqman ayat 17: “Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar

dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.

10. *Balance*

Guru memiliki jiwa yang tenang, sebagaimana dikenal dalam Al-Qur'an sebagai *nafsul muthmainah* (QS Al-Fajr ayat 27-30: “Hai jiwa yang tenang, Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya, Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, maka masuklah ke dalam surga-Ku”, dan QS Asy-Syu'araa ayat 89: “kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih”).

11. *Sense of mission*

Guru memiliki arah dan tujuan atau misi yang jelas dalam kehidupannya (QS At-Taubah ayat 33: “Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai”, QS Al-Fath ayat 28: “Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi”. Dan QS Ash-Shaff ayat 9: “Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci”)

12. *Sense of competition*

Guru memiliki sikap untuk bersaing dengan sehat. Karena mereka sadar bahwa setiap umat memiliki kiblat dan martabatnya dengan memiliki *sense of competition* (QS Al-Baqarah ayat 148 “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”).

Menurut Lubis (2014: 77), agama sangat menghargai mereka yang berilmu dan meninggikan para ulama dan hanya mereka yang berilmu sajalah yang benar-benar takut dan patih kepada Allah. Seorang yang berilmu bukan hanya sekadar yang sangat melahirkan gagasan normatif dan aplikasi, tetapi sekaligus juga memahami ajaran dan sejarah agamanya, artinya ilmuwan Muslim arus menguasai ajaran agamanya.

Selanjutnya dijelaskan Lubis (2014: 71) istilah khusus yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut sekelompok manusia pilihan semacam intelektual adalah *ulul albab*. Ciri-ciri *ulul albab* adalah:

1. Berzikir mengingat dan patuh kepada Allah Swt. di setiap waktu dan dalam semua hal. Yang menjadi pemikiran adalah langit dan bumi serta seluruh alam semesta ciptaan Yang Maha Pencipta.
2. Berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Seorang *ulul albab* mampu memilah yang baik dari yang buruk, bisa membedakan yang benar dari yang salah, serta cermat memilih yang baik dari yang keji, serta memperjuangkan yang adil dari yang zalim.
3. Terbuka, teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori, proposisi ataupun dalil yang dikemukakan orang lain.
4. Tahu sejarah dan mampu mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu. Dengan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dirinya dan orang lain di masa lalu, ia dapat menerapkan pilihan masa kini dan memproyeksikan visi masa depan.
5. Rajin bangun malam untuk sujud dan rukuk di hadapan Allah Swt.
6. Patuh pada sistem hukum dan ketentuan yang berdasarkan panduan Allah dan Rasul-Nya.
7. *Ulul albab* bukan hanya figur yang memiliki ilmu tetapi juga mencapai peringkat hikmah (wisdom, kebijaksanaan).
8. Tidak takut kepada siapa pun kecuali Allah Swt. semata. Sadar bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dengan bekal ilmunya maka tidak mau berbuat semena-mena. Tidak mau menjual demi kepentingan pribadi.
9. Kemampuan dan kesadaran untuk mengenal dan memilah antara sesuatu yang *muhkamat* (jelas dan tegas kebenarannya) dari hal-hal lain yang masih *mutasyabihat* (hipotesis, asumsi dan bermakna ganda).
10. Mengkaji rangkaian wahyu ilahi yang diturunkan kepada para utusan Allah sebelumnya.
11. Menerapkan dengan tekun dan lestari menuntut, mempelajari, mengajarkan, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

12. Dedikasi untuk menyebarluaskan ilmu, mengabdikan diri bagi kesejahteraan manusia dan menyampaikan kebenaran kepada semua serta mencerahkan kehidupan masyarakat.

Senada dengan penjelasan Lubis di atas, Achmadi (2005: 113-114) memaparkan bahwa kriteria *ulul albab* sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191 adalah:

1. Orang yang selalu ingat kepada Allah (*dzikrullah*) di kala berdiri, duduk, dan berbaring. Istilah-istilah tersebut merupakan kiasan kondisi seseorang. Berdiri maksudnya dalam keadaan jaya atau sedang berkuasa, duduk maksudnya dalam keadaan sedang-sedang saja, berbaring maksudnya dalam keadaan tidak berdaya. Di dalam semua keadaan itu *ulul albab* tetap ingat kepada Allah, dengan selalu bersyukur atau sabar. Dengan kesyukuran dan kesabaran, mental menjadi kuat, tidak lupa diri dan tidak kehilangan kendali dalam menghadapi ujian, cobaan dan tantangan hidup.
2. Memiliki kapasitas intelektual yakni kesanggupan memikirkan fenomena alam dan peristiwa kehidupan, akan mengantarkan *ulul albab* pada kesimpulan bahwa semua kejadian itu ada hikmahnya, ada nilai-nilai yang sangat bermakna bagi kehidupan. Dari kesimpulan itu pada gilirannya menumbuhkan kesadaran yang mendalam akan kebesaran Tuhan. Dengan kemampuan memikirkan fenomena alam dan peristiwa kehidupan sehingga memahami hukum-hukum (*sunnah Allah*) itulah ilmu pengetahuan berkembang. Sedangkan ilmu yang dikembangkan oleh *ulul albab* bukan sekadar ilmu untuk ilmu, tetapi selain ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan juga ilmu yang membawa peningkatan iman kepada Allah karena menyadari keagungan Tuhan. Dengan demikian *ulul albab* adalah manusia yang memiliki kualitas dzikir dan pikir yang tinggi.

D. Kode Etik Guru

Dalam perspektif Islam, kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlak. Akhlak itu sendiri disebutkan Ibn Miskawaih dan Al-Ghazali adalah ekspresi jiwa yang tampak dalam perbuatan dan meluncur dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan (Nata, 2003: 137).

Selanjutnya dijelaskan oleh Nata bahwa kode etik atau akhlak adalah tingkah laku yang memiliki lima ciri sebagai berikut.

1. Tingkah laku yang diperbuat itu telah mendarah daging dan menyatu menjadi kepribadian yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Tingkah laku tersebut sudah dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran lagi. Hal ini sebagai akibat dari keadaan perbuatan tersebut sudah mendarah daging.
3. Perbuatan yang dilakukan itu timbul bukan atas tekanan dari orang lain.
4. Perbuatan yang dilakukan berada dalam keadaan yang sesungguhnya bukan berpura-pura atau bersandiwara.
5. Perbuatan tersebut dilakukan atas niat semata-mata karena Allah, sehingga perbuatan dimaksud bernilai ibadah dan kelak mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt.

Tugas mengajar bukan hanya sekadar sebagai profesi kerja, melainkan lebih sebagai tuntutan kewajiban agama. Rasa keagamaan sangat kuat akan tanggung jawab agama berimplikasi pada kesepakatan para ahli dan pemerhati pendidikan Muslim terhadap semacam “kode etik”. Beberapa prinsip dasar kode etik tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Jawad Ridla dalam bukunya *al-Fikr al-Tarbawiyyyu al-Islamiyyu Muqadimat fi Ushulih al-Ijtima’iyyati wa al-Aqlaniyyati*. Prinsip-prinsip tersebut dikutip Majid (2005: 124-126) sebagai berikut.

1. Prinsip pertama: keharusan ilmu dibarengi dengan pengalamannya. Seorang guru Muslim berkewajiban mengamalkan ilmunya. Guru harus menyatukan antara ucapan dan perbuatannya, sebab ilmu itu diketahui dengan mata batin, sedangkan amal perbuatan diketahui dan disaksikan dengan mata lahir. Dan sementara orang yang bertumpu pada mata lahirnya lebih banyak, sehingga bila amal perbuatan guru itu bertentangan dengan ilmu yang dimilikinya, maka ia telah mengabaikan misi mendakwahnya kebenaran kepada orang lain. Sabda Rasulullah Saw.: Manakala manusia telah menguasai ilmu, sementara mereka meninggalkan pengalamannya, saling mencintai dengan lisan tetapi saling membenci dalam hati, dan saling memutuskan hubungan persaudaraan, maka ketika itu

Allah Swt. melaknat mereka, lalu membuat telinga mereka tuli dan mata mereka buta (HR Ath-Thabaraniy).

Al-Ghazali mengingatkan para guru berkenaan dengan pengamalan ilmu tersebut sebagaimana ucapannya: *“waspadalah wahai para guru, jangan sampai kamu itu menjadi orang yang hanya pintar mengajar dan mengingatkan saja, karena ini bisa menimbulkan bencana besar, kecuali kamu bersedia lebih dulu mengamalkan apa yang kamu ucapkan, baru kemudian menasihati orang lain”*.

Untuk dapat merealisasikan *prinsip pertama* ini maka perlu diperhatikan diperhatikan landasan psikologis yang dapat memperlancar proses kependidikan Islam yang sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip tersebut dijelaskan Arifin (1993: 199-209) sebagai berikut.

- a. Memberikan suasana kegembiraan

“Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya...” (QS Al-Baqarah ayat 25).

“Permudahlah mereka dan jangan mempersulit, gembirkanlah mereka dan janganlah berbuat sesuatu yang menyebabkan mereka menjauhi kamu”.

- b. Memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut

“Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, memohonlah ampun bagi mereka.” (QS Ali Imran ayat 159).

- c. Kebermaknaan bagi manusia didik

“Berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuannya.” (al-Hadits).

- d. Prasyarat

Untuk menarik minat manusia didik diperlukan *mukaddimah* dalam langkah-langkah mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang baru yang dapat memadukan perhatian dan minat ke arah bahan pelajaran tersebut. Pengalaman dan pelajaran telah diserap menjadi persepsi dalam pikiran mereka dihubungkan

dengan hal-hal baru yang hendak disajikan, merupakan jembatan yang menghubungkan pengertian-pengertian yang telah terbentuk dalam pikiran mereka sehingga akan mempermudah daya tangkap terhadap hal-hal baru yang diajarkan oleh guru.

e. Komunikasi terbuka

Guru mendorong manusia-didik untuk membuka diri terhadap segala hal atau bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka, sehingga mereka dapat menyerapnya menjadi bahan apersepsi dalam pikirannya. Al-Qur'an banyak mendorong manusia untuk membuka hati dan pikirannya, perasaan, pendengaran dan penglihatannya untuk menyerap pesan-pesan yang difirmankan Allah kepada mereka, sehingga apa yang mereka serap sebagai pesan-pesan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya.

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya.” (QS Al-Isra' ayat 36).

f. Pemberian pengetahuan yang baru

Manusia didik ditarik minat dan perhatiannya kepada bahan-bahan pengetahuan yang baru bagi mereka. Bila sebaliknya maka mereka tidak tertarik kepada bahan pelajaran. Dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip kebaruan dalam belajar baik tentang fenomena-fenomena alamiah maupun fenomena yang terdapat dalam diri mereka sendiri.

g. Memberikan model perilaku yang baik

Manusia-didik dapat memperoleh contoh bagi perilakunya melalui pengamatan dan peniruan yang tepat-guna dalam proses pembelajaran.

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah.” (QS Al-Ahzab ayat 21).

h. Pengamalan secara aktif

Mendorong manusia didik untuk mengamalkan segala pengetahuan yang telah diperoleh melalui proses pembelajaran atau pengamalan dari keyakinan dan sikap yang mereka hayati dan pahami sehingga benar-benar nilai-nilai yang telah ditransformasikan atau diinternalisasikan ke dalam diri manusia-didik menghasilkan buah yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat sekitar.

i. Kasih sayang dan bimbingan serta penyuluhan

“Dan sesungguhnya Kami tidak mengutus-mu kecuali untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk di alam ini.” (QS Al-Anbiya ayat 197).

“Dan peliharalah hubungan kasih sayang (silaturahmi).” (QS An-Nisa ayat 1).

“Tidak termasuk golonganku orang-orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda dan tidak mengetahui kewajibannya terhadap yang lebih tua”. (HR Al-Tabrany).

“Ajaklah ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan tutur kata yang baik” (QS An-Nahl ayat 125).

2. *Prinsip kedua:* bersikap kasih sayang terhadap siswa, dan memperlakukan mereka seperti putra-putrinya sendiri. Sabda Rasulullah Saw.: “sesungguhnya aku ini kamu, seperti seorang ayah bagi putra-putrinya” (HR Abu Daud). Hal ini menunjukkan bahwa menjadi kewajiban seorang murid dan guru untuk saling menyayangi dan mengasihi, sebagaimana mereka untuk saling mengasihi dan menyayangi dengan ayah dan ibu mereka.

Namun demikian melalui prinsip ini bukan berarti tidak boleh memberikan hukuman kepada anak didik khususnya kepada anak didik yang melanggar peraturan. Terkait dengan hukuman ini Arifin (1993: 218-219) mengutip pendapat beberapa pakar Muslim sebagai berikut.

- a. Ibnu Sina, memberikan saran agar penerapan hukuman atas anak didik dilakukan setelah diberikan peringatan keras. Sejauh mungkin agar para pendidik menghindarkan diri dari pemberian hukuman sehingga keadaan yang terpaksa, karena tak ada jalan lain. Dan jika perlu menghukum dengan pukulan,

maka boleh memukul anak didik dengan pukulan ringan, itupun setelah diberikan peringatan keras terhadapnya.

- b. Al-Ghazali, menasihati agar para pendidik tidak selalu memberikan hukuman terhadap anak didik akan tetapi justru mengurangi hukuman. Sebaliknya agar mendidik sesuai dengan fitrahnya dan menyetarakan kemampuan naluriannya yaitu keserasian antara *ghadhab* (kemauan keras) dengan syahwatnya sehingga berpengaruh positif sebagaimana aslinya.
 - c. Abu Hasan Al-Qabisi berpendapat seorang guru jangan menerapkan hukuman pukulan sehingga anak didik memperoleh adab (pendidikan) yang bermanfaat baginya. Kemarahan seorang guru tidak akan dapat menyembuhkan kemarahannya dengan memukul, dan tidak pula menyenangkan hatinya dengan kekerasannya dan hukuman demikian tidaklah adil di mata anak didiknya.
3. *Prinsip ketiga*: menghindarkan diri dari ketamakan. Seorang guru seyogyanya menghindarkan diri dari ketamakan dan komersialisasi ilmu, dan semestinya guru mempunyai *himmah* (cita-cita) tinggi, tidak rakus terhadap kekayaan orang lain. Sabda Rasulullah Saw.: “Waspadalah terhadap sikap tamak, karena ia sebenarnya adalah kemiskinan yang terselubung”. Dalam sabda lainnya: “semua manusia berada dalam kemiskinan, karena ketakutannya terhadap kemiskinan itu”. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa guru seharusnya tidak menjadikan ilmunya sebagai sarana mencapai tujuan dunia semata.
 4. *Prinsip keempat*: bersikap toleran dan pemaaf. Di antara kewajiban guru adalah bersikap lapang dada kepada murid-muridnya, menjaga jangan sampai terjadi keributan apalagi sampai perkelahian diantara mereka, karena yang demikian tidak ada manfaatnya. Firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa ayat 149: “jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa”.
 5. *Prinsip kelima*: menghargai kebenaran, para guru adalah penyampai kebenaran, mereka berkewajiban menghargai kebenaran dan komitmen memegangnya. Mereka berkewajiban memiliki etos keilmuan, sehingga dengan senang hati melakukan kajian penelitian untuk senantiasa melakukan perbaikan.

6. *Prinsip keenam*: keadilan dan keinsafan, apabila para ulama itu adalah pewaris nabi, sementara nabi diperintahkan untuk merealisasikan keadilan di kalangan umat manusia, maka para guru dituntut lebih banyak dibandingkan dengan yang lain untuk berpegang pada nilai-nilai keadilan. Karenanya, seorang guru harus selalu insaf (memiliki kesadaran dan rasa empati) pada saat mengadakan penelitian, melakukan pembicaraan, dan menyampaikan ilmu serta mendengarkan pertanyaan murid.
7. *Prinsip ketujuh*: rendah hati, seorang guru hendaknya meninggalkan sikap keras kepala dan berlagak serba tahu. Seorang guru hendaknya lebih mengedepankan ketulusan dan kejujuran jika menghadapi berbagai persoalan. Jika ia ditanya tentang sesuatu yang belum diketahuinya, hendaknya ia menjawab: entah, saya belum tahu (Ibn Jemaah dalam tadzkirat).
8. *Prinsip kedelapan*: ilmu adalah untuk pengabdian kepada orang lain. Seorang guru harus menyadari bahwa tujuan utama dari ilmu adalah memberi manfaat bagi orang lain. Jadi relasi manusia dengan ilmu dari sisi sebagai sarana bagi pelayanan hidup. Hubungan antara seorang guru dan para muridnya adalah ibarat ukiran tanah liat akan terukir dengan suatu gambar yang tidak pernah digoreskan di atasnya, dan bilakah bayangan tongkat akan tampak lurus, sedangkan tongkatnya bengkok? Firman Allah Swt.: *‘Akankah kamu menyuruh manusia melakukan kebajikan, sementara kamu melupakan dirimu sendiri’*.



BAB 10

EPIOLOG: GURU BANGSA

Saat ini terkadang generasi muda bahkan para guru itu sendiri kehilangan tokoh yang dapat “digugu” dan “ditiru”. Bila dilihat dalam historis bangsa Indonesia khususnya dalam penelitian begitu banyak figur guru bangsa yang dapat dijadikan teladan, sumber inspirasi dalam menggeluti profesi keguruan ini. Jika menyebutkan guru bangsa maka ingatan kita tidak terlepas dari sederetan nama yang mengukir pendidikan Indonesia. Dengan tidak bermaksud untuk “mengerdilkan” eksistensi figur-figur lainnya, dalam hal ini yang dipaparkan 3 (tiga) figur guru bangsa yaitu Ki Hajar Dewantara, Mohammad Syafei, dan KH. Ahmad Dahlan.

Butir-butir pemikiran-pemikiran guru bangsa tersebut sampai saat ini masih relevan dengan masalah pendidikan dan pembelajaran kekinian. Seolah-olah butir-butir pemikiran tersebut tidak hilang dan tergerus zaman. Ketika membahas tentang biografi dan butir-butir pemikiran “*guru bangsa*” tersebut memang tidak pernah ada habisnya. Ada banyak sekali hal yang harus kita pelajari dan kita ambil hikmahnya.

Semoga butir-butir pemikiran “*guru bangsa*” yang dipaparkan berikut dapat menjadi sumber inspirasi bagi guru dan pemerhati pendidikan lainnya dan secara khusus kepada generasi muda yang mencari jati

dirinya. Pemaparan butir-butir pemikiran ketiga “guru bangsa” ini dikutip dari berbagai sumber terutama sumber dari “dunia maya”.

A. Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga Pakualaman, putra dari GPH Soerjaningrat, dan cucu dari Pakualam III dan dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Dimakamkan di Taman Wijaya Brata, makam untuk keluarga Taman Siswa.

Pendidikan Ki Hajar Dewantara dimulai dengan bersekolah di *Europeesche Lagere School (ELS)* yang dulu merupakan sekolah dasar Belanda. Selanjutnya melanjutkan sekolah di STOVIA yang merupakan sekolah dokter untuk bumiputra. Tetapi selama sekolah di STOVIA beliau tidak sampai tamat dikarenakan sakit. Beliau juga pernah bekerja menjadi wartawan di berbagai media cetak terkenal pada masa itu. Seperti *Mideen Java*, *Sedyotomo*, *De Ekpress*, *Kaoem Moeda*, *Poesara*, *Oetoesan Hindia*, dan *Tjahaja Timoer*. Tulisan beliau di berbagai media tersebut sangat komunikatif dan juga kritis, sehingga dapat meningkatkan semangat rakyat pada masa itu dengan semangat antikelonial.

Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Boedi Oetomo (BO) tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia (terutama Jawa) pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Boedi Oetomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya.

Ki Hajar Dewantara juga menjadi anggota organisasi *Insulinde*, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indonesia yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda, atas pengaruh Ernest Douwes Dekker. Kemudian Douwes Dekker mendirikan *Indische Partij*, beliau diajak juga. Ketika pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913, timbul reaksi dari kalangan nasionalis, termasuk Ki Hajar Dewantara. Kemudian ia menulis *Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga (Een voor Allen maar Ook Allen voor Een)*.

Pada tahun 1908 beliau aktif sebagai pengurus di organisasi Boedi Oetomo. Selanjutnya beliau juga membuat organisasi sendiri bersama Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan Dr. Danudirdja Setya Budhi dan Dr. Cipto Mangoekoesoemo mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indische Partij pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Organisasi ini merupakan partai politik pertama di Indonesia yang beraliran nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Ketika ingin mendaftarkan partai ini, mereka di tolak oleh Belanda, karena dianggap menumbuhkan nasionalisme pada rakyat.

Dengan ditolaknya partai tersebut, mereka akhirnya Komite Boemi Poetra yang digunakan untuk membuat kritik ke pemerintahan Belanda. Mereka menulis berbagai kritikan untuk pemeritahan Belanda yang dimuat di surat kabar De ekpress yang pemiliknya pada saat itu adalah Douwes Dekker. Tulisan Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah *Seandainya Aku Seorang Belanda (Als ik een Nederlander was)*, dimuat dalam surat kabar De Expres tanggal 13 Juli 1913. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut.

Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Seajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa *inlander* diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya

Akibat tulisan ini, Ki Hajar Dewantara ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Idenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka (atas permintaan sendiri). Namun, Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai “Tiga Serangkai”.

Dalam pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Perhimpunan Hindia (*Indische*

Vereeniging). Di sinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh *Europeesche Akte*, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya.

Pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia dan bergabung dalam sekolah binaan dari saudaranya. Menjadi guru di sekolah tersebut membuatnya mempunyai pengalaman mengajar yang kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang akan dia dirikan.

Tahun 1922 saat berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Soewardi Soeryaningrat mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak saat itu, namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972 namanya dieja menjadi Ki Hajar Dewantara.

Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah Perguruan Nasional Taman Siswa (*National Onderwijs Instituut Taman Siswa*). Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada pribumi agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada 1 Oktober 1932. Namun kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut.

Bagian dari semboyan ciptaannya, *tut wuri handayani* (di belakang memberi dorongan), *ing madya mangun karsa* (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), *ing ngarsa sungtulada* (di depan memberi teladan), menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957 ia mendapat gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*, Dr. H.C.) dari universitas tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Menurut Ki Hajar Dewantara mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia (humanisasi), yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Di dalam mendidik ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan dan disempurnakan. Jadi sesungguhnya pendidikan adalah usaha bangsa ini membawa manusia Indonesia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (humanis).

Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah “penguasaan diri” sebab di sinilah pendidikan memanusiawikan manusia (humanisasi). Penguasaan diri merupakan langkah yang harus dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia. Ketika setiap peserta didik mampu menguasai dirinya, mereka akan mampu juga menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa.

Dalam konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara ada 2 hal yang harus dibedakan yaitu sistem “Pengajaran” dan “Pendidikan” yang harus bersinergis satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah (kemiskinan dan kebodohan). Sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin (otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik).

Keinginan yang kuat dari Ki Hajar Dewantara untuk generasi bangsa ini dan mengingat pentingnya guru yang memiliki kelimpahan mentalitas, moralitas dan spiritualitas. Beliau sendiri untuk kepentingan mendidik, meneladani dan pendidikan generasi bangsa ini telah mengubah namanya dari ningratnya sebagai Raden Mas Soewardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Perubahan nama tersebut dapat dimaknai bahwa beliau ingin menunjukkan perubahan sikap ningratnya menjadi pendidik, yaitu dari satria pinandita ke pinandita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa ksatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan Negara ini.

Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan spiritualitas, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Yang utama

sebagai pendidik adalah fungsinya sebagai model keteladanan dan sebagai fasilitator kelas. Nama Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Modelnya adalah Kyai Semar (menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini). Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak pandita juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan.

Menerjemahkan dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka banyak pakar menyepakati bahwa pendidikan di Indonesia haruslah memiliki 3 landasan filosofis yaitu:

1. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual.
2. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam (*natural law*), segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri (hati) manusia. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati; pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental.
3. Spiritual, pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan; pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan harga diri; setiap orang harus hidup sederhana dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya. *Output* pendidikan yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi

anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain.

Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh. Metode ini secara teknik pengajaran meliputi kepala, hati dan panca indera (*educate the head, the heart, and the hand*). Hal ini dituangkan dalam konsep pendidikan yang diselenggarakan di Taman Siswa

Orientasi asas dan dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara diupayakan sebagai asas perjuangan yang diperlukan pada waktu itu menjelaskan sifat pendidikan pada umumnya. Pengaruh pemikiran pertama dalam pendidikan adalah dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Bila diterapkan kepada pelaksanaan pengajaran maka hal itu merupakan upaya di dalam mendidik murid-murid supaya dapat berperasaan, berpikiran dan bekerja merdeka demi pencapaian tujuannya dan perlunya kemajuan sejati untuk diperoleh dalam perkembangan kodrati. Hak mengatur diri sendiri berdiri (*Zelfbeschikkingsrecht*) bersama dengan tertib dan damai (*orde en vrede*) dan bertumbuh menurut kodrat (*natuurlijke groei*).

Ketiga hal tersebut merupakan dasar alat pendidikan bagi anak-anak yang disebut “among metode” (sistem-among) yang salah satu seginya ialah mewajibkan guru-guru sebagai pemimpin yang berdiri di belakang tetapi memengaruhi dengan memberi kesempatan anak didik untuk berjalan sendiri. Inilah yang disebut dengan semboyan “Tut Wuri Handayani”.

Menyinggung masalah kepentingan sosial, ekonomi dan politik kecenderungan dari bangsa kita untuk menyesuaikan diri dengan hidup dan penghidupan ke barat-baratan telah menimbulkan kekacauan. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pengajaran yang terlampau memikirkan kecerdasan pikiran yang melanggar dasar-dasar kodrati yang terdapat dalam kebudayaan sendiri. Sementara hal yang menyangkut tentang dasar kerakyatan untuk mempertinggi pengajaran yang dianggap perlu dengan memperluas pengajarannya. dan memiliki pokok asas untuk percaya kepada kekuatan sendiri. Dalam dunia pendidikan mengharuskan adanya keikhlasan lahir-batin bagi guru-guru untuk mendekati anak didiknya. Sesungguhnya semua hal tersebut merupakan pengalaman dan pengetahuan Ki Hajar

Dewantara tentang pendidikan barat yang mengusahakan kebahagiaan diri, bangsa dan kemanusiaan.

Warisan Utama Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa yang menjadi representasi institusi pendidikan pribumi pada masa kolonial dan tetap eksis sampai hari ini. Di samping itu adalah tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan diterbitkan oleh Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dalam buku Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian I Pendidikan (1962) dan Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian II: Kebudayaan (1967).

Kepiawaiannya dalam menulis karena beliau sejak muda menjadi penulis dan wartawan. Ketiga, Buku Bagian I Pendidikan terbagi dalam 8 bab: pendidikan nasional, politik pendidikan, pendidikan kanak-kanak, pendidikan kesenian, pendidikan keluarga, ilmu jiwa, ilmu adab, dan bahasa. Tulisan tertua dalam buku ini yakni “Pendidikan dan Pengajaran Nasional” yang disampaikan sebagai prasaran dalam Kongres Permusyawaratan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 31 Agustus 1928. Ki Hadjar Dewantara dalam tulisan itu mengatakan bahwa kemerdekaan dalam dunia pendidikan memiliki tiga sifat: berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dapat mengatur diri sendiri. Buku Bagian II Kebudayaan terbagi dalam 5 bab: kebudayaan umum, kebudayaan dan pendidikan/kesenian, kebudayaan dan kewanitaan, kebudayaan dan masyarakat, hubungan dan penghargaan kita.

Dua buku itu adalah representasi pemikiran dan pembuktian dalam praktik pendidikan dan pengajaran dari Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan dan kebudayaan adalah basis kehidupan yang menentukan kualitas manusia dan bangsa. Analisa Lembaga pendidikan pada umumnya adalah sarana bagi proses pewarisan maupun transformasi pengetahuan dan nilai-nilai antargenerasi. Dari sini dapat terpahami bahwa pendidikan senantiasa memiliki muatan ideologis tertentu yang antara lain terekam melalui konstruk filosofis yang mendasarinya.

Sekolah memang bukanlah sesuatu yang netral atau bebas nilai. Sebab tak jarang dan seringkali demikian, pendidikan dianggap sebagai wahana terbaik bagi pewarisan dan pelestarian nilai-nilai yang nyatanya sekadar yang resmi, sedang berlaku dan direstui bahkan wajib diajarkan di semua sekolah dengan satu penafsiran resmi yang seragam pula. Dinamika sistem pendidikan yang berlangsung di Indonesia dalam

berbagai era kesejarahan akan menguatkan pandangan ini, betapa dunia pendidikan memiliki keterkaitan sangat erat dengan kondisi sosial-politik yang tengah dominan.

Ki Hajar Dewantara, melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologiknya. Menurutnya manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya.

Ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi. Dari titik pandang sosio-anthropologis, kekhasan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu berbudaya, sedangkan makhluk lainnya tidak berbudaya. Maka salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan mengembangkan kebudayaannya.

Persoalannya budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda. Dalam masalah kebudayaan berlaku pepatah: “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.” Manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam budayanya sendiri. Manusia yang seutuhnya antara lain dimengerti sebagai manusia itu sendiri ditambah dengan budaya masyarakat yang melingkupinya. Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya ingin menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan yaitu dari satria pinandita ke pinandita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa kesatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara.

Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar.

Oleh karena itu, nama Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Modelnya adalah Kyai Semar (menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini). Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak pandita juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan.

Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan Taman Siswa. Merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian. Namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab dan disiplin. Sedangkan maksud pendirian Taman Siswa adalah membangun budayanya sendiri, jalan hidup sendiri dengan mengembangkan rasa merdeka dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-aspek nasional.

Dalam berbagai tulisannya, Ki Hajar Dewantara tidak mengungkapkan visi dan misi tujuan pendidikan secara eksplisit. Namun dari berbagai pernyataan yang dapat dilihat bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki visi dan misi pendidikan tersebut. Ki Hajar Dewantara misalnya mengatakan bahwa: pendidikan nasional sebagaimana dianut oleh Taman Siswa adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya (*culturel-national*) dan ditujukan untuk keperluan kehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.

Pada bagian lain, Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lebih lanjut Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan yang dilakukan dengan keinsafan, ditujukan ke arah keselamatan dan kebahagiaan manusia, tidak hanya bersifat laku pembangunan, tetapi sering merupakan perjuangan pula. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tak boleh melanjutkan keadaan

kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasaskan peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.

Dengan memperhatikan beberapa pernyataan tersebut di atas, tampak sekali bahwa visi, misi dan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan sebagai alat perjuangan untuk mengangkat harkat, martabat dan kemajuan umat manusia secara universal, yang telah maju dengan tetap berpijak kepada identitas dirinya sebagai bangsa yang memiliki peradaban dan kebudayaan yang berbeda dengan bangsa lain. Pernyataan visi, misi dan tujuan pendidikan yang bernuansa perjuangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi sosial politik pada masanya, yaitu politik kolonial penjajah Belanda yang telah menguras kekayaan alam Indonesia serta menyengsarakan rakyat Indonesia secara lahir batin.

Pada masa Ki Hajar Dewantara, pemerintah kolonial Belanda memang telah mulai memberikan sedikit kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Namun, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Belanda itu tidak lepas dari tujuan kolonialismenya, dan bukan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Lebih lanjut Ki Hajar Dewantara mengatakan sebagai berikut.

Pengajaran pada zaman sekarang (masa Ki Hajar Dewantara hidup), tak dapat memberi kepuasan pada rakyat kita. Pengajaran *gubernemen*, yang seolah-olah dijadikan contoh dan umumnya dianggap sebagai usaha untuk menjunjung derajat kita, ternyata tak dapat memberi penghidupan pada kita, yang sepadan dengan cita-cita kita sebagai rakyat yang berusaha akan mendapatkan keselamatan. Hingga kini nasib kita semata-mata hanya memberi manfaat kepada bangsa lain.

Lebih jauh, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pengajaran yang kita terima dari pemerintah itu pertama kali sangat kurang, kedua kalinya sangat mengecewakan sebagai alat pendidikan rakyat. Sungguhpun ada sebagian kecil dari bangsa kita, yaitu kaum priyayi yang boleh menuntut pelajaran di sekolah Belanda hingga kemudian dapat meneruskan pelajarannya di sekolah yang lebih tinggi, tetapi untuk rakyat umum tertutup pintu yang dapat menuntut ke arah penghidupan yang pantas.

Kemudian kita mendapat sekolah bumiputra kelas satu, yang kelak menjadi HIS (*Holland Indische School*) banyak orang yang merasa senang, karena ada pengharapan bagi anak-anaknya mencapai kepandaian yang bisa dijadikan alat untuk mencapai derajat penghidupan yang sama dengan penghidupan bangsa lain yang hidup di tanah kita. Akan tetapi penghargaan itu dikatakan sia-sia belaka.

Ki Hajar Dewantara lebih lanjut mengatakan bahwa anak keluaran HIS itu umumnya masih kurang kepandaiannya untuk meneruskan pelajaran pada sekolah yang lebih tinggi. Kebanyakan anak-anak itu tak dapat diterima untuk MULO (Setingkat Perguruan Tinggi), karena kurang kepandaiannya, terutama dalam hal bahasa Belanda. Untuk mencari pekerjaan, maka anak-anak keluaran HIS itu masih sangat mentah; kebanyakan mereka itu hanya cakap buat menjabat jurutulis atau jurutulis pembantu dengan gaji yang sama dengan gaji jongsos atau koki.

Berdasar fakta-fakta tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia adalah pendidikan yang tidak bermutu, berbeda dengan pendidikan yang mereka berikan kepada bangsanya sendiri atau orang-orang Eropa, termasuk orang Cina. Dengan kata lain, pemerintah Belanda telah bersikap sangat diskriminatif terhadap bangsa Indonesia.

Atas dasar kenyataan inilah Ki Hajar Dewantara menginginkan agar rakyat Indonesia memiliki pendidikan yang tak kalah mutunya dengan pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan yang bebas dari campur tangan penjajah, ditentukan oleh visi, misi dan tujuan kita sendiri, melalui lembaga pendidikan yang diadakan oleh sendiri. Inilah yang menyebabkan Ki Hajar Dewantara mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa.

Adapun perlunya landasan budaya dan peradaban bangsa sendiri yang menjiwai pendidikan pendidikan bagi bangsa Indonesia sebagaimana terlihat pada Taman Siswa, adalah karena pendidikan yang diberikan oleh kolonial Belanda kepada bangsa kita pendidikan yang menyebabkan bangsa kita kehilangan kepercayaan pada dirinya dan kepada rakyatnya, bahkan juga kepada perikeadaban bangsa sendiri, sehingga kultur kita amat bergantung pada masyarakat Eropa di negeri kita ini.

Dalam kaitan ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa usaha dari perguruan kebangsaan untuk membelokkan aliran kolonial ke arah nasional dengan mengadakan cara dan si pengajaran sendiri, sering kali hanya dapat persetujuan dalam kata, tidak dengan tenaga, disebabkan karena umumnya orang masih mengharap dapat tempat di dalam masyarakat Hindia Belanda, sehingga sering kali aliran prinsipil nasional terdesak oleh pengaruh Eropa.

Selain itu bahwa perlunya ditanamkan jiwa kebangsaan dan kebudayaan Indonesia melalui pendidikan yang diselenggarakan sendiri, adalah karena sifat dari pendidikan kolonial Belanda dipandang oleh Ki Hajar Dewantara sebagai yang tidak sejalan dengan falsafat orang timur yang menekankan prinsip keseimbangan antara pemenuhan lahir batin, material spiritual, jasmani dan rohani, individual dan sosial, emosional dan intelektual. Pendidikan kolonial yang diberikan kepada rakyat Indonesia telah menyebabkan rakyat kita menjadi materialistis (mengutamakan hidup materi semata-mata), rasionalistis (hanya menerima hal-hal yang dianggap benar menurut akal saja), egoistis (hanya mementingkan diri sendiri saja), dan eropanis (mengagungkan budaya Eropa).

Selanjutnya Ki Hajar Dewantara menginginkan agar pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu pendidikan yang dapat membawa kemajuan bagi peserta didik. Ungkapan ini merupakan respons dari adanya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat kita, yaitu pendidikan yang mengajarkan hal-hal yang sulit dipelajari, tapi tidak ada fungsinya untuk menolong kehidupan rakyat di masa depan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa visi, misi dan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berasaskan kemerdekaan, keseimbangan, kesesuaian dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan.

Sebagai seorang pemikir dan praktisi pendidikan, Ki Hajar Dewantara dalam berbagai bukunya tidak terlibat dalam mengartikan kurikulum secara teknis sebagaimana tersebut di atas. Namun secara substansial, dapat dijumpai bahwa Ki Hajar Dewantara dengan caranya sendiri banyak membicarakan masalah kurikulum, yakni kurikulum dalam arti konvensional, yaitu nama-nama mata pelajaran yang perlu

diajarkan kepada para siswa sesuai dengan tingkatannya. Dalam kaitan ini, Ki Hajar Dewantara antara lain mengatakan sebagai berikut.

Pelajaran yang diberikan kepada anak-anak boleh dibagi menjadi dua. *Pertama*, mata pelajaran yang selain memberi pengetahuan atau kepandaian juga pengaruh pada kemajuan batin, dalam arti memasak (mematangkan) pikiran, rasa dan kemauan. Sedangkan yang *kedua*, adalah mata pelajaran yang akan memberi bekal pada anak-anak untuk hidupnya kelak dalam pergaulan umum; yaitu mata pelajaran yang meliputi lapangan kultural dan kemasyarakatan.

Pada bagian berikutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pelajaran yang menajamkan pikiran dan berdasarkan kemasyarakatan itu umumnya menjadi pokoknya program pendidikan secara Barat, yang kita jumpai dalam sistem sekolah dengan ekor-ekornya: intelektualisme dan materialisme, yaitu mendewakan angan-angan dan keduniaan. Adapun pendidikan secara Timur yang sekarang juga mulai dimasukkan dalam cara pendidikan Eropa, biasanya mengutamakan keluhuran budi pekerti.

Dengan ungkapan tersebut, terlihat bahwa Ki Hajar Dewantara menginginkan agar bahan pelajaran diberikan mengarah pada pembentukan kepribadian yang memiliki kemajuan yang seimbang antara dimensi intelektual dan emosional, duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahan pelajaran yang memajukan intelek dan kemasyarakatan, dengan memberikan ilmu dan kepandaian pada anak-anak kita yang ditujukan kepada matangnya batin, yaitu halusnya perasaan serta teguh, tetap dan luhurnya kemauan yang akhirnya dapat menyesuaikan hidupnya anak dengan dunianya (alam individu, alam kebangsaan, alam kemanusiaan); yang kesemuanya ini dimaksud untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, bagi orang seorang, serta di alam pergaulannya dengan orang-orang lain dapat dicapai pula tertib dan damai.

Selain mempertimbangkan faktor-faktor keseimbangan hidup sebagaimana tersebut di atas, mata pelajaran (kurikulum) yang diberikan kepada anak didik juga harus bertolak dari kodrat manusia yang memiliki sifat dan ciri-ciri kejiwaan yang sesuai dengan perkembangan usianya. Sejalan dengan ini, Ki Hajar Dewantara menguraikan bahan pelajaran sebagai berikut.

1. Untuk anak usia Taman Kanak-kanak hendaknya diajarkan:
 - a. Permainan dan olahraga dengan nyanyian dan tari (pemeliharaan badan secara *rhythms*).
 - b. Nyanyian rakyat (macapat, tembang, gending di tanah Jawa); menggambar corak dan warna, merangkai bunga, menyulam daun pisang yang disobek-sobek atau janur. Latihan ini diberikan untuk kesempurnaan pancaindera yang dihubungkan dengan rasa.
 - c. Cerita yang berwujud dongeng, mitologis dan historis (tambo hanya yang mengenai daerahnya) dihubungkan dengan pelajaran bahasa dan lagu (metode Sari Swara).
 - d. Pelajaran mengenal keadaan tempat kelilingnya si anak selaku persediaan pelajaran ilmu alam, ilmu kodrat, ilmu bumi, dan ilmu negeri (kemasyarakatan dan kenasionalan).
2. Untuk taman muda (masa wiraga wirama), hendaknya diberikan pelajaran:
 - a. Olahraga, pencak dan tari.
 - b. Nyanyian (di tanah Jawa: tembang gedhe, tembang gending), dan buat yang cakap yang disertai gamelan (instrumental), selanjutnya menggambar menurut kepandaian dan mulai berkenalan dengan alam kesenian Indonesia Raya dan Asia.
 - c. Bahasa dan cerita kesusasteraan, tambo dan keagamaan, mulai dari alam daerah, kemudian alam Indonesia dan akhirnya ikhtisar dari Asia.
 - d. Pengetahuan tentang kodrat alam, bumi, negeri dan pergaulan umum di tanah airnya, di daerah Asia dan di benua lainnya.
3. Untuk taman dewasa (masa wirama) hendaknya diajarkan:
 - a. Olahraga diteruskan dengan tujuan agar dapat mempertahankan diri.
 - b. Tari dilanjutkan nyanyian dang ending, menggambar dan kesenian lain-lainnya dimajukan, mulai belajar mengenal alam kesenian asing (Eropa).

- c. Bahasa dan kesusasteraan daerah dan Indonesia, bahasa asing dunia (bahasa Inggris), ilmu keagamaan, “*mythen*” dan “*legenden*” dari luar Indonesia.
- d. Ilmu negeri dari Indonesia sekarang dan dahulu dan pokok pangkalnya sosiologi dan ekonomi, penunutan anak-anak mengadakan perhimpunan umum, koperasi, perusahaan, majalah, *debating club*, dan badan pertolongan dan sebagainya.

Berdasarkan informasi tersebut terlihat dengan jelas bahwa Ki Hajar Dewantara secara eksplisit tidak berbicara tentang kurikulum dalam pengertian sebagai kurikulum yang bersifat konseptual teoretis akademis sebagaimana yang dikenal sekarang. Dalam konteks ini kita dapat mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara tidak memiliki kapasitas sebagai seorang teoretisi murni semata-mata. Ki Hajar Dewantara lebih memperlihatkan perpaduan antara teoretisi dan praktisi.

Sebagai teoretisi, terlihat pada gagasan dan pemikirannya yang didasarkan pada kebutuhan objektif masyarakat serta situasi kultural yang berkembang pada zamannya. Sedangkan sebagai praktisi, terlihat pada upaya melaksanakan gagasan dan pemikirannya itu. Yang dibicarakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah bahan pelajaran atau sejumlah mata pelajaran yang perlu diajarkan kepada para siswa sesuai dengan tingkatannya, yakni usia kanak-kanak, usia anak/remaja dan usia dewasa.

Kesesuaian mata pelajaran dengan tingkat usia anak ini mendapatkan perhatian dan penekanan yang spesifik dari Ki Hajar Dewantara. Hal yang demikian selain memperlihatkan kedalaman wawasannya tentang psikologi anak, juga karena tanggung jawabnya yang demikian besar terhadap kondisi kejiwaan, psikologis dan fisiologis peserta didik. Pemikiran dan gagasannya tentang mata pelajaran, secara substansial tampak masih cukup relevan untuk diterapkan di masa sekarang. Bagi kalangan praktisi pendidikan, mulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dapat mengambil model atau sekurang-kurangnya sebagai bahan perbandingan dari model pendidikan yang akan dikembangkan.

Hal lain yang cukup menarik dari gagasan dan pemikirannya tentang mata pelajaran tersebut di atas adalah wawasan yang bersifat global dan mendunia. Hal ini terlihat dari adanya mata pelajaran bahasa

asing, khususnya bahasa Inggris yang merupakan syarat untuk dapat melakukan pergaulan pada tingkat dunia. Hal yang menarik lainnya adalah bahwa Ki Hajar Dewantara amat mementingkan pendidikan kanak-kanak, kesenian, kekeluargaan, keindonesiaan, kejiwaan, kesopanan dan bahasa, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Pada seluruh mata pelajaran ini juga terlihat adanya hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Pemikiran dan gagasan Ki Hajar Dewantara dalam bidang kurikulum terlihat sangat dipengaruhi oleh semangat kemandirian yang dibangunnya dengan bertumpu pada budanya bangsa sendiri, yaitu budaya Indonesia. Sungguhpun ia dibesarkan daalam lingkungan pendidikan Belanda, tapi ia laksana ia dalam laut. Sungguhpun air laut itu asin, tapi ikan tidak asin, kecuali sengaja diasinkan. Ki Hajar Dewantara memperlihatkan kejeniusan, keorisinalan, dan kemandiriannya dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum (mata pelajaran). Ia ingin mandiri dan tidak mau menjiplak produk Belanda. Ia ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga dapat mengurus dan merumuskan sendiri tentang pendidikan yang terbaik bagi bangsanya.

Pendidikan budi pekerti termasuk bidang kajian yang mendapat perhatian yang menonjol dari Ki Hajar Dewantara. Pemikiran dan gagasannya tentang pendidikan budi pekerti secara akademis amat luas, kokoh dan komprehensif, sebagaimana hal ini terlihat pada sejumlah referensi dari para tokoh dalam bidang yang ia gunakan. Penguasaannya terhadap ilmu jiwa yang demikian luas dan mendalam telah digunakannya secara fungsional, proporsional dan elegan dalam membangun konsep atau teorinya tentang pendidikan budi pekerti.

Demikian pula semangat nasionalisme, kemandirian dan kemerdekaannya dari pengaruh budaya Belanda telah semakin mendorong baginya untuk merumuskan konsep budi pekerti yang khas bagi bangsa Indonesia. Hal yang demikian terlihat pada adanya bab khusus tentang pendidikan Adab dan Ethik dalam buku Bagian Pertama Pendidikan, mulai dari halaman 459 sampai 491 (32 halaman). Selain itu, pada setiap bab pembahasan buku tersebut, walaupun judulnya bukan membahas tentang budi pekerti tapi di dalamnya dijumpai wawasan yang bernuansa akhlak.

Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah jiwa dari pengajaran, dan bukan konsep yang bersifat teoretis sebagaimana yang

dipahami oleh masyarakat pada umumnya, dan bukan pula pengajaran budi pekerti dalam arti mengajar teori tentang baik buruk, benar salah, dan seterusnya. Dalam hubungan ini Ki Hajar Dewantara mengatakan sebagai berikut.

Dikiranya bahwa pengajaran budi pekerti mengandung arti: pemberian kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah tentang hidup kejiwaan atau peri keadaban manusia. Atau keharusan memberi keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan tentang budi pekerti secara luas dan mendalam. Mungkin ada yang mengira, bahwa untuk itu si pengajar harus seorang yang berpengetahuan dan berpengalaman. Paling sedikit harus seorang yang suci hidupnya, lahir dan batin. Guru diartikan sebagai orang yang harus “digugu” dan “ditiru”. Segala dugaan itu adalah tidak benar, atau boleh dikatakan sebagai sangkaan-sangkaan yang melebihi batas-batas kemungkinan dan keinginan. Karena itulah hendaknya diinsyafi, bahwa pengajaran budi pekerti tidak lain artinya daripada menyokong perkembangan hidup anak-anak, lahir dan batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban dalam sifatnya yang umum. Menganjurkan atau kalau perlu memerintahkan anak-anak untuk duduk ang baik, jangan berteriak-teriak agar tidak mengganggu orang lain, bersih badan dan pakaiannya, hormat terhadap ibu bapak dan orang-orang tua lainnya, menolong teman-teman yang perlu ditolong, demikian seterusnya, itulah semuanya sudah merupakan pengajaran budi pekerti. Terhadap anak-anak kecil cukuplah kita membiasakan mereka untuk bertingkah laku yang baik, sedangkan bagi anak-anak yang sudah dapat berpikir, seyogianyalah diberikan keterangan-keterangan yang perlu-perlu. Agar mereka dapat pengertian dan keinsyafan tentang kebaikan dan keburukan pada umumnya. Barang tentu perlu juga kepada anak-anak dewasa kita yang baik dengan cara disengaja. Dengan begitu maka syarat pendidikan budi pekerti, yang dahulu biasa saja disebut metode menyadari, menginsyafi dan melakukan dapat terpenuhi.

Itulah maksud dan tujuan pemberian pengajaran budi pekerti, dihubungkan dengan tingkatan-tingkatan perkembangan jiwa yang ada di dalam hidupnya anak-anak, mulai kecilnya sampai masa dewasanya. Ada baiknya untuk perbandingan kita memperhatikan tradisi pendidikan keagamaan (Islam) yang sudah di zaman dahulu terkenal sebagai metode syari’ah, hakikat, tarikat, dan makrifat.”

Uraian tersebut dengan jelas memperlihatkan perhatian yang demikian besar dari Ki Hajar Dewantara terhadap pentingnya pendidikan budi pekerti yang ditekankan pada pembentukan karakter, perilaku dan kepribadian melalui upaya pembiasaan melakukan perbuatan terpuji yang dilakukan mulai dari sejak kecil hingga dewasa. Pendidikan budi pekerti yang dimaksud olehnya bukanlah mengajarkan teori-teori tentang baik buruk dengan dalil-dalilnya yang serba menjelimet. Yang ia kehendaki dengan pendidikan budi pekerti adalah pembiasaan berbuat baik pada diri anak dalam kehidupan sehari-hari, hingga mendarah daging. Dan walaupun ada penjelasan dan keterangan, tapi hal yang demikian dilakukan hanya sebagai penguat, alat dan bukan tujuan.

Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memiliki pandangan pendidikan budi pekerti yang bersifat *integrated* dengan pengajaran pada setiap bidang studi. Dengan kata lain, Ki Hajar Dewantara menginginkan bahwa pada setiap pengajaran bidang studi apa pun harus mengintegrasikannya dengan pendidikan budi pekerti, dan tidak berhenti pada pengajaran mata pelajaran tersebut semata-mata. Baginya pengajaran adalah alat bukan tujuan. Pengajaran matematika misalnya adalah alat untuk menghasilkan anak yang memiliki keterampilan dalam memahami dan mempraktikkan rumusan hitungan secara tepat dan akurat. Namun bersamaan dengan itu pengajaran matematika tersebut harus diarahkan pada pembentukan budi pekerti.

B. Mohammad Syafei

Mohammad Syafei lahir tahun 1893 di Ketapang (Kalimantan Barat) dan diangkat jadi anak oleh Ibrahlim Marah Sutan dan ibunya Andung Chalijah, kemudian di bawa pindah ke Sumatra Barat dan menetap Bukit Tinggi. Marah Sutan adalah seorang pendidik dan intelektual ternama. Dia sudah mengajar di berbagai daerah di nusantara, pindah ke Batavia pada tahun 1912 dan disini aktif dalam kegiatan penertiban dan *Indische Partij*.

Pendidikan yang ditempuh Moh. Syafei adalah sekolah raja di Bukit Tinggi, dan kemudian belajar melukis di Batavia (kini Jakarta), sambil mengajar di sekolah Kartini. Pada tahun 1922 Moh. Syafei menuntut ilmu di Negeri Belanda dengan biaya sendiri. Di sini ia bergabung dengan “Perhimpunan Indonesia”, sebagai ketua seksi pendidikan.

Di Negeri Belanda ini ia akrab dengan Moh. Hatta, yang memiliki banyak kesamaan dan karakteristik dan gagagasan dengannya, terutama tentang pendidikan bagi pengembangan nasionalisme di Indonesia. Dia berpendapat bahwa agar gerakan nasionalis dapat berhasil dalam menentang penjajahan Belanda, maka pendidikan rakyat haruslah diperluas dan diperdalam.

Semasa di negeri Belanda ia pernah ditawarkan untuk mengajar dan menduduki jabatan di sekolah pemerintah. Tapi Syafei menolak dan kembali ke Sumatera Barat pada tahun 1925. Ia bertekad mendirikan sebuah sekolah yang dapat mengembangkan bakat murid-muridnya dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia, baik yang hidup di kota maupun di pedalaman.

Saat Indonesia merdeka, Syafei diangkat menjadi Ketua Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan untuk Sumatra dan selanjutnya mendirikan ruang pendidikan dan kebudayaan di Padang Panjang. Mohammad Syafei pernah menjadi Menteri Pengajaran dalam Kabinet Syahril II, 12 Maret 1946-2 Oktober 1946 serta menjadi anggota DPA. Tahun 1968 atas jasa-jasa yang bersangkutan di bidang pendidikan maka IKIP Padang memberikan gelar Dr. HC. Filsafat Pendidikan

Mohammad Syafei mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama *Indonesische Nederland School* (INS) pada tanggal 31 Oktober 1926. Di Kayu Tanam, sekitar 60 km di sebelah Utara kota Padang. Sekolah ini didirikan di atas lahan seluas 18 hektare dan di pinggir jalan raya Padang Bukit Tinggi. Ia menolak subsidi untuk sekolahnya, tetapi ia membiayai sekolah itu dengan menerbitkan buku-buku kependidikan yang ditulisnya. Sumber keuangan juga berasal dari sumbangan-sumbangan yang diberikan ayahnya dan simpatisan-simpatisan serta dari berbagai acara pengumpulan dana seperti mengadakan pertunjukan teater, pertandingan sepak bola, menjual hasil karya seni buatan murid-muridnya.

Di dalam pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai pelajaran bahasa asing yang pokok, juga ditekankan pada pelajaran-pelajaran yang akan terpakai oleh murid-murid apabila mereka kelak kembali. Pendidikan menurut Syafei memiliki fungsi membantu manusia keluar sebagai pemenang dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin antar bangsa.

Di sini tampak bahwa pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang digunakan manusia dalam mengarungi evolusi kehidupan. Manusia tahu kelompok tertentu dalam evolusi kehidupan dapat tersisih atau kalah, seperti bangsa Indonesia kala itu, karena tingkat kesempurnaan hidup dan batinnya memang berada pada tingkat yang rendah. Untuk mengatasi hal itu, mereka membutuhkan pendidikan yang tepat. Manusia dan bangsa yang dapat bertahan ialah manusia dan bangsa yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat atau zamannya. Untuk kepentingan ini ia mengusulkan konsep sekolah kerja atau sekolah kehidupan atau sekolah masyarakat.

Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk secara terus-menerus kesempurnaan lahir dan batin anak agar anak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan atau kemajuan. Kesempurnaan lahir dan batin ini ditafsirkan berlainan antarbangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya, antarkelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian, setiap bangsa atau masyarakat ingin keluar sebagai pemenang dalam perlombaan yang maha seru antara mereka dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin.

Pemikiran Syafei di atas menyarankan kesempurnaan lahir dan batin yang harus selalu diperbaharui. Hal ini terungkap dalam pemikiran G. Revesz seperti yang dikutip oleh Syafei bahwa lapangan pendidikan mesti berubah menurut zamannya, seandainya orang masih beranggapan, bahwa susunan pendidikan dan pengajaran yang berlaku adalah sebaik-baiknya dan tidak akan berubah lagi, maka orang atau lembaga yang berpendirian dan berpikir demikian telah jauh menyimpang dari kebenaran.

Demikianlah, tujuan pendidikan berupa kesempurnaan lahir dan batin, harus selalu terus disempurnakan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Dan kesempurnaan yang cocok untuk bangsa Indonesia? Syafei mengajukan pemikiran yang masih relevan untuk zaman kita ini. Manusia yang sempurna lahir dan batin atau aktif kreatif itu, apa saja unsur-unsur atau aspek-aspeknya? Ia menyatakan bahwa jiwa dan hati yang terlatih dan otak yang berisi pengetahuan.

Orang yang jiwa dan hatinya terlatih itu tekun, teliti, rajin, giat, memperhatikan, dan apik dalam segala bidang perbuatan. Pelatihan jiwa dan hati ini diperoleh melalui pelatihan berbuat atau bekerja

mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau bahkan pekerjaan tangan. Bahkan untuk pengisian otakpun, pelajaran pekerjaan tangan dapat turut dimanfaatkan.

Demikianlah, berdasarkan uraian di atas, tujuan personal pendidikan menurut Syafei dapat dideskripsikan dengan ringkas sebagai berikut. Manusia yang sempurna lahir dan batin ke kampung halaman di kota-kota kecil dan nagari-nagari di Sumatra Barat. Dengan demikian pendidikan di sekolah ini meliputi bidang-bidang:

1. Kerajinan seperti kerajinan, tanah liat, rajutan, rotan, dan seterusnya.
2. Seni seperti melukis, ukir, tari, drama dan lain-lainnya.
3. Grafika seperti percetakan, mengarang, jurnalistik dan lain-lainnya.
4. Semua jenis olahraga.
5. Manajemen.

Mohammad Syafei mendasarkan konsep pendidikannya pada nasionalisme dalam arti konsep dan praktik penyelenggara pendidikan INS kayu tanam didasarkan pada cita-cita menghidupkan jiwa bangsa Indonesia dengan cara mempersenjatai dirinya dengan alat daya upaya yang dinamakan aktif kreatif untuk menguasai alam semangat nasionalisme. Mohammad Syafei dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker dan Perhimpunan di negeri Belanda. Semangan nasionalismenya yang sedang tumbuh menimbulkan pertanyaan, mengapa bangsa Belanda yang jumlahnya sedikit dapat menguasai bangsa Indonesia yang jumlahnya sangat besar.

Pertanyaan ini dapat dipecahkan setelah berada dan hidup tengah tengah masyarakat Belanda. Ternyata faktor alam dan lingkungan masyarakat memengaruhi jiwa manusia. Bagaimanakah bangsa Indonesia dapat menguasai alam yang kaya raya dengan berbagai macam mineral, dengan tanah yang subur? Hal ini dapat terwujud melalui sistem pendidikan yang dapat mengembangkan jiwa bangsa yang aktif kreatif.

Melalui sistem ini, anak-anak sejak kecil sudah dilatih mempergunakan akal pikiran mereka yang didorong olah kemauan yang kuat untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Jelas kiranya bahwa nasionalisme Mohammad Syafei adalah nasionalisme pragmatis yang didasarkan pada agama, yaitu nasionalisme

yang tertuju pada membangun bangsa melalui pendidikan agar menjadi bangsa yang pandai berbuat untuk kehidupan manusia atas segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Mohammad Syafei menyatakan bahwa Tuhan tidak sia-sia menciptakan manusia dan alam lainnya. Tiap-tiapnya mesti berguna, dan kalau ini tidak berguna hal itu disebabkan karena kita yang tidak pandai menggunakannya.

Pandangan pendidikan Mohammad Syafei sangat dipengaruhi oleh aliran fevelomentalisme, terutama oleh gagasan sekolah kerja yang dikembangkan John Dewey dan George Kerschensteiner, serta pendidikan alam sekitar yang dikembangkan Jan Ligthar. John Dewey berpendapat bahwa pendidikan terarah pada tujuan yang tidak berakhhir, pendidikan merupakan sesuatu yang terus berlangsung, suatu rekonstruksi pengalaman yang terus bertambah.

Tujuan pendidikan sebagaimana adanya, terkandung dalam proses pendidikan, dan seperti cakrawala, tujuan pendidikan yang dibayangkan ada sebelum terjadinya proses pendidikan ternyata tidak pernah dicapai seperti cakrawala yang tidak pernah terjangkau. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan oleh John Dewey, rekonstruksi pengalaman kita harus diarahkan pada mencapai efisiensi sosial, dengan demikian pendidikan harus merupakan proses sosial.

Sekolah yang baik harus aktif dan dinamis, dengan demikian anak belajar melalui pengalamannya dalam hubungan dengan orang lain. Sehubungan dengan hal ini, John Dewey menyatakan bahwa pendidikan anak adalah hidup itu sendiri. Disini pertumbuhannya terus bertambah, setiap pencapaian perkembangan menjadi batu loncatan bagi perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, proses pendidikan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri yang terus-menerus berlangsung. Dalam proses tersebut berlangsung proses psikologis (perubahan tingkah laku yang tertuju pada tingkah laku yang canggih, terencana dan bertujuan) dalam proses sosiologis (perubahan adat istiadat, sikap kebiasaan dan lembaga) yang tidak terpisahkan.

Pandangan John Dewey bahwa pendidikan harus tertuju pada efisiensi sosial, atau kemanfaatan pada kehidupan sosial; dan belajar berbuat atau belajar melalui pengalaman langsung yang lebih dikenal dengan sebutan *learning by doing*, mempunyai pengaruh besar terhadap konsep pendidikan Muhammad Syafei. George Kerschensteiner mendirikan Arbeit schule atau sekolah Aktivitas. Ia mengartikan sekolah

aktivitas sebuah sekolah yang membebaskan tenaga kreatif potensial dari anak.

Pada awalnya Kerschensteiner memperkenalkan prinsip aktivitas untuk bidang-bidang industri dan pekerjaan tangan, kemudian memperluasnya pada aspek-aspek tingkah laku mental dan moral. Menurut Kerschensteiner, tugas utama pendidikan adalah pengembangan warga negara yang baik, dan sekolah aktivitasnya berusaha mendidik warga negara yang berguna dengan jalan:

1. Membimbing anak untuk bekerja menghidupi dirinya sendiri.
2. Menanamkan dalam dirinya gagasan bahwa setiap pekerjaan mempunyai tempatnya masing-masing dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengajarkan kepada anak bahwa melalui pekerjaannya, ia akan memberi sumbangan dalam turut serta membantu masyarakat untuk ke arah suatu kehidupan bersama lebih sempurna.

Gagasan dan model sekolah yang dikembangkan Kersschenteiner sangat memengaruhi konsep dan praktik pendidikan Mohammad Syafei di INS Kayu Tanam yaitu:

1. Fungsi pendidikan karena jiwa dan hatinya terlatih dan otaknya berisi konsep-konsep ilmu, hingga ia berbuat aktif kreatif dalam menghadapi lingkungannya. Kurikulum yang dikembangkan Syafei merupakan kurikulum untuk pendidikan dasar. Meskipun demikian, untuk tahun-tahun awal sekolah dasar ia menghendaki kurikulumnya, berupa pendidikan prasekolah. Contohnya kegiatan bermain-main dengan pasir, kertas dan lain-lain mendapat perhatian istimewa. Dengan demikian dari segi ini kurikulum pendidikan dasar.
2. Beberapa mata pelajaran dibahas Mohammad Syafei secara khusus, yaitu bahasa ibu, menggambar, membersihkan sekolah dan kelas, berkebun dan bermain-main.

Pemikiran Mohammad Syafei tentang pendidikan banyak dipengaruhi oleh pemikiran pendidikan awal abad ke-20 di Eropa, yaitu pemikiran pendidikan yang dikembangkan berdasarkan konsep sekolah kerja atau sekolah hidup atau sekolah masyarakat. Menurut konsep ini sekolah hendaknya tidak mengasingkan diri dari kehidupan

masyarakat. Untuk itu Mohammad Syafei mengutip pemikiran Guning, sebagian sekolah, karena kesalahannya sendiri dan ada pula sebagian yang tidak salah, telah mengasingkan diri dari kehidupan sejati dan telah membentuk dunianya sendiri. Mengukur segala-galanya menurut pemahannya sendiri. Selama hal itu tidak berubah, maka sekolah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ia selalu memaksakan kehendaknya sendiri kepada masyarakat yang seharusnya ia mengabdikan kepada masyarakat. Pada tempatnya sekolah cara baru bukan saja menghendaki sekolah kerja, tetapi akan berubah menjadi “Sekolah hidup” atau “Sekolah Masyarakat”.

Berdasarkan pemikiran di atas, Mohammad Syafei menghendaki guru mengaktifkan pengajaran, maksudnya membuat murid menjadi aktif dalam proses pengajaran. Metode dari pengajaran demikian ialah pekerjaan tangan. Dalam menjelaskan metode tangan ini, ia berkali-kali menggunakan konsep-konsep reseptif, reproduksi, dan produksi atau kreasi.

Resepsi produksi adalah metode lama, anak sebagai objek dan pasif, serta umumnya verbalistis. Sedangkan metode produksi ini, anak diberi kesempatan untuk aktif berbuat atau mencipta. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman berbuat yang melibatkan emosi, pemikiran, dan tubuh. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengajaran hendaknya mengupayakan aktivitas seoptimal mungkin pada siswa.

Pengajaran jangan terperangkap dan berhenti dalam bentuk reseptif dan reproduktif. Dasar pendidikan yang dikembangkan oleh Mohammad Syafei adalah kemasyarakatan, keaktifan, kepraktisan, serta berpikir logis dan rasional. Berkenaan dengan itulah maka isi pendidikan yang dikembangkannya adalah bahan-bahan yang dapat mengembangkan pikiran, perasaan, dan keterampilan atau yang dikenal dengan istilah 3 H, yaitu “*Head, Heart and Hand*”. Implikasi terhadap pendidikan adalah:

1. Mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional.
2. Mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh.
3. Mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang berwatak baik.
4. Menanamkan rasa cinta tanah air.
5. Mendidik anak agar mandiri tanpa tergantung pada orang lain.

Dalam pembelajaran, anak hendaknya menjadi subjek (pelaku) bukan dikenai (objek). Dengan menjadi subjek seluruh tubuh anak terlibat, juga emosi, dan pemikiran dan daya khayalnya. Keasyikan emosi, dan spontanitas anak ketika bermain hendaknya dapat dialihkan ke dalam proses belajar mengajar. Peranan guru adalah sebagai manajer belajar yang mengupayakan bagaimana menciptakan situasi agar siswa menjadi aktif berbuat. Dengan demikian, guru juga berperan sebagai fasilitator belajar yang memperlancar aktivitas anak dalam belajar. Guru yang demikian dituntut untuk memahami anak sebagai makhluk yang selalu bergerak dan memahami psikologi belajar, serta psikologi perkembangan.

C. KH. Ahmad Dahlan

Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwisy (lahir di Yogyakarta, 1 Agustus 1868 – meninggal di Yogyakarta, 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun) adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari tujuh bersaudara dari keluarga KH. Abu Bakar. KH. Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta pada masa itu, dan ibu dari KH. Ahmad Dahlan adalah putri dari H. Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu.

Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Walisongo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana 'Ainul Yaqin, Maulana Muhammad Fadlullah (Sunan Prapen), Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom), Demang Djurung Djuru Sapisan, Demang Djurung Djuru Kapindo, Kyai Ilyas, Kyai Muradla, KH. Muhammad Sulaiman, KH. Abu Bakar, dan Muhammad Darwisy (Ahmad Dahlan).

Pada umur 15 tahun, Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Pada periode ini, mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad

Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Makkah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syeh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, KH. Hasyim Asyari.

Sepulang dari Makkah, Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah.

Di samping itu KH. Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda H. Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kyai Munawwir Krapyak. KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah (adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan dimakamkan di Karangjajen, Yogyakarta.

Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Qur'an dan al-Hadits. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.

Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kyai palsu, karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priyayi, dan bermacam-macam tuduhan lain. Saat itu Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah OSVIA Magelang, yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priyayi. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun ia berteguh hati

untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Maka dari itu kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Srandakan, Wonosari, Imogiri dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda.

Untuk mengatasinya, maka KH. Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidiq Amanah Tabligh Fathonah (SATF) yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri ia menganjurkan adanya jemaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam.

Perkumpulan-perkumpulan dan Jemaah-jemaah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, yang diantaranya ialah Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi-Suci, Khayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, Thaharatul Qulub, Thaharatul-Aba, Ta'awanu alal birri, Ta'ruf bima kanu wal-Fajri, Wal-Ashri, Jamiyatul Muslimin, Syahratul Mubtadi. Dahlan juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastur van Lith pada 1914-1918. Van Lith adalah pastur pertama yang diajak dialog oleh Dahlan. Pastur van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu Kiai Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya.

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, disamping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan

kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.

Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan dua belas kali pertemuan anggota (sekali dalam setahun), yang saat itu dipakai istilah *Algemeene Vergadering* (persidangan umum).

Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik Indonesia menetakannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden No. 657 Tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah:

1. Mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat.
2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat, dengan dasar iman dan Islam.
3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam; dan dengan organisasinya.
4. Muhammadiyah bagian wanita (Aisyiyah) telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria.

Hampir seluruh pemikiran Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global ummat Islam yang tidak menyenangkan, di mana ummat Islam tenggelam dalam kejumudan (stagnasi), keterbelakangan, dan lebih dari itu, diperintah

di bawah kekuasaan kolonial. Situasi dan kondisi tersebut, terutama di Indonesia akhirnya mengilhami munculnya ide-ide pembaruan Ahmad Dahlan.

Ide-ide itu mulai, Ahmad Dahlan gagaskan kembali sejak dari Makkah pada kunjungannya yang pertama, yang kemudian lebih dimantapkannya setelah kunjungan ke Makkah pada kali yang kedua. Ini berarti bahwa selama kunjungannya itu telah terjadi kontak intelektual, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan pemikiran tokoh-tokoh reformasi Islam di Timur Tengah; sehingga para penulis mengemukakan bahwa ide pembaharuan Ahmad Dahlan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran reformer Islam Timur Tengah.

Dugaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Ahmad Dahlan cukup lama mempelajari pemikiran pembaruan Mesir sewaktu dua kali menetap di Makkah, bahkan sebagaimana dikemukakan M. Yunan Yusuf (1985: 49) bahwa Ahmad Dahlan sempat bertemu dan banyak berdiskusi dengan Rasyid Ridha. Bila ini benar, maka kontak intelektual itu telah memengaruhi pemikiran Ahmad Dahlan, dan setidaknya-tidaknya ada beberapa bisa penting dari kontak itu. *Pertama*, kontak itu menjadikan pemahamannya tentang Islam lebih mendalam dan komprehensif. *Kedua*, kecenderungan mempelajari Islam hanya melalui kitab-kitab yang dikarang para ulama, berubah ke arah pencarian dan penelaahan langsung dari sumber asasinya, Al-Qur'an dan Sunnah, *Ketiga*, bangkitnya semangat untuk memumikan kembali ajaran dan pemahaman Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Setelah sebelumnya bergerak secara individual, akhirnya ide-ide pembaruan Ahmad Dahlan dioperasionalisasikan melalui organisasi Muhammadiyah yang didirikannya pada tahun 1912. Secara global, ide-ide pembaruan itu dapat diklasifikasikan kepada dua dimensi yaitu:

1. Ahmad Dahlan ingin memurnikan kembali (*purifikasi*) ajaran Islam dari unsur-unsur bid'ah, khurafat dan takhayyul yang telah bercampur baur dalam ibadah dan akidah ummat Islam.
2. Ahmad Dahlan menginginkan ummat Islam keluar dari orbit pemahaman tradisional melalui *reinterpretasi* dan penjelasan kembali doktrin-doktrin Islam dalam bahasa dan rumusan yang dapat diterima fikiran (*tajdid*). Kesemuanya itu menurut Ahmad Dahlan harus berorientasi kepada sumber-sumber asasi Islam, Al-Qur'an

dan Hadits. Upaya inilah yang terus dilakukan Ahmad Dahlan sepanjang hayatnya.

Menurut Ahmad Dahlan, upaya menyeluruh untuk menyelamatkan ummat Islam dari situasi dan kondisi kurang menguntungkan yang menyelimutinya selama ini adalah melalui perbaikan pendidikan. Pendidikan harus ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan ummat. Ummat Islam harus dididik agar mereka cerdas, kritis dan memiliki daya analitis yang tajam dalam membaca peta kehidupannya ke masa depan. Kunci persoalan untuk meningkatkan kemajuan ummat Islam ialah pemahaman Islam yang komprehensif, dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits, dan penguasaan terhadap berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Upaya ke arah itu harus ditempuh melalui pendidikan.

Pendidikan menurut Ahmad Dahlan harus didasarkan pada landasan yang kokoh. Landasan inilah yang harus dijadikan sebagai kerangka filosofi perumusan konsep dan tujuan pendidikan. Dalam pemikiran Ahmad Dahlan, di alam ini hanya ada dua eksistensi, yaitu Khaliq dan makhluk. Yang pertama Pencipta, sedang yang kedua adalah yang diciptakan. Berangkat dari kerangka pemikiran ini, maka semua yang diciptakan wajib tunduk dan patuh kepada Penciptanya. Karena manusia adalah diciptakan, maka manusia wajib tunduk dan patuh pada Penciptanya.

Pencipta semua makhluk di alam ini adalah Allah Swt. Untuk itu, manusia wajib tunduk dan patuh kepada Allah Swt. Ketundukan dan kepatuhan itu harus mengacu pada tujuan penciptaannya oleh Allah Swt., sebab penciptaan manusia memang untuk suatu maksud. Kehadiran manusia di muka bumi bukanlah merupakan kehadiran yang kosong tanpa arti dan makna, akan tetapi adalah merupakan bahagian dari fenomena keberadaan Allah Swt. Dalam kerangka ontologi inilah konsep dan tujuan pendidikan harus diletakkan.

Manusia diciptakan Allah Swt. adalah sebagai 'abdun dan khalifahnya (Lihat QS 6:102; 51:56; 2:30; 6:165). Dalam proses kejadiannya, Allah Swt. melimpahkan kepada manusia ruh dan akal. Ruh adalah pertanda kehidupan dan akal dengan suatu cara tertentu menjadi wujud implikatif daya potensi ruh. Karenanya, pendidikan adalah media yang harus mampu mengembangkan daya potensi ruh tersebut untuk menalar petunjuk pelaksanaan ketundukan dan kepatuhan manusia

kepada Allah Swt., baik sebagai ‘abdun maupun khalifah-Nya. Untuk itulah maka menurut Ahmad Dahlan akal adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipelihara dan dikembangkan guna menyusun kerangka teoretis dan metodologis tata hubungannya dengan Sang Pencipta dalam konteks tujuan penciptaannya.

Manusia sendiri merupakan integrasi dari kedua dimensi itu, yaitu ruh dan jasad. Itu berarti bahwa dalam kajian epistemologinya, ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan mendayagunakan berbagai media, baik melalui persepsi inderawi, kalbu, wahyu maupun ilham. Karena itu, aktivitas pendidikan harus memberikan kemungkinan yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ke semua dimensi itu. Tetapi perlu diingat, bahwa pengembangan itu menurut Ahmad Dahlan haruslah merupakan proses integrasi ruh dan jasad dalam kerangka pelaksanaan amanah Allah Swt., baik sebagai ‘abdun maupun khalifah-Nya.

Kemungkinan untuk mengaktualisasikan gagasan itu bukanlah hal yang mudah, terutama bila dikaitkan dengan kondisi objektif lembaga-lembaga pendidikan tradisional. Dahlan melihat adanya problem epistemologi dalam pendidikan tradisional, di mana terlihat berkembangnya idiologi ilmiah yang hanya terbatas pada dimensi religiusitas. Idiologi ilmiah semacam ini secara sadar dipergunakan sebagai pelindung oleh kelompok ilmuwan dan pemikir pendidikan guna mempertahankan kepalsuan sematik epistemologi yang dikembangkannya. Kondisi ini pada gilirannya sebagaimana disinyalir Ahmad Dahlan hanya akan melahirkan pemikir-pemikir pemamah, yang tidak mampu berfikir mandiri, produktif dan kreatif dalam rangka memenuhi perannya, baik sebagai ‘abdun maupun khalifah di muka bumi.

Untuk itu, diperlukan kerangka metodologis yang bebas dan sistemik, kerangka inilah yang disebut Dahlan dengan *ijtihad*, yaitu mengerahkan otoritas intelektual untuk sampai pada suatu konklusi terhadap berbagai persoalan, manakala otoritas-otoritas yang lebih tinggi sudah tidak bisa lagi menyelesaikan persoalan itu. Dalam konteks ini, Ahmad Dahlan sadar bahwa hal itu perlu dilakukan penelaahan ulang dan penjelasan kembali doktrin-doktrin dalam bahasa dan rumusan yang dapat diterima oleh pikiran, tetapi sepenuhnya tidak menyimpang dari ketentuan Allah Swt.

Dari pemikiran itu terlihat bahwa Ahmad Dahlan menggugat praktik-praktik pendidikan ketika itu, di mana pendidikan hanya difahami sebagai proses pewarisan, penerusan dan sosialisasi perilaku individu maupun sosial yang telah menjadi model anutan baku dalam masyarakat. Tidak cukup tersedianya tempat bagi peserta didik untuk berdialog, berekreasi dan mengambil prakarsa. Padahal menurut Ahmad Dahlan, pengembangan daya kritis, sikap terbuka, akal sehat dan hati yang suci adalah jalan untuk mencapai pengetahuan tertinggi mengenai kesatuan hidup

Lembaga-lembaga pendidikan saat itu gagal dalam memenuhi tuntutan arus waktu akibat kebekuan berfikir dan sikap mengisolasi diri dari pengaruh luar. Karena itu Ahmad Dahlan melihat perlu adanya pembaharuan sistem pendidikan terutama dari pesantren menjadi sistem pendidikan modern. Sistem pendidikan modern itu harus merupakan konfigurasi baru, tidak hanya berorientasi pada aspek profan sebagaimana halnya sistem pendidikan kolonial, tetapi sebaliknya tidak pula hanya menekankan dimensi religiusitas semata, sebagaimana halnya sistem pendidikan tradisional. Disini tampak bahwa Dahlan ingin meletakkan visi dasar bagi reformasi pendidikan melalui penggabungan sistem pendidikan modern dan tradisional.

Berangkat dari gagasan pembaharuan sistem pendidikan itu, maka menurut Ahmad Dahlan pendidikan harus diarahkan pada usaha membentuk manusia berbudi pekerti yang baik, alim dalam agama, luas dalam pandangan dan faham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Itu berarti bahwa pendidikan adalah pembinaan pribadi sejati agar taqwa sebagai 'abdun dan tegar sebagai khilafah. Guna memenuhi tuntutan itu, maka proses pendidikan harus mengakomodasikan berbagai ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama, untuk mempertajam intelektualitasnya. Untuk itu menurut Ahmad Dahlan perlu diintegrasikan pengajaran ilmu-ilmu umum dan agama guna memproduksi alumni-alumni "Intelektual Ulama". Konsekuensinya adalah bahwa epistemologi Islam harus dijadikan landasan metodologis dalam pendidikan dan pembentukan kurikulumnya.

Dalam kerangka pemikiran di atas, maka isi pendidikan menurut Ahmad Dahlan adalah membaca, berhitung, menulis, ilmu bumi dan menggambar. Disamping itu mengembangkan:

1. Ibadah.
2. Persamaan derajat.
3. Fungsi perbuatan manusia dalam penentuan nasibnya.
4. Musyawarah.
5. Pembuktian dan penjelasan dengan akal.
6. Perlu kerja sama antara agama, kebudayaan dan kemajuan.
7. Perubahan kehidupan ditentukan oleh hukum kausal.
8. Pengarahan nafsu dan kehendak.
9. Demokratisasi dan liberalisasi kemerdekaan berfikir.
10. Perkembangan kehidupan duniawi bersifat progresif sebagai bagian dari peran aktif manusia.
11. (Perbaikan akhlak dan budi pekerti) bimbingan bagi seluruh ummat manusia.

Untuk merealisasikan ide dan gagasannya itu, maka pendidikan harus dikelola dengan cara modern sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat pada zamannya. Ini berarti bahwa lembaga-lembaga pendidikan harus membuka diri dan responsif terhadap inovasi atau pembaruan. Konsep ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ditemui Ahmad Dahlan ketika itu, sehingga lembaga-lembaga pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan arus waktu.

Wujud nyata pembaruan Ahmad Dahlan di bidang pendidikan antara lain adalah didirikannya sejumlah sekolah dengan sistem klasikal, sesuatu yang masih terhitung baru ketika itu bagi lembaga-lembaga pendidikan nonpemerintah. Sekolah itu merupakan gabungan sistem pendidikan Belanda dan sistem pendidikan tradisional yang mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama disamping pengetahuan umum.

Komitmen Ahmad Dahlan terhadap pendidikan demikian kuatnya dan ini merupakan faktor yang mendorong Ahmad Dahlan memasuki Budi Utomo pada tahun 1909 adalah untuk mendapatkan peluang memberikan pengajaran kepada para anggotanya. Strategi yang ditempuhnya ini juga dimaksudkan untuk membuka kesempatan agar dapat memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah pemerintah, karena para anggota Budi Utomo umumnya bekerja di sekolah-sekolah

dan kantor-kantor pemerintah. Komitmennya terhadap pendidikan ini jugalah selanjutnya yang menjadi salah satu ciri Muhammadiyah, organisasi yang didirikannya pada tahun 1912, sampai sekarang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. 2006. *UU No. 14/2005 Tentang Guru/Dosen: Antara Cita dan Fakta*. *Intizar: Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat*, Vol. 12/ No.2/Desember 2006.
- Achmadi. 2005. *Ideologi Pendidikan Islam. Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aditya, R., dan Wulandari L.H. 2011. *Kepuasan Kerja Guru*. Medan: USU Press.
- Agung, I. 2010. *Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru*. Jakarta: Bestari Buana Murni.
- AlRasyidin, 2006. *Telaah Konseptual Dan Pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam*. Dalam Lubis, S.A (Ed). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Bandung: Citapustaka.
- AlRasyidin dan Nizar, S. 2005. *Filsafat Pendidikan Islam. Pendekatan Historis, Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press.
- Amini, 2013. *Profesi Keguruan*. Medan: Perdana Publishing.
- An-Nahlawi, A. 1992. *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Alihbahasa. Herry Noer Ali. Bandung: Diponegoro.

- Arifin, M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, M. 1993. *Ilmu Pendidikan Islam. Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bafadal, I. 2003. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Barmawi dan Arifin, 2012. *Etika dan Profesi Kependidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Beidler, P.G. 1997, *What Makes a Good Teacher*, dalam Roth, J.K. *Inspiring Teaching*. USA: Anker, Publishing Company.
- Burhanudin, H. 2000. *Supervisi Pendidikan yang dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik, dan Pengawas*. Jakarta: Damai Jaya
- Danim, S. 2010. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung Alfabet.
- Danim, S. 2012. *Pengembangan Profesi Guru. Dari Pra-Jabatan, Induksi Ke Profesional Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamarah, S.B. 2005. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dessler, G.. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Buku 1. Jakarta: Indeks
- Goble, N.M. 1977. *The Changing Role of the Teacher*. Paris: UNESCO.
- Hamalik, O. 2004. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariandja, M.E. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia.
- Hasibuan, M.S.P. 2001. *Organisasi Dan Motivasi. Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M.S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hunt, G.H, et-al. 1999. *Effective Teaching, Preparation and Implementation*. Illionis. Charles C. Thomas Publisher.
- Indrawijaya, A.I. 2000. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ivancevich, dkk. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Edisi Ketujuh, Alih bahasa: Gina Gania. Jakarta: Erlangga.

- Jalal, F., dan Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kusnadi. 2003. *Masalah, Kerja sama, Konflik, dan Kinerja*. Malang: Tanada.
- Lubis, N.A.F.2014. *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Majid, A. 2005. *Perencanaan Pembelajaran. Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marno, 2008. *Strategi dan Metode Pengajaran*. Jakarta: Ar-Ruzz
- Moedjiarto. 2002. *Sekolah Unggul. Metodologi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Duta Graha Pustaka.
- Moehariono, 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mudlofir, A. 2014. *Pendidik Profesional. Konsep, Strategi dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin, 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum, hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Nuansa.
- Muhammad, A. 2007. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2007. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, I. dan Siahaan, A. 2009. *Manajemen Pengembangan Profesionalitas Guru*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Nata, A. 2003. *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurdin, S., dan Usman, B. 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta; Ciputat Pers.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Pidarta, M. 1997. *Landasan Kependidikan. Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno, 2009. *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Purwanto, M.N. 1995. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rivai, V., dkk. 2008. *Performance Appraisal. Sistem yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Robbins, S.P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Rochman, C., dan Gunawan, H. 2012. *Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani Oleh Siswa*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rosyada, D. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ruky, A. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sagala, S. 2007. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Saondi, O., dan Suherman, A. 2010. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sardiman, AM. 2003. *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saud, U.S. 2010. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta
- Satori, D., dkk. 2012. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Siagian, S.P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, P.J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Slameto. 1995. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetjipto dan Rafli, K. 1994. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarsih, C. *Etika Profesi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Suwardi, 2008. *Manajemen Pembelajaran Menciptakan Guru Kreatif dan Berkompetensi*. Surabaya: Temprina Media Grafika.
- Syafaruddin, 2005. *Ilmu Pendidikan Perspektif Baru Rekonstruksi Budaya Abad XXI*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syah, M. 2010. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syamsuddin, A., dan Budiman, N. 2003. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tafsir, A. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung; Remaja Rosddakarya.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Uno, H.B. 2008. *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, M.U. 2002. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winardi, J. 2007. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wiyani, N.A. 2015. *Etika Profesi Keguruan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yahya, M. 2013. *Profesi Tenaga Kependidikan*. Bandung; Pustaka Setia.
- Yamin, M., dan Maisah. 2010. *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Yuniarsih, T. dan Suwatno. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*. Bandung: Alfabeta.



BIODATA PENULIS



Dr. Rusydi Ananda, M.Pd., lahir di Tanjung Pura Langkat, dengan Ayah yang bernama H. Thaharuddin AG (alm) dan Ibu Hj. Rosdiani. Anak pertama dari 6 bersaudara. Menempuh pendidikan SD di Medan tamat tahun 1984, melanjutkan ke SMP di Medan tamat tahun 1987, kemudian menyelesaikan SMU di Medan tamat pada tahun 1990. Melanjutkan pendidikan strata 1 (S-1) di IAIN SU jurusan Tadris Matematika yang diselesaikan pada tahun 1995. Meraih gelar Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan dengan konsentrasi studi Teknologi Pendidikan pada tahun 2005. Doktor Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta program studi Teknologi Pendidikan.

Menikah dengan Tien Rafida, yang berprofesi sebagai PNS/Dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Saat ini dikarunia Allah Swt. 3 (tiga) orang anak, yaitu: Annisa Arfitha, Salsabila Hadiyanti dan Faturrahman.

Pengalaman kerja dimulai sebagai tenaga administrasi di PT Marhamah Medan pada tahun 1995-1996. Guru matematika di SMP Perguruan Bandung tahun 1996-1997. Guru Matematika di SMA UISU

Medan tahun 1997-1999. Sejak tahun 2000 sampai sekarang bekerja sebagai PNS/Dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Sejak tahun 2006-2008 bertugas di pusat penelitian UIN Sumatera Utara dan tahun 2008-2011 dipercaya sebagai ketua program studi Pendidikan Matematika UIN Sumatera Utara. Sejak tahun 2017 sebagai sekretaris program magister PAI FITK UIN SU.

Aktivitas lainnya yang digeluti adalah sebagai trainer di Widya Pustpita tahun 2003-2009, trainer pada kegiatan yang dikelola DBE2 USAID tahun 2006-2010, dan trainer di AUSAID sejak tahun 2014-2015.

Karya berupa buku yang sudah diterbitkan adalah *Evaluasi Pembelajaran* (2014), *Penelitian Tindakan Kelas* (2015), *Pengantar Kewirausahaan*, *Rekayasa Akademik Melahirkan Entrepreneurship* (2016), *Evaluasi Program Pendidikan* (2017), *Inovasi Pendidikan, Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan* (2017), *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* (2017), *Statistik Pendidikan* (2018), *Profesi Pendidik dan Kependidikan* (2018), *Pembelajaran Terpadu* (2018), *Perencanaan Pembelajaran* (2019).